Spectrum Materi Dasar

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Spectrum
Materi Dasar

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

PMII KOMISARIAT
IAIN BONE 2019-2020

Materi: PMII Kom. IAIN Bone

Penyusun: Fathurrahman (Ketua I PMII Komisariat IAIN Bone).

"Ketahuilah olehmu,
Setiap yang namanya Ilmu
-tidak kecuali sejarah-
Harus siap rela dan diuji
Serta dipertanyakan benar atau tidaknya.
Jangan kamu telan begitu saja
Seperti sebutir Kacang.
Ragu-ragu itu suatu langkah
Yang mesti ditempuh.
Jika kita mau sampai ke keyakinan
Yang tak tergoncahkan. "

-MAHBUD DJUNAIDI-

(*Aktivis PMII***)**

DAFTAR ISI

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrohiim…

Salam Pergerakan!

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah atas kehendak-Nya. Serta sholawat dan taslim kepada Baginda Nur sayyidina Muhammad SAW. Bukan lagi Tokoh Dunia yang mendunia akan tetapi Tokoh Semesta beserta isinya yang berhasil menggulung tikar kebhatilan dan menggelar tikar kemuliaan sebagai *rahmatan lil 'aalamiinn.*

Sahabat sekalian yang kami bangga-membanggakan. Buku ini adalah salah satu orientasi yang pernah digumamkan oleh pengurus PMII sebelumnya khususnya lingkup IAIN Bone, mungkin karena keterbatasan material sehingga menyebabkan ide tersebut terkungkung dan terbelenggu di jeruji kata (baca;teori). Tapi yakinlah satu hal, bahwa apa yang ditorehkan oleh pendahulu baik hanya sampai pada teori tanpa tindakan atau sebaliknya, tindakan tanpa teori (hilang arah) adalah bentuk kesetiaan, pengabdian, dasar aktualisasi Kader serta adanya etos kerja terhadap organisasi baik mereka yang berhasil merealisasikan sekalipun tidak, tapi menjadi tangga kepada generasi muda PMII untuk melanjutkan visi dan misi organisasi yang tuntas.

Buku ini merupakan formulasi materi-materi dasar yang setiap pengkaderannya PMII dipaparkan pada saat Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), sehingga tampak objektif dan konkrit disaat pasca pengkaderan untuk kembali Sahabat-sahabat mereview materi, bukan hanya bagi Sahabat-sahabat pasca dikader tapi berlaku umum, baik itu Pengurus Rayon, BANOM, KOPRI hingga Komisariat sekalipun. Materi ini merupakan tuntutan absolut bagi

seluruh Kader PMII yang menjadi pembeda identitas individu antara Kader PMII dan nonkader PMII.

Secara garis besar, ada kategori-kategori disiplin ilmu yang bakal saya susun, koreksi kritik, dan materi tambahan. Berangkat pada materi *1.) ke-PMII-an, 2.) ASWAJA, 3.) NDP, 4.) ke-KOPRI-an, 5.) Mahasiswa,tanggungjawab dan Antropologi Kampus, 6.) Sejarah Bangsa Indonesia, 7.) GENDER, serta 8.) Pengantar Logika dan Filsafat.* Namun, dari delapan poin diatas ada dua haluan besar yang saya bedakan dikarenakan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), *bab VI pasal 18.* PMII telah merumuskan kategori wajib materi dalam hal ini terdapat pada nomor 1-6, selebihnya, nomor 7 dan 8 ialah tambahan sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya dengar berdasar sesuai keadaan dan kebutuhan wawasan Kader-kader PMII.

Akhir sepintas kata dari saya, bahwa buku ini telah menjadi hukum fardlu ‘ain sebagai bacaan, pedoman kepada seluruh Kader terkhususnya Kader pasca MAPABA untuk mereview ulang materi yang difasilitasi oleh Pengurus Rayon selaku pelaksana MAPABA setiap tahunnya. Setelah buku ini dijilid dan diperbanyak, umumnya kami segenap Pengurus Komisariat masa khidmat 2019-2020 sangat diharapkannya dapat diamalkan sebaik-baiknya Ilmu dan khususnya Saya selaku Ketua I Komisariat membidangi kebutuhan Kaderisasi dengan penuh dan bulat harapan kepada seluruh Kader PMII untuk giat membaca, mendengarkan kajian, diskusi rutinitas karena pada akhirnya kian prosesnya di PMII termanifestasi menjadi Kader *mu’taqid* (ikat,mengikat) sesama Sahabat PMII.

Fathurrahman,

Bone, 2020

Materi 01:

Ke-PMII-an

A. MUKADDIMAH

PMII sebagai organisasi mahasiswa yang mayoritas anggotanya merupakan muslim berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* atau selaras dengan pemahaman keagamaan NU, mengalami perjalanan yang panjang dalam pembentukannya. Lahirnya PMII tidak berjalan dengan mulus, banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus dihadapinya. Keinginan mendirikan organisasi mahasiswa NU dari berbagai mahasiswa NU di Indonesia sangat kuat, akan tetapi PBNU tidak cepat-cepat memberikan lampu hijau.

Argumentasi dari PBNU adalah belum perlu adanya organisasi mahasiswa NU sebagai wadah dan aspirasi mahasiswa NU di berbagai perguruan tinggi, karena NU sudah memiliki organisasi bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). IPNU dirasa mampu untuk menjadi wadah bukan hanya untuk pelajar, tetapi juga untuk mahasiswa NU secara umum.

Akan tetapi, kemauan keras dan semangat yang tak mudah redup untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU terus bergelora, bahkan para mahasiswa NU semakin masif mensosialisasikannya ke berbagai kampus di Indonesia. Berkat kegigihan dan semangat yang kuat dari mahasiswa NU ini kemudian PBNU tidak bisa tidak memberikan lampu hijau untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU. Organisasi inilah yang kemudian memiliki nama PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Mari kita lihat secara komprehensif bagaimana latar sosio-historis perjalanan PMII.

B. SOSIO-HISTORIS KELAHIRAN PMII

1. Latar belakang pembentukan PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlusssunnah wal Jama'ah. ***Dibawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII:***

- Carut marutnya situasi politik bangsa indonesia dalam kurun waktu 1950-1959.
- Tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
- Pisahnya NU dari Masyumi.
- Tidak enjoynya lagi mahasiswa NU yang tergabung di HMI karena tidak terakomodasinya dan terpinggirkannya mahasiswa NU.
- Kedekatan HMI dengan salah satu parpol yang ada (Masyumi) yang nota bene HMI adalah underbouw-nya.

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat dikalangan intelektual-intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahsiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahsiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal Jama'ah.

2. Eksistensi Organisasi-organisasi pendahulu

Di Jakarta pada bulan Desember 1955, berdirilah Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang dipelopori oleh Wa'il Harits Sugianto.Sedangkan di Surakarta berdiri KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama) yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Namun keberadaan kedua organisasi mahasiswa tersebut tidak direstui bahkan ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dan PBNU dengan alasan IPNU baru saja berdiri dua tahun sebelumnya yakni tanggal 24 Februari 1954 di Semarang. IPNU punya kekhawatiran jika IMANU dan KMNU akan memperlemah eksistensi IPNU.

Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali pada Muktamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957). Gagasan ini pun kembali ditentang karena dianggap akan menjadi pesaing bagi IPNU. Sebagai langkah kompromis atas pertentangan tersebut, maka pada muktamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma'il Makki (Yogyakarta). Namun dalam perjalanannya antara IPNU dan Departemen PT-nya selalu terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program organisasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang diterapkan oleh mahasiswa dan dengan pelajar yang menjadi pimpinan pusat IPNU. Disamping itu para mahasiswa pun tidak bebas dalam melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PP IPNU.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari 'rahim' Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada 21 Syawal 1379 H atau 17 April 1960 M. Adapun IPNU adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Dari geneologi kelahiran PMII ini saya menyebut PMII sebagai 'cucu' dari NU, karna cikal bakal lahirnya

PMII adalah dari IPNU itu sendiri, yang mana IPNU merupakan ‘anak kandung’ atau organisasi yang lahir dari ‘rahim’ NU.

Ide lahirnya PMII ini berawal dari keinginan dan hasrat yang kuat di kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah dan aktivitas mahasiswa NU di Perguruan Tinggi Islam maupun umum. Hal ini wajar, mengingat realitas politik pada dasawarsa 50-an banyak lahir organisasi mahasiswa di bawah underbouw partai politik ataupun organisasi sosial keagamaan. Misalkan SEMMI (dengan PSII), KMI (dengan PERTI), IMM (dengan Muhammadiyah), dan HMI (dekat dengan Masyumi)1. Akan tetapi, karena pada konteks itu telah ada IPNU yang mana sebagian besar pengurusnya adalah mahasiswa NU, maka IPNU tidak hanya menjadi wadah pelajar NU, melainkan juga menjadi wadah bagi mahasiswa NU.

Meskipun pada tahun 1955 mahasiswa NU di Jakarta sempat mendirikan organisasi bernama Ikatan Mahasiswa NU (IMANU), di Bandung berdiri Persatuan Mahasiswa NU (PMNU) dan di Surakarta berdiri Keluarga Mahasiswa NU (KMNU), namun organisasi ini tak berdiri lama, karna PBNU tidak cepat-cepat memberikan restu. Bisa dipahami, saat itu IPNU baru saja lahir pada tahun 1954, sementara pengurus IPNU juga banyak yang berstatus mahasiswa. Bisa dibayangkan Jika mendirikan organisasi mahasiswa NU baru akan susah untuk mengelola dan mengurus kedua organisasi yang berada di bawah naungan NU, maka dari ini dikhawatirkan IPNU tidak ada yang mengurusi.

Semangat untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah mahasiswa NU terus berlanjut di muktamar II IPNU pada 1957 di Pekalongan. Namun, lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang serius, dengan dalih bahwa IPNU yang pada saat itu masih baru terbentuk memerlukan pembenahan dan konsolidasi yang matang. Dalam perjalannya, berkat kegigihan dan perjuangan mahasiswa NU ini

memperoleh solusi pada muktamar III IPNU pada 27-31 Desember 1958 di Cirebon dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi2. Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini yang akhirnya menjadi wadah dan aspirasi mahasiswa NU.

Sayangnya, Departemen Perguruan Tinggi IPNU ternyata tidak bisa meredam keinginan mahasiswa NU untuk memisahkan diri, karena IPNU tidak bisa menampung aspirasi mahasiswa. Hal ini karena beberapa alasan, pertama, kondisi obyektif menunjukkan bahwa keinginan, dinamika dan gerakan mahasiswa berbeda dengan keinginan para pelajar. Kedua, dengan hanya membentuk departemen dalam IPNU, mahasiswa NU tidak bisa masuk sebagai anggota Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), sebab PPMI hanya bisa menampung ormas mahasiswa.

Ketiga, kondisi sosial-politik bangsa Indonesia mendesak agar NU mempunyai organisasi mahasiswa sebagai wadah pengkaderan intelektual maupun kepemimpinan NU. Hal ini tak lain karena NU pada konteks itu adalah sebagai pemenang ketiga dalam pemilu 1955, pada saat sama, satu-satunya wadah mahasiswa Islam hanyalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI sendiri terlalu dekat dengan masyumi yang secara politik sudah berseberangan dengan NU. Ditambah lagi Masyumi yang bermasalah dan terlibat dalam pemberontakan PRRI.

Perjuangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa di bawah naungan NU mencapai puncaknya ketika IPNU mengadakan Konferensi Besar (Konbes) pada 14-17 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta. Isma’il Makky (Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU) dan Moh. Hartono, BA (Mantan wakil pemimpin usaha harian Pelita Jakarta) menjadi wakil mahasiswa yang berbicara di depan peserta Konbes, yang kemudian mereka pertegas keinginan

mahasiswa untuk mendirikan organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa NU. Kesimpulan dari konbes tersebut menghasilkan keputusan perlunya mendirikan suatu organisasi mahasiswa NU.

3. Konferensi Besar IPNU

Oleh karena itu gagasan legalisasi organisasi mahasiswa NU senantisa muncul dan mencapai puncaknya pada konferensi besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang pada tanggal 14-17 Maret 1960. Dari forum ini kemudian kemudian muncul keputusan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Selain merumuskan pendirian organ mahasiswa, KONBES Kaliurang juga menghasilkan keputusan penunjukan tim perumus pendirian organisasi yang terdiri dari 13 tokoh mahasiswa NU. Mereka adalah:

- Khalid Mawardi (Jakarta)
- M. Said Budairy (Jakarta)
- M. Sobich Ubaid (Jakarta)
- Makmun Syukri (Bandung)
- Hilman (Bandung)
- Ismail Makki (Yogyakarta)
- Munsif Nakhrowi (Yogyakarta)
- Nuril Huda Suaidi (Surakarta)
- Laily Mansyur (Surakarta)
- Abd. Wahhab Jaelani (Semarang)
- Hizbulloh Huda (Surabaya)
- M. Kholid Narbuko (Malang)
- Ahmad Hussein (Makassar)

Keputusan lainnya adalah tiga mahasiswa yaitu Hizbulloh Huda, M. Said Budairy, dan Makmun Syukri untuk sowan ke Ketua Umum PBNU kala itu, KH. Idham Kholid

Sebelum musyawarah dilaksanakan, tim panitia yang diwakili oleh **tiga orang, yakni Hisbullah Huda, M. Said Budairy dan Makmun Sukri BA** menghadap kepada Ketua Umum PBNU, KH. Dr. Idham Khalid untuk meminta do'a restu dan persetujuan ihwal pembentukan organisasi mahasiswa NU tersebut. Dalam nasehatnya, KH. Idham Khalid menyarankan agar organisasi yang akan dibentuk benar-benar dapat diandalkan sebagai kader NU dengan argumen ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa harus diamalkan bagi kepentingan rakyat. Bukan ilmu untuk ilmu. Setelah memberi nasehat, Ketua Umum PBNU merestui dilaksanakannya musyawarah mahasiswa tersebut.

Selanjutnya, pada 14-16 April 1960 diselenggarakan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia bertempat di sekolah Mu'alimat NU Wonokromo Surabaya untuk membahas tentang peresmian organisasi sesuai keputusan konbes IPNU di Kaliurang sebulan sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut sempat muncul perdebatan tentang nama organisasi yang akan dibentuk. Dari proses perdebatan itu muncul beberapa nama yang diusukan oleh peserta musyawarah antara lain :

1. Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU), diusulkan oleh delegasi dari Jakarta

2. Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni yang diusulkan oleh delegasi dari Yogyakarta

3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diusulkan oleh delegasi Bandung, Surabaya dan Surakarta.

Dari ketiga usulan tersebut akhirnya yang disetujui adalah nama PMII. Dalam hal ini peserta sebenarnya menyadari bahwa organisasi ini adalah organisasi kader partai NU, akan tetapi semua menghendaki agar nama NU tidak dicantumkan. Hanya saja mereka sepakat agar organisasi ini tidak terlepas dari makna filosofis "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia" dengan rumusan pemikiran sebagai berikut :

1. Mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada saat itu situasi politik nasional diliputi oleh semangat revolusi.

2. Menampakkan identitas ke-Islaman sekaligus sebagai kelanjutan dari konsepsi NU yang berhaluan paham Ahlussunnah wal Jamaah, juga berdasarkan perjuangan para wali di pulau Jawa yang telah sukses melaksanakan dakwahnya penuh toleransi dengan mengakulturasi budaya setempat. Mahasiswa NU diharapkan bisa mengkaji budaya untuk bisa dimanfaatkan mana yang bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, sehingga dengan begitu nilai-nilai ajarannya bersifat akomodatif.

3. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, oleh karena itu nama Indonesia harus tetap tercantum6.

Dari hasil keputusan perihal penamaan PMII ini, setidaknya ada empat hal yang menarik untuk dibahas. Pertama, istilah "Pergerakan", pada mulanya huruf "P" dalam PMII mempunyai tiga alternatif kepanjangan, yaitu pergerakan, perhimpunan, dan persatuan. Akhirnya yang dipilih adalah pergerakan (Movement/alharakah) dengan argumentasi sifat mahasiswa yang selalu dinamis dan aktif, perubahan, mempunyai sifat bergerak secara aktif.

Kedua, mahasiswa. PMII mengartikan mahasiswa sebagai generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas

diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terdapat tanggung jawab keagamaan, intelektual sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab individual sebagai hamba Tuhan maupun kader bangsa dan negara. Mahasiswa dianganankan memuat kandungan-kandungan, nilai-nilai intelektualitas, idealitas, komitmen dan konsistensi.

Ketiga, Islam. Islam yang dipahami PMII merupakan Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai corak basis keagamaan yang ditempuh selama menimba ilmu-ilmu agama di pesantren. Di samping itu, corak keberislaman ini selaras dengan apa yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap pemikiran dan sikapnya. Sebuah pemahaman Islam yang mengakulturasi budaya masyarakat setempat dengan ajaran-ajaran keislaman.

Keempat, nasionalisme dan nama Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan nama Indonesia sebagaimana terdapat dalam prinsip pemikiran poin ketiga, menunjukkan bahwa sejak awal kelahirannya, PMII sudah memberi komitmen yang kuat bagi rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan Indonesia ini juga sebagai sikap terhadap organisasi mahasiswa Islam yang lebih dulu ada yakni HMI yang tidak menegaskan nama Indonesia di dalamnya.

Musyawarah mahasiswa NU itu juga memutuskan tiga orang formatur yang diberi tugas menyusun kepengurusan. Mereka antara lain adalah Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, A. Chalid Mawardi sebagai ketua satu dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Di samping itu forum berhasil menetapkan peraturan dasar PMII yang berlaku mulai 17 April 1960. Selanjutnya tanggal inilah yang dinyatakan sebagai hari lahirnya PMII secara resmi.

Dari sini sudah jelas bahwa ide dasar pendirian PMII murni berawal dari inisiatif pemuda NU. Pilihan untuk bernaung di bawah panji NU bukanlah sekedar pertimbangan praktis, bukan pula karena kondisi saat itu dependen atau menjadi organisasi underbouw merupakan kemutlakan, tetapi jauh dari itu keterikatan PMII-NU telah terbentuk dan sengaja dibangun atas dasar kesamaan nilai, kultur, akidah, pola pikir, bertindak, berperilaku dan cita-cita yang sama. Meskipun pada selanjutnya PMII harus memilih independen sebagai sebuah prinsip kedewasaan dan kedinamisan organisasi, akan tetapi tidak serta merta bisa dipisahkan dengan NU, hal ini karena kesamaan visi dan cita-cita sebagaimana disebut. Adapun perihal independensi PMII ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

C. BERPENGARUH DI "USIA MUDA"

Organisasi mahasiswa yang baru terbentuk ini mulai menunjukkan gerakan-gerakan politik maupun sosial yang sangat cepat dan berpengaruh. Dalam usianya yang tergolong muda, PMII telah aktif terlibat dalam dunia kemahasiswaan dan kepemudaan baik di kancah nasional maupun internasioanal. Hal ini bisa dibuktikan dengan masifnya gerakan-gerakan PMII, seperti Said Budairi selaku Sekretaris Umum (PMII) pada September 1960 mewakili PMII dalam konferensi pembentukan panitia internasional forum pemuda sedunia di Moskow (Contituente Metting for the Youth Forum). Sepulang dari Moskow, ia singgah di Mesir untuk konsolidasi dengan mahasiswa NU yang berada di luar negeri.

Begitu juga dengan Chalid Mawardi selaku Ketua I PB PMII yang pada Juni 1961 berangkat ke Moskow mengahadiri forum pemuda sedunia. Hal ini membuktikan bahwa PMII bukanlah organisasi sempalan dari organisasi mahasiswa yang terlebih dahulu ada, tetapi merupakan proses lanjut dari gerakan mahasiswa Nahdliyin yang mana sebelumnya tergabung dalam Departemen Perguruan Tinggi IPNU.

Tidak hanya itu, gerakan PMII pada sekitar tahun 1966 sangat berpengaruh. Gerakan ini dimainkan oleh PMII yang memimpin gerakan-gerakan mahasiswa Indonesia. Ketika itu Zamroni sebagai ketua PB PMII dipercaya memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melalui pertemuan yang diprakarsai oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Sjarief Thajeb. Organisasi yang tergabung dalam KAMI adalah PMII, PMKRI, GMNI, dan Mapancas.

Zamroni sebagai kader PMII sangat lincah dan sigap memimpin KAMI. Terutama dalam memimpin demonstrasi mahasiswa. Pengorbanan Zamroni sampai pada konsekuensi nyata bahwa sebagai pemimpin gerakan mahasiswa, harus merelakan jemari tangannya terpotong hingga tersisa dua buah. Ini sekaligus menjadi bukti begitu besarnya pengorbanan Zamroni yang jugaa kader PMII dalam membela dan menggerakkan idealisme mahasiswa.

Tak hanya itu, inspirasi KAMI terhadap gerakan mahasiswa mampu memberi motivasi pada komunitas gerakan mahasiswa baru sebagai lambang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Maka muncullah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Gerakan ini menjadi kebanggaan dan rasa solidaritas yang tinggi dari kalangan organisasi mahasiswa lain. PMII juga telah membuktikan bahwa mampu mengambil andil yang besar dalam menginisiasi sikap mahasiswa. Meminjam Mahbub Junaidi, bahwa tangan PMII lah yang mengayunkan garis-garis besar dan pokokpokok statemen pembubaran PKI, apa yang terjadi setelah itu kita semua sudah tahu, likuidasi secara total dilakukan seutuhnya oleh masa rakyat yang cinta kepada Pancasila.

Kebijakan serta garis-garis yang ditentukan oleh PB PMII ketika itu, agar kader PMII harus memimpin KAMI sangat tepat. Bahwa PMII harus ikut dan memimpin KAMI mulai pusat sampai daerah. Kebijakan ini telah dibuktikan dengan cepat dan luas oleh PMII. Zamroni telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan baik pada KAMI. Itu berarti juga kepemimpinan oleh PMII.

Gerakan lain dari PMII adalah ketika sahabat Zamroni bersama 34 orang pemuda Indonesia berhasil mencetuskan deklarasi pemuda, sehingga lahirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), kemudian KNPI berhasil masuk ke dalam GBHN pada sidang umum MPR 1978. Dan sampai hari ini KNPI menjadi organisasi pemuda paling berpengaruh di Indonesia.

Begitu juga pada tahun 1974 PMII bergabung ke dalam kelompok Cipayung. Kelompok yang berkomitmen untuk terus mempertahankan idealisme sebagai organisasi mahasiswa. Di situlah tempat sejumlah organisasi ekstra-universitas dengan berbagai latar sosial, ideologi dan agama mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan.

Kelompok Cipayung ini terdiri dari berbagai kelompok organisasi mahasiswa, antara lain PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI. Kehadiran kelompok Cipayung ini sangat berharga bagi kalangan aktivis mahasiswa. Karna pada saat itu gerakan mahasiswa terus dibatasi ruang geraknya oleh kebijakan pemerintah yang otoriter. Bahkan sampai hari ini, para alumnus kelompok Cipayung bisa kita temukan di sektor-sektor pemerintahan, dosen, LSM, dan pengabdian masyarakat.

Gerakan lain PMII adalah solidaritas. Hal itu tercermin pada pembelaan PMII terhadap HMI yang terancam dibubarkan oleh presiden Soekarno. Ketika HMI yang dianggap berafiliasi dengan Masyumi mendapatkan cobaan dan

terancam dibubarkan, PMII menggerakkan dan memimpin kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa Islam untuk melakukan solidaritas dan pembelaan.

Pembelaan PMII bersama GP Ansor pada 19-26 Desember 1964, menyelenggarakan musyawarah di kalangan pelajar dan mahasiswa Islam. Musyawarah ini menghimpun organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan pemuda Islam. Kemudian melahirkan organisasi federasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang dikenal dengan nama GEMUIS (Generasi Muda Islam).

Salah satu hasil musyawarah itu adalah usaha yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI yang sedang mengalami cobaan berat. Dari sinilah GEMUIS menghasilkan dua keputusan penting tentang usaha pembelaan terhadap HMI dengan pernyataan; pertama, HMI bukanlah *underbow* dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai atau organisasi manapun. Kedua, masalah yang dihadapi HMI tidak dapat dipisahkan dari masalah keseluruhan umat Islam.

D. SELAYANG PANDANG INDEPENDENSI PMII

Perjalanan PMII berikutnya menuntut pada kondisi sosial yang sangat dinamis. Kepekaan dan kepandaian membaca konteks sosial politik Orde Baru, membuat PMII sibuk untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam membangun gerakannya. PMII sangat peka pasca Jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai Presiden RI sekaligus penguasa Orde Baru membawa kepada perubahan politik dan pemerintahan yang sangat signifikan. Pemerintahan Orde Baru berhasrat untuk mengurangi kekuatan partai-partai yang berbau ideologi dengan cara mendirikan partai tersendiri sebagai kekuatan penopang bagi kekuasaannya, yakni Golongan Karya (Golkar).

Rezim Orde Baru juga melakukan penyederhanaan Partai. Penyederhanaan dilakukan dengan cara pengelompokan (regrouping) dari sepuluh kontestan

pemilu menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari (PKI, PNI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik). Kelompok kedua adalah kelompok keagamaan yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari (NU, Parmusi, PSII dan Perti). Dan kelompok ketiga adalah kelompok karya yang diwakili oleh Partai Golkar (Golkar). Dari ketiga partai tersebut, Golkar identik dengan partai penguasa, lewat Golkarlah upaya politik Soeharto mempertahankan kekuasaannya. Sementara partai-partai lain hanyalah figuran demokrasi yang juga dikendalikan oleh Soeharto.

Kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut membuat sebuah kekuasaan yang tidak bisa dijamah apalagi dikritisi oleh masyarakat. Bentuk hegemoni pemerintah ini mengakibatkan masyarakat umum dan mahasiswa memiliki ruang gerak yang sempit untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah. Keadaan ini tidak membuat sikap kritis warga PMII berkurang. Terhadap hal ini PMII mensosialisasikan kepada masyarakat umum dan mahasiswa beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis dan analitis dalam menghadapi persolalan masyarakat dan secara tajam memiliki kepekaan dalam melihat dimensi di belakang munculnya realitas di masyarakat seperti nilai, kepentingan dan kekuasaan.

2. Mahasiswa perlu meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosialnya, yakni kesadaran tentang siapakah yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan Orde Baru.

3. Kekecewaan-kekecewaan yang dialami oleh para aktivis yang mana dulu memimpikan hasil yang sukses dan konkret di dalam memperjuangkan TRITURA, tapi kenyataannya hasil perjuangan itu semakin lama semakin menipis di bawah kekuasaan Orde Baru.

Keadaan tersebut mengharuskan PMII untuk peka dan pandai membaca realita politik yang mengerdilkan setiap komponen masyarakat termasuk partai politik selain Golkar. Dari hasil pembacaan itu, PMII berpandangan bahwa jika tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

Atas dasar pertimbangan ini diadakanlah Musyawarah Besar (Mubes) pada 14 Juli 1972 di Munarjati, Malang. Dari Mubes tersebut, PMII memutuskan untuk independen yang tertuang dalam Deklarasi Munarjati8. Independensi berarti sikap kemandirian, mandiri dalam gerak pemikiran maupun dalam gerak operasional organisasi. Dengan independensi ini berarti PMII sudah tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila. Berikut ini isi Deklarasi Munarjati :

DEKLARASI MUNARJATI

Bismillahirrahmanirrahim

"Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar".

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera sekaligus penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insaninsan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan. Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan jiwa Deklarasi Tawangmangu menurut perkembangannya merupakan sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa bertanggungjawab. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memohon rahmat Allah SWT, dengan ini menyatakan diri sebagai Organisasi "Independen" yang tidak terkait tindakannya kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Tim Perumus Deklarasi Munarjati.

1. Umar Basalim (Jakarta) 2. Madjidi Syah (Bandung) 3. Slamet Efendi Yusuf (Yogyakarta) 4. Man Muhammad Iskandar (Bandung) 5. Choirunnisa Yafzham (Medan) 6. Tatik Farichah (Surabaya) 7. Rahman Idrus 8. Muis Kabri (Malang)

Musyawarah Besar PMII Ke-2 Munarjati Malang Jawa Timur tanggal 14 Juli 1972

Banyak asumsi-asumsi dari berbagai kalangan ihwal independensi PMII ini, dimulai dari aspek politis, idealis dan filosofis. Intinya ada tiga poin asumsi perihal motivasi PMII mengambil sikap independen yang bisa dirumuskan ke dalam beberapa argumentasi berikut. Pertama, adalah kedewasaan. Melihat realita politik saat itu, PMII dituntut untuk dewasa, mempertahankan idealisme dan moral mahasiswa agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis. Jika tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

Kedua, suatu sikap dari manifestasi rasa kejengkelan PMII terhadap NU karna kader-kader PMII yang berkualifikasi bagus tidak pernah diberi kesempatan untuk duduk di legislatif maupun eksekutif. Padahal, NU yang ketika itu sebagai partai politik seharusnya memperhatikan keluhan PMII. Singkatnya, independensi hanya persolan pembagian kursi.

Ketiga, adalah sebuah taktik. Kondisi politik pasca Orde lama sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Sudah banyak bukti penyokong Orde Baru dibalik menjadi 'buronan politik', maka independensi merupakan jalan satu-satunya untuk mencari selamat. Jika benar NU dibubarkan berbarengan dengan sistem penyederhanaan partai, PMII masih tetap hidup. Sebab, bukan lagi bagian dari NU. Singkatnya ini berarti independensi bermotif politik.

Dari ketiga asumsi tersebut, motivasi pada poin kedua dan ketiga itu jelas kurang pas jika dihadapkan pada hakekat PMII sebagai organisasi mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme mahasiswa. Karena itu, motif pertama sebagai proses pendewasaan yang kemudian membawa PMII dan NU pada persamaan ideologi, kultur, tradisi, akidah, dan nilai-nilai yang kemudian Chalid Mawardi menyebutnya dengan istilah Interdependensi adalah alasan yang paling rasional. Berikut ini manifestasi independensi PMII :

MANIFEST INDEPENDEN PMII

Bismillahirrahmanirrahim

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera, selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan. Bahwa Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Bahwa pada dasarnya pengisian kemerdekaan adalah didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan sosialisasi ilmu ke sikap kultural guna mengangkat martabat dan derajat bangsa. Bahwa pada hakekatnya "independensi" sebagaimana telah dideklarasikan di MUNARJATI adalah merupakan manifestasi keadaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berpikir dan pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Bahwa "independensi" Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dimaksudkan dalam mendinamiskan dan mengembangkan potensi kultural yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam untuk terbentuknya pribadi luhur dan bertaqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta bertanggungjawab dalam perjuangan nasional berdasarkan Pancasila. Bahwa dengan "independensi" Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tersedia adanya kemungkinan-

kemungkinan alternatif yang lebih lengkap lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berlandaskan Islam dan berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kongres V PMII Ciloto Jawa Barat Tanggal 28 Desember 1973

Keputusan independen PMII ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan, terutama dari kalangan kader NU sendiri. Respon para Kyai, dan tokoh NU bermacam-macam dengan berbagai argumentasi masing-masing. Ada yang pro ada yang kontra. Yang pro misalkan seperti Said Budairy yang beranggapan bahwa independensi PMII harus dimaklumi, sebab dengan keadaan politik saat itu PMII ingin tetap eksis dan berkiprah di dunia kepemudaan dan kemahasiswaan, karena lepas dari organisasi induknya. Yang kontra misalkan, Chalid Mawardi melihat NU dalam perspektif sebagai kekuatan politik. Dengan memisahnya PMII dari NU berarti pengkaderan dalam tubuh NU akan terputus. Padahal NU membutuhkan kader-kader politik di masa depan. Reaksi lain juga muncul dari para Kyai, bahwa dengan memisahnya PMII dan NU, maka NU tidak lagi bisa mengontrol PMII. Sehingga nantinya dikhawatirkan di PMII akan berkumpul antara putra dan putri, padahal tradisi pesantren selalu memisahkan antara putra dan putri.

E. INTERDEPENDENSI PMII-NU

Kurang lebih 12 tahun lamanya PMII menjadi *underbouw* NU, berkhidmat dalam politik praktis hingga sampai pada akhirnya menyatakan independen. Akan tetapi, antara PMII dan NU memiliki persamaan-persamaan dalam paham keagamaan dan perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan serta ikatan historis. Di samping itu antara PMII dan NU juga memiliki keterkaitan atas dasar kesamaan nilai, cita-cita, kultur, tradisi, ideologi maupun akidah. Poinnya, bahwa

sikap PMII untuk independen ternyata tidak sepenuhnya memisahkan ormas mahasiswa ini dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Independensi ditafsirkan sebagai interdependensi sebagaimana istilah yang ditawarkan Chalid Mawardi9. Interdependensi PMII-NU merupakan suatu sikap yang tidak saling mengintervensi secara struktural dan kelembagaan, tetapi memiliki visi dan tujuan yang sama. Suatu sikap ini menjadi unik bagi PMII, karna bisa jadi merupakan satu-satunya ormas mahasiswa yang mempunyai istilah Interdependen.

Oleh karena itu, untuk melahirkan keraguan dan saling curiga maka hubungan itu harus dijalin kembali. Bukan hubungan hierarki struktural, melainkan hubungan kesamaan tujuan dan citacita dengan mengedepankan kedaulatan organisasi penuh. Deklarasi interdependensi PMII-NU kemudian dicetuskan dalam Kongres X PMII pada tanggal 27 Oktober 1991 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.10 Berikut ini Deklarasi Interdependensi PMII-NU :

DEKLARASI INTERDEPENDENSI PMII-NU

Bismillahirrahmanirrahim

1. *Sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari pergumulan mahasiswa yang bernaung di bawah kebesaran NU, dan sejarah juga telah membuktikan bahwa PMII telah menyatakan independensinya melalui Deklarasi Munarjati tahun 1972.*
2. *Kerangka berpikir, perwatakan dan sikap sosial antara PMII dan NU mempunyai persamaan karena dibungkus pemahaman Islam ala Ahlussunah wal Jama'ah.*
3. *PMII insaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong menolong "ta'awanu 'ala-l-birri wattaqwa", ukhuwah Islamiyah (Izzul Islam wal muslimin) serta harus mencerminkan "mabadi khoiru*

ummah" (prinsip-prinsip umat yang baik), karena itulah PMII siap melakukan kerjasama.

4. *PMII insaf dan sadar bahwa arena dan lahan perjuangannya adalah sangat banyak dan bervariasi sesuai dengan nuansa usia, zaman, dan bidang garapannya.*

Karena antara PMII dan NU mempunyai persamaan-persamaan di dalam persepsi keagamaan dari perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan, ikatan historis, maka untuk menghilangkan keragu-raguan, ketidakmenentuan serta rasa saling curiga, dan sebaliknya untuk menjalin kerja sama program secara kualitatif dan fungsional, baik secara program nyata maupun penyiapan sumber daya manusia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan NU atas dasar prinsip kedaulatan organisasi penuh, INTERDEPENDENSI, dan tidak ada intervensi secara struktural-kelembagaan, serta prinsip mengembangkan masa depan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia.

Kongres X PB PMII Pondok Gede Jakarta, Tanggal 27 Oktober 1991

Untuk mempertegas Deklarasi Interdependensi PMII-NU ini, maka PMII melalui Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) PB PMII tanggal 24 Desember 1991 di Cimacan, Jawa Barat, merumuskan implementasi interdependensi PMII-NU. Pemikiran tersebut atas dasar sebagai berikut.

Pertama, bahwa dalam pandangan PMII ulama sebagai pewaris para Nabi merupakan panutan karena kedalaman ilmu keagamaannya. Interdependensi ditempatkan pada konteks keteladanan ulama dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, adanya ikatan historis yang mempertemukan PMII dan NU. Fakta sejarah menyatakan bahwa cikal bakal kelahiran PMII dan perkembangannya tidak lepas dari peran NU, demikian juga latar belakang sebagian besar warga PMII merupakan warga NU, sehingga memengaruhi cara pikir dan bertindak warga PMII. Adapun pilihan independen PMII tidak dipahami sebagai upaya mengurangi apalagi menghapus makna kesejarahan PMII-NU.

Ketiga, adanya persamaan paham keagamaan antara PMII dan NU. Keduanya sama-sama mengembangkan suatu paham wawasan keislaman Ahlussunnah wal Jama'ah. Implementasi paham Aswaja tersebut tampak juga antar keduanya pada persamaan sikap sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip tawasut, i'tidal, tasamuh dan tawazun. Demikian juga pola pikir dan sikap selektif, akomodatif, integratif sesuai prinsip Al-Muhafadzatu ala-l-Qadimi-l-shalih wa-l-Ahdu bi-l-Jadidi-l-Ashlah.

Keempat, adanya persamaan kebangsaan. Bagi PMII keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap orang muslim Indonesia. Atas dasar tersebut, maka merupakan keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dan kemampuan baik secara individu maupun kelompok.

Kelima, adanya kesamaan kelompok sasaran. PMII dan NU memiliki mayoritas anggota dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Di samping itu, berangkat dari kalangan pedesaan dan basis pendidikan pesantren. Kesamaan lahan perjuangan ini kemudian melahirkan format perjuangan yang relatif sama.

F. BASIS INTELEKTUAL

PMII sebagai ormas mahasiswa yang berbasis kultural pesantren ternyata tidak hanya mengembangkan pemikirannya pada basis keagamaan semata, akan tetapi PMII mampu membangun dan mewujudkan perangkat basis intelektual di kalangan mahasiswa. Para aktivis PMII berupaya terus menempa diri dan mengasah kepekaan intelektualitasnya.

PMII mencurahkan perhatiannya pada diskursus-diskursus penting sekitar liberasi, toleransi, demokrasi, pluralisme, civil society, dan membongkar terhadap ideologi dan doktrin teologi yang membuat masyarakat bisu untuk meminta hak hidup dan berfikir. Maka tak heran jika dalam kajian-kajian ilmiah PMII seringkali ditemukan term-term perihal pemikian wacana Open Society-nya Karl Popper, sosialismenya Karl Marx, masyarakat komunikatifnya Habermas dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini sering dijadikan sebagai acuan diskusi di forum-forum PMII.

Di bidang keislaman, PMII sangat gelisah dengan kelompok Islam yang memakasakan panji dan simbol keislaman pada wilayah kebangsaan dan kekuasaan negara. Mereka kalangan Islamis yang menjadikan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Yusuf al-Qordlowi sebagai landasan utama keagamaan, diimbangi dengan pemikiran-pemikiran liberasi penuh pembebasan Muhammad Arkoun, al-Jabiri, Muhammad Thoha, dan Samir Amin.

Dengan landasan intelektual itu, maka tak heran jika pada tahun 1990-an PMII mampu melahirkan Lembaga Kajian Islam dan Intelektual (LKiS). Pada awalnya kelompok ini secara intensif menjadikan dirinya sebagai tempat menempa diri dan mengasah kepekaan sosial dan intelektual. Dalam perkembangan selanjutnya LKiS mampu menjadi arus utama gerakan intelektual

generasi muda NU melalui program-program kajian, penelitian, penerbitan serta pendidikan.

Dari semua proses intelektualitas PMII itu, maka dapat dijelaskan itulah mengapa mereka banyak berkiprah di dunia pendidikan, pesantren, universitas, LSM, pers, penerbitan, advokasi, gerakan sosial dan keagamaan. PMII membuktikan bahwa ia adalah sentral dan simpul jaringan intelektual di internal kalangan intelektual muda Islam Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa PMII sangat sadar bahwa setiap gerakan organisasi harus dilandasi dengan modal intelektual yang kemudian akan melahirkan pengembangan dan pengabdian masyarakat yang konkrit.

G. ARTI DAN MAKNA FILOSOFIS LAMBANG PMII

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dimnamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

“Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45.

- **Arti Lambang dan Bendera PMII**

1. LAMBANG PMII

Pencipta lambang PMII : H. Said Budairi

Makna lambang PMII

- **Bentuk :**

a. Perisai berarti ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar.

b. Bintang adalah perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar.

c. 5 (lima) bintang sebelah atas melambangkan Rasulullah dengan empat sahabat terkemuka (khulafaurrasyidin).

d. 4 (empat) bintang sebelah bawah menggambarkan empat mazhab yang berhadluan Ahlussunah Wal Jama’ah.

e. 9 (sembilan) bintang secara keseluruhan dapat berarti :

1. Rasulullah dengan empat orang sahabatnya serta empat orang imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan yang tinggi dan penerang umat manusia.

2. Sembilan bintang juga menggambarkan sembilan orang pemuka penyebar agama islam di Indonesia yang disebut dengan Wali Songo

- **Warna:**

a. Biru, sebagaimana tulisan PMII, berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan harus digali oleh warga pergerakan, biru juga menggambarkan lautan Indonesia dan merupakan kesatuan Wawasan Nusantara

b. Biru muda, sebagaimana dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan taqwa.

c. Kuning, sebagaimana perisai sebelah atas berarti identitas mahasiswa yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan

- **Penggunaan:**

a. Lambang PMII digunakan pada papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge, jaket, kartu anggota, dan benda atau tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi.

b. Ukuran lambang PMII disesuaikan dengan wadah penggunaanya.

H. Pengurus PB PMII dari masa ke masa

1. Mahbub Junaidi (Periode 1960–1967)
2. Muhammad Zamroni (Periode 1967-1973)
3. Abduh Paddare (Periode 1973-1977)
4. Ahmad Bagja (Periode 1977-1981)
5. Muhyiddin Arubusman (Periode 1981-1984)
6. Suryadharma Ali (Periode 1985-1988)

7. Muhammad Iqbal Assegaf (Periode 1988-1991)
8. Ali Masykur Musa (Periode 1991-1994)
9. Muhaimin Iskandar (Periode 1994-1997)
10. Syaiful Bahri Anshori (Periode 1997-2000)
11. Nusron Wahid (Periode 2000-2003)
12. A Malik Haramain (Periode 2003-2005)
13. Herry Azzumi (Periode 2005-2008)
14. Muhammad Rodli Kaelani (2008-2011)
15. Addin Jauharuddin (2011-2014)
16. Aminuddin Ma'ruf (2014-2017)
17. Agus Herlambang (2017-2019)

I. Trilogi PMII:

Tri Motto: Dzikir Fikir Amal Sholeh

Tri Khidmat: Taqwa Intelektual Profesional

Tri Komitmen: Kebenaran Kejujuran Keadilan.

J. Eka Citra PMII:

Ulul Al-Bab: Manusia yang senantiasa menggunakal akal (berfikir).

K. PARADIGMA PMII:

1. PENGERTIAN

Paradigma merupakan cara pandang yang mendasar dari seorang ilmuan. Paradigma tidak hanya membicarakan apa yang harus dipandang, tetapi juga memberikan inspirasi, imajinasi terhadap apa yang harus dilakukan, sehingga membuat perbedaan antara ilmuan satu dengan yang lainnya.

Paradigma merupakan konstelasi teologi, teori, pertanyaan, pendekatan, dan prosedur yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan konsepsi dalam menafsirkan realitas sosial.

Paradigma merupakan konstalasi dari unsur-unsur yang bersifat metafisik, sistem kepercayaan, filsafat, teori, maupun sosiologi dalam kesatuan kesepakatan tertentu untuk mengakui keberadaan sesuatu yang baru.

Paradigma adalah model atau sebuah pegangan untuk memandu mencapai tujuan. Paradigma, juga merupakan pegangan bersama yaang dipakai dalam berdialog dengaan realitas. Paradigma dapat juga disebut sebagai prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan acuan dalam segenap pluralitas strategi sesuai lokalitas masalah dan medan juang.

2. PERAN PARADIGMA

Dengan paradigma pergerakan, diharapkan tidak terjadi dikotomi modal gerakan di dalam PMII, seperti perdebatan yang tidak pernah selesai antara model gerakan “jalanan” dan gerakan “pemikiran “.

Gerakan jalanan lebih menekankan pada praksis dengan asumsi percepatan transformasi sosial. Sedangkan model gerakan pemikiran bergerak melalui eksplorasi teoritik, kajian-kajian, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah yang

lainnya, termasuk penawaran suatu konsep kepada pihak-pihak yang memegang kebijakan, baik ekskutif, legislatif, maupun yudikatif.

Perbedaan antara kedua model tersebut tidak hanya terlihat dalam praksis gerakan, tetapi yang berimplikasi pada objek dan lahan garapan. Apa yang dianggap penting dan perlu oleh gerakan jalanan belum tentu dianggap penting dan perlu oleh gerakan pemikiran dan begitu sebalikmya, walaupun pada dasarnya kedua model tersebut merupakan satu kesatuan.

Dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa selalu diwarnai perdebatan model jalanan dengan intelektual-intelektual. Begitu juga sejarah gerakan PMII selalu diwarnai dengan "pertentangan" yang termanifestasikan dalam gerakan politik-struktural dengan gerakan intelektual-struktural dengan gerakan intelektual-kultural.

Semestinya kedua kekuatan model tersebut tidak perlu dipertentangkan sehingga memperlemah gerakan PMII itu sendiri. Upaya untuk mencari prinsip dasar yang menjadi acuan segenap model gerakan, menjadi sangat penting untuk dirumuskan. Sehingga pluralitas setinggi apapun dalam model dan strategi gerakan, tidak menjadi masalah, dan bahkan secara sinergis bisa saling menguatkan dan mendukung.

Letak paradigma adalah dalam menjaga pertanggungjawaban setiap pendekatan yang dilakukan sesuai dengan lokalitas dan kecenderungan masing-masing.

3. PENERAPAN

Sepanjang sejarah PMII dari Tahun 80an hingga 2010, ada 3 (tiga) Paradigma yang telah dan sedang digunakan. Masing-masing menggantikan model paradigma sebelumnya. Pergantian paradigma ini mutlak diperlukan sesuai

perubahan dengan konteks ruang dan waktu. Ini bersesuaian dengan kaidah Taghoyyurul ahkami bi taghoyyuril azminati wal amkinati. Bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Berikut ada beberapa jenis paradigma yang disinggung pada pembahasan di atas:

a. Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran

Nalar gerak PMII secara teoritik mulai terbangun secara sistematis pada masa kepengurusan Muhaimin Iskandar (Ketum) dan Rusdin M. Noor (sekjend) 1994-1997. Untuk pertama kalinya istilah paradigma yang populer dalam bidang sosiologi digunakan dalam PMII.

Paradigma pergerakan dirasa mampu untuk menjawab kegerahan anggota pergeraan yang gerah dengan situasi sosial-politik nasional. Era pra reformasi di PMII menganut paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran.

Paradigma ini muncul dikarenakan restrukturisasi yang dilakukan orde baru telah menghasilkan format poltik baru yang ciri-ciri umumnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara kapitalis pinggiran (peripheral capitalist state) di beberapa negara Amerika Latin dan Asia. Ciri-ciri itu antara lain adalah.

1. Munculnya negara sebagai agen otonom yang perannya kemudian "mengatasi" masyarakat yang merupakan asal-usul eksistensinya.
2. Menonjolnya peran dan fungsi birokrasi dan teknokrasi dalam proses rekayasa sosial, ekonomi dan politik.
3. Semakin terpinggirkannya sektor-sektor "populer" dalam masyarakat (termasuk kaum intelektual).
4. Diterapkannya model politik eksklusioner melalui jarigan-jaringan korporatis untuk menangani berbagai kepentingan politis.
5. Penggunaan secara efektif hegemoni idiologi untuk memperkokoh dan melestarikan sistem politik yang ada.

Rezim Orde Baru adalah lahan subur bagi sikap perlawanan PMII terhadap negara yang hegemonik. Sikap perlawanan itu didorong pula oleh teologi *antroposentrisme transendental* yang memposisikan manusia sebagai *Kholifatullah fil ardh.*

Hal penting lain dari paradigma ini adalah mengenai proses rekayasa sosial yang dilakukan PMII. Rekayasa sosial yang dilakukan melalui dua pola, *pertama*, melalui advokasi masyarakat, *kedua*, melalui *Free Market Idea*. Advokasi dilakukan untuk korban-korban perubahan, bentuk gerakannya ada tiga yakni, sosialisasi wacana, penyadaran dan pemberdayaan, serta pendampingan.

Cita-cita besar advokasi ialah sebagai bagan dari pendidikan politik masyarakat untuk mencapai angan-angan terwujudnya *civil society*. Kemudian yang diinginkan dari *Free Market Idea* adalah tejadinya transaksi gagasan yang sehat dan dilakukan oleh individu-individu yang bebas, kreatif sebagai hasil dari proses liberasi dan independensi.

b. Paradigma Kritis Transformatif

Pada periode sahabat Saiful Bahri Anshari (1997-2000) diperkenalkan paradigma Kritis Transformatif. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip dasar paradigma ini tidak jauh berbeda dengan paradigma Arus Balik. Titik bedanya terletak pada kedalaman teoritik serta pengambilan eksemplar-eksemplar teori kritis madzhab Frankfurt serta krtisisme intelektual muslim seperti, Hasan Hanafi, Ali Asghar Enginer, Muhammad Arkoun dll.

Di lapangan terdapat konsentrasi pola yang sama dengan PMII periode sebelumnya, gerakan PMI terkonsentrasi di aktivitas jaanan dan wacana kritis. Semangat perlawanan terhadap negara dan dengan kapitalisme global masih mewarnai gerakan PMII.

Kedua paradigma sebelumnya mendapat ujian berat ketika KH. Abdurrahman Wahid (almarhum) terpilih menjadi presiden ke-4 RI pada November 1999. para aktivis PMII dan aktivis *civil society* umumnya mengalami kebingungan saat Gus Dur yang menjadi tokoh dan simbol perjuangan *civil society* Indonesia naik ke tampuk kekuasaan.

Aktivis pro-demokrasi mengalami kebingungan antara mendampingi Gus Dur dari jalur ekstraparlementer, atau bersikap sebagaimana pada presiden-presiden sebelumnya. Mendampingi atau mendukung didasari pada kenyataan bahwa masih banyak unsur-unsur orba yang memusuhi preiden ke-4 ini.

Pilihan tersebut memunculkan pendapat bahwa aktivis pro-demokrasi telah menanggalkan semangat perlawanannya. Meski demikian secara rasional sikap PB. PMII dimasa kepengurusan Nusron Wahid (2000-2002) secara tegas terbuka mengambil tempat mendukung demokrasi dan reformasi yang secara konsisten dijalankan oleh presiden Gus Dur.

c. Paradigma Menggiring Arus Berbasis Realitas

Pada masa kepengurusan sahabat Heri Harianto Azumi (2006-2008) secara massif, paradigma gerakan PMII masih kental dengan nuansa perlawanan frontal baik baik terhadap negara maupun terhadap kekuatan kapitalis internasional. Sehingga ruang taktis-strategis dalam kerangka cita-cita gerakan yang berorientasi jangka panjang justru tidak memperoleh tempat. Aktifis-aktifis PMII masih mudah terjebak larut dalam persoalan temporal-spasial, sehingga perkembangan internasional yang sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan Indonesia sendiri sulit dibaca. Dalam kalimat lain, dengan energi yang belum seberapa, aktifis PMII sering larut pada impian membendung dominasi negara dan ekspansi

neoliberal saat ini juga. Efek besarnya, upaya strategis untuk mengakumulasikan kekuatan justru masih sedikit dilakukan.

Celakanya, konsep-konsep yang dipakai di kalangan akademis kita hampir seluruhnya beraroma liberalisme. Sehingga di tingkat intelektualpun tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri dari arus liberalisme.

Dengan kata lain dalam upaya melawan neoliberalisme banyak gerakan terperangkap dalam knsep-konsep Liberalsme, Demokrasi, HAM, Civil Society, Sipil vs Militer, Federalisme, dll yang dipakai sebagai agenda substansial padahal dalam lapangan politik dan ekonomi, ke semuanya nyaris menjadi mainan negara-negara neoliberal.

Persoalan sulitnya membangun paradigma berbasis realitas paralel dengan kesulitan membuat agenda nasional yang berangkat dari kenyataan Indonesia. Konsekuensi yang harus diambil dari penyusuan paradigma semacam ini adalah, untuk sementara waktu organisasi akan tersisih dari gerakan mainstream. Bagaimanapun untuk membangun gerakan kita harus mendahulukan kenyataan dari pada logos.

SEJARAH PMII BONE

A. Membedah kelahiran PMII Bone: Usaha penemuan jati diri

Mencoba menulusuri dan membedah kapan PMII lahir (masuk) di bumi Arung Palakka, maka terlebih dahulu perlu dilakukan beberapa pemetaan, pertama; PMII sebagai symbol, kedua; PMII sebagai organisasi.

Pertama; PMII sebagai symbol (sekedar nama; la- yahya wala- yamutu), sekitar tahun 1983, PMII mulai samar-samar terdengar dan didiskusikan dikalangan mahasiswa Bone. Apalagi kemudian proses pmiisasi sangat kental dengan nuansa dan gaung ke NU annya, dan rakyat Bone sangat kuat memelihara tradisi-tradisi ke NU an tersebut, karena memang banyak ulama besar (baca; Anre Gurutta H. Junaide, Petta Kalie) yang telah meletakkan pondasi keberislaman yang sesuai dengan nilai-nilai ke NU an, sehingga ada diantara sahabat mahasiswa saat itu, yang merasa tertarik untuk mengeksiskan organisasi ini di Kab. Bone, sebut misalnya (umar muhrim – husaini samad). Dalam lingkup kegiatan nasional PMII, khususnya pada ajang kongres, PMII Bone tidak pernah absent dan selalu mendapatkan SK dari Pengurus Besar PMII Jakarta, walaupun secara kelembagaan PMII Bone belum berjalan. Oleh karena itu, bisa dikatakan pada masa ini ruh dan nama PMII Bone telah ada, walaupun belum lahir dalam alam nyata sama ketika nabi Adam telah mendengar nama Muhammad jauh sebelum beliau terlahir di alam nyata.

Kedua; PMII sebagai oraganisasi, setelah kurang lebih 12 tahun lamanya PMII vakum dan tak berbentuk (proses kaderisasi dan regenerasi yang tak berjalan), barulah sekitar tanggal 13 oktober 1995 PMII mengalami reinkarnasi dan renesince dibawah pimpinan sahabat Ismail Kery. Berawal dari terbangunnya komitmen bersama di kalangan kaum muda dan pelajar NU untuk mengeksiskan

PMII, hal ini tidak terlepas dari perang dua orang tokoh besar PMII Bone yaitu: sahabat Ismail Kery dan Rahmatunnair yang berusaha memperjuangkan agar PMII besar di bumi Arung Palakka. Saat itu, hal yang sangat fundamental untuk dibangun yaitu menggalakkan proses kaderisasi dan regenerasi PMII, karena organisasi ini tidak akan mungkin besar tanpa ukungan kuantitas dan kualitas kader sehingga gerakan konsolidasi rekruitmen adalah keharusan. IAIN Alauddin Watampone (saat ini; STAIN Watampone) menjadi titik utama perekrutan kader, salah satu wacana yang dijadikan sebagai senjata untuk menarik simpati mahasiswa saat itu yaitu wacana ASWAJA, bahwa: dalam dirimu dan diri kalian ada nilai aswaja ada darah PMII yang mengalir, inilah doktrin yang ditanamkan kepada kader. Sehingga pada tahun 1996 PMII berhasil mengkader 196 lebih mahasiswa. Disinilah kemudian dimulai titik balik kebangkitan PMII Bone, sehingga masih terus eksis hingga hari ini, dan tidak ada alasan PMII mati di Kab. Bone.

B. Nama ketua cabang bone:

1. Ismail Kery (1993-1999)
2. Rahmatunnair (1999-2002)
3. Dr. Muhaymin El-Mahady (2002-2003)
4. Muh. Nasir S.Hi (2002-2003)
5. Fadli S.Pd.I (2004-2005)
6. Alamsyah (2005-2006)
7. Muh. Ishak (2006-2007)
8. Sultan Hasanuddin S.Pd.I,M.Pd (2007-2008)
9. Muh. Akbar S.Pd.I M.Pd.I (2008-2009)
10. Karmun S.Pd.I (2009-2010)
11. Samsul Bahri S.E.Sy,M.E.Sy. (2010-2011)

12. Asmar Anjung S.Pd., M.Pd (2011-2012)
13. Samsuryadi S.Sy (2012-2014)
14. Ahwal Bin Ahmad (2014-2015)
15. Arsyad S.Pd.I (2015-2016)
16. Herman DP (2016-2018)
17. Sudri, S.Sos (2018-Sekarang).

C. NU dalam gerak sejarah PMII sebagai refleksi kebangkitan PMII bone: Orang tua dan anak yang sulit bersinergi

Deklarasi independensi PMII di MunarjatiMalang, bukan perlawanan anak terhadap orang tuanya akan tetapi merupakan usaha penemuan jati diri seorang anak

Sebagai sebuah organisasi yang telah berusia hampir setengah abad, semestinya PMII telah mencapai periode kematangan, sejak didirikan pada tanggal 17 april 1960 sebagai bagian integral dari organisasi NU, PMII memang berfungsi sebagai sayap mahasiswa NU disamping GP Ansor di sayap pemuda, Muslimat di sayap ibu-ibu, Fatayat di sayap remaja putri dan IPNU/IPPNU disayap pelajar serta banon – banon lain. Maka komitmen PMII kepad jam'iyah NU adalah suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun yang membedakan kemudian bahwa PMII lebih cepat berusaha untuk dewasa dan mandiri tidak tergantung pada orang tuanya (tidak lagi menyusu pada orang tuanya.

Pada tahun 1974 ketika NU telah melakukan fusi politik dengan partai-partai islam lain, dalam PPP, maka deklarasi independensi di Munarjati Malang juga merupakan pilihan sejarah yang sangat penting. Dengan tegas PMII menyatakan independent dari NU karena PMII memang harus menegaskan visinya bukan sebagai bagian partai politik.

Demikian pula, deklarasi interdependensi pada dekade 1980-an, yang kembali menegaskan kesaling tergantungan antara PMII-NU adalah bukti bahwa PMII tidak akan dapat meninggalkan komitmennya terhadap jam'iyah NU piliha-pilihan dependensi –independensi – interdependensi ini sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan.

Dengan demikian komitmen PMII terhadap NU adalah komitmen yang mengambil bentuknya dalam *clas of struggle* yang akan mengawal visi dan misi NU kedepan disamping transformasi internal tersebut.

Sehingga untuk menemukan benang merah agar keduanya mampu bersinergi yaitu pemahaman akan posisinya masing-masing. Walaupun PMII tidak pernah menuntut apa-apa ke NU. PMII harus tetap berbakti pada NU sebagi orang tuanya. Begitu pula sebaliknya orang tua kita di NU harus sadar bahwa PMII itu sudah mandiri. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong PMII Bone pada awal kebangkitannya (1995-1999) yang merumuskan satu misi besar orientasi kerja yaitu menghidupkan NU yang saat itu mati suri. Bukannya PMII membanggakan diri bahwa NU dan diantara seluruh badan-badannya hanya PMII lah yang kaderisasinya berjalan, sehingga sampai hari ini belum ada alasan bahwa PMII bukan anak dari NU.

D. Potret gerakan PMII Bone: Dari Gerakan Jalanan menuju Perubahan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada priode awal (1995-1998) PMII Bone eksis melakukan gerakan konstruksi internal kader melalui proses kaderisasi dan melakukan pembenahan di tubuh NU, para tokoh PMII saat ini masih berusaha mencari jati diri PMII di Bone dan terus melakukan perenungan tentang arah PMII ke depannya. karena hal tersebut dipandang sebagai hal yang sangat prinsipil terhadap mati hidupnya PMII di Bone, yang

pada saat itu konstalasi dan geo politik nasional orde baru masih terus melakukan stressing dan intimidasi terhadap lembaga kemahasiswaan terlebih lagi yang berbau NU di bawah komando Soeharto. Namun menjelang reformasi dan di tengah maraknya aksi jalan yang menuntut agar Soeharto turun dari jabatnnya juga terjadi di Kab. Bone, bahkan bisa dikatakan bahwa penggerak reformasi di Kab. Bone ialah aktivis PMII, maka tidak mengherankan menjelang detik-detik reformasi 1998 beberapa aktivis PMII Bone mendapat ancaman dari pemerintah Kab. Bone bahkan menjadi DPO.

Sehingga berbagai gerakan PMII merupakan cerminan bagi ormas lainnya, menjadi pelopor dan centrum gerakan perubahan rakyat Bone. Sehingga pada masa kepemimpinan sahabat Fadly El-As'adhy (2004-2005), seluruh gerakan lahir dari gagasan aktivis PMII yang kemudian dikonsolidasikan secara bersama-sama. Salah satu bukti terbangunnya konsolidasi gerakan antara pemuda dan mahasiswa Bone, dengan lahirnya wadah Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Rakyat (GPMPR; yang terdiri dari seluruh OKP kecuali HMI), turun ke jalan mengecam: politisi Busuk, dan kampanye darah pada tahun 2004. penolakan kenaikan BBM, Kapitalisasi pendidikan, dan pelanggaran HAM.

PMII Bone dalam perjalannya, awal tahun 2005, karena memandang bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tidak mampu mengakomodasi aspirasi pemuda dan mahasiswa Bone saat itu, maka PMII dengan tegas menyatakan sikap untuk keluar dari KNPI Bone, kemudian mendeklarasikan lahirnya Komite Pemuda Pro Perubahan (KP3) pada tanggal 9 Januari 2005

Berbagai isu centralpun terus PMII gulirkan mulai dari isu yang sifatnya lokal hingga yang menasional, mulai isu pendidikan, keagamaan, ekonomi budaya, hukum. Mulai dari aksi yang paling damai hingga yang anarkis, bahkan tidak jarang dari aksi tersebut berakhir dengan penganiayaan dan pemukulan oleh

oknum militer, sebut misalnya, penyerbuan terhadap aktivis 1998 di STAIN Watampone, aksi mengkritisi kinerja kepolisian di kantor Polres Bone yang berujung bentrok pada akhir tahun 2006, Aksi penolakan kenaikan BBM yang berakhir dengan aksi brutal aparat militer di kantor DPRD Bone pada pertengahan tahun 2008 yang kemudian kawan sebut Tragedi BBM berdarah tahun 2008.

PMII Bone juga tidak ketinggalan melakukan prosesi advokasi (pendampingan) terhadap rakyat, berikut yang sempat tercatat: pendampingan pedangang kaki lima di pasar sentral watampone yang akan di gusur, pendampingan sopir angkutan Bone-Makassar, pendampingan kasus perampasan tanah, pendampingan kasus ketidak adilan hukum, penyadaran rakyat melalui gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR), dan Sekolah Rakyat, penyadaran keagamaan melalui Bone berzikir, orasi terbuka.

Masih banyak lagi gerakan dan aksi jalanan PMII Bone yang sengaja tidak disebutkan karena jangan sampai menjadi kesombongan dan nostalgia semu, dan adapun yang telah disebutkan diniatkan menjadi warisan dan penggerak bagi seluruh generasi PMII yang akan datang, bahwa tidak ada satupun jalan dan warisan PMII untuk menyerah kepada kemunafikan dan ketidak adilan. PMII Bone jangan pernah jauh dari rohnya yaitu rakyat Bone.

Materi 02:

AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

A. Pengertian Aswaja

Aswaja (Ahlussunnah Wal Jama'ah) salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh keorganisasian PMII. Mengapa? Karena Aswaja merupakan metode pemahaman dan pengamalan keyakinan tauhid, ini disebutkan dalam NDP (Nila Dasar pergerakan) yang ada dalam tubuh PMII.

Karena kenyataan inilah membahas tentang aswaja menjadi urgen, karena akan menghantarkan kita semua terutama para kader untuk mererfleksi dan menjadikannya dasar sekaligus pedoman dalam melakukan pergerakan, sehingga nantinya apa yang akan dilakukan selalu sejalan dengan apa yang menjadi semangat dari organisasi tercinta ini.

Pengertian aswaja pada masa pendirinya (al-Asy'ari w.324 H/935 M) belum dikenal. Istilah aswaja baru mulai dikenal sebagai sebuah aliran pada masa ashab al-asy'ari (para pengikut al-Asy'ari), seperti: al-Baqilani (w. 403 H/1013 M), al-Baghdadi (w. 429 H), al-Juwaini (419-478 H/1085 H), al-Ghazali (w.505 H/ 1058-1111 M), al-Syahrastani (w.403 H), dan Fakhruddin al-Razi (w.660 H). Namun demikian, mereka belum secara tegas membawa bendera aswaja sebagai sebuah madzhab. Istilah aswaja yang menyebut secara tegas sebagai sebuah kelompok/ madzhab baru, baru dijumpai pada kitab Ittihaf Sadat Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumiddin karangan al-Zabidi (w. 1205 H). Al-Zabidi menyebutkan bahwa "idza uthliqa ahl sunnah fa al-murad bihi al-asy'ariah wa al-maturidiyyah", apabila disebutkan ahl al-sunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut al-Asy'ari dan al-Maturidi.

Dalam tinjauan bahasa kata *Ahlussunnah Wal Jama'ah* tersusun dari tiga kata; Ahl, as-Sunnah, dan al-Jamâ'ah. Kata Ahl dalam pengertian bahasa adalah keluarga, golongan atau komunitas. Salah seorang pakar bahasa, al-Imâm Ar-Raghib alAshbahani dalam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân mengatakan bahwa penggunaan kata *Ahl* biasa dipakai pada perkumpulan beberapa orang yang mungkin disatukan oleh satu keturunan, satu agama, satu pekerjaan, satu rumah, satu negara, atau perkumpulan apapun. Namun pada dasarnya, dalam bahasa Arab jika dikatakan *"Ahl ar-Rajul",* maka yang dimaksud adalah bahwa orang tersebut adalah bagian dari anggota keluarga yang sama-sama berasal dari satu tempatatau satu rumah.

Sementara kata Ahl dalam pemaknaan yang lebih khusus adalah dalam pengertian nasab atau keturunan, seperti bila dikatakan *"Ahl Bayt ar-Rajul",* maka yang dimasud adalah bahwa orang tersebut adalah bagian dari anggota yang berasal dari satu keturunan. Adapun penggunaan secara mutlak, seperti bila dikatakan *"Ahl al-Bayt",* maka yang dimaksud adalah khusus keluarga Rasulullah dan keturunannya.

Kata *Ahl al-Bayt* yang dimaksud dalam ayat ini adalah keluarga Rasulullah; artinya bahwa Allah secara khusus membersihkan keluarga Rasulullah dari syirik dan kufur.

Kata as-Sunnah dalam tinjauan bahasa memiliki beberapa arti. Dalam al-Qâmûs al-Muhîth, al-Imâm al-Fairuzabadi menuliskan beberapa maknanya. Kata as-Sunnah, -dengan di-zhammah-kan pada huruf sin-nya--, di antara maknanya; wajah atau muka (al-Wajh), bulatan wajah (Dâ-irah al-Wajh), bentuk wajah (Shûrah al-Wajh), kening (alJab-hah), perjalanan hidup (as-Sîrah), tabi'at (ath-Thabî'ah), jalan menuju Madinah, dan hukum-hukum Allah; artinya segala

perintah dan larangan-Nya (Hukmullâh). Al-Imâm Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam Ithâf as-Sâdah al-Muttaqin menyebutkan bahwa di antara makna as-Sunnah dalam pengertian bahasa adalah jalan yang ditapaki (athTharîqah al-Maslûkah).

Demikian pula kata as-Sunnah dalam pengertian syari'at juga memiliki ragam definisi, di antaranya; as-Sunnah dalam makna sejarah hidup Rasulullah dan ajaran-ajarannya, as-Sunnah dalam makna hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah; dari segala perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, ataupun sifat-sifat pribadinya; baik sifat dalam makna gambaran fisik atau dalam makna akhlak-akhlak-nya, dan asSunnah dalam makna sesuatu yang apa bila dilakukan maka pelakunya akan mendapatkan pahala, namun bila ditinggalkan tidak berdosa.

Ulama' ushul Fiqh mendefinisikan fiqh sebagai, "segala sesuatu yang berasal dari nabi SAW selain Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan syara'". Ulama' fiqh dalam perspektif lain mendefinisikan sebagai "segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW dan tidak menjadi bagian dari masalah fardlu dan wajib dan dia adalah jalan yang diikuti dalam persoalan agama".

Berdasarkan lacakan bahasa, Said a.S. (1998) mendefinisikan As-Sunnah sebagai "segala sesuatu yang dirujukkan kepada perilaku atau jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW beserta sahabat-sahabatnya". Ada yang menggaris bawahi perilaku sahabat-sahabat Nabi dapat dijadikan sandaran jika tidak bertentangan dengan Sunnah Nabi, jadi sifatnya masih relatif.

Adapun pengertian Al-jama'ah (الجماعة) secara etimologi berarti kelompok. Berasal dari kata jama'ah yang artinya perhimpunan (Al-Munawir 1984). Secara

terminologi Al- Jama’ah menurut Imam Bukhari adalah Ahlul ‘ilmi (kaum intelektual). Imam Ath-Thabari mendefinisikan Al-Jama’ah adalah mayoritas golongan. Adapun menurut Imam Al Mubaraq menafsirkan Al jama’ah sebagai orang yang memiliki sifat-sifat keteladanan yang sempurna berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan menurut As-Satibi Al-Jama’ah adalah para sahabat Nabi SAW dan masih banyak pengertian yang lain(Badrun 2000).

Dalam tinjauan kata *al-Jamâ’ah* bahasa adalah perkumpulan sesuatu yang terdiri dari tiga anggota atau lebih, seperti bila dikatakan dalam bahasa Arab “*Jamâ’ah an-Nâs*” maka artinya perkumpulan manusia yang terdiri dari tiga orang atau lebih, atau bila dikatakan “J*amâ’ah ath-Thuyûr*” maka artinya perkumpulan burungburung yang terdiri dari tiga ekor atau lebih lebih.

Demikian pula *al-Jamâ’ah* dalam pengertian syari’at memiliki ragam definisi, di antaranya; *al-Jamâ’ah* dalam makna seseorang yang melaksanakan shalat yang mengikatkan dan mengikutkan shalatnya tersebut kepada shalat orang lain, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu; yaitu shalat jama’ah. *Al-Jamâ’ah* bisa dalam makna perkumpulan orang-orang Islam di bawah satu pemimpin atau seorang Imam yang telah sah dibai’at oleh *Ahl al-Hilli Wa al-‘Aqdi* dengan syarat-syarat tertentu. Makna ini sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah bahwa siapa yang keluar dari *al-Jamâ’ah* dan memberontak kepada Imam, -setelah sah Imam tersebut diangkat-, kemudian orang tersebut meninggal dalam keadaannya tersebut, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyyah. Artinya mati dengan membawa dosa besar. (HR. Muslim).

Menurut Harun Nasution term Ahlussunnah wal jamaah timbul sebagai reaksi terhadap faham-faham golongan mu’tazilah yang tidak begitu berpegang pada Sunnah atau tradisi karena meragukan keotentika Sunnah. Selain itu

Mu'tazilah bukan paham yang populer dikalangan rakyat biasa yang terbiasa dengan pemikiran yang sederhana. Karena persoalan itu muncullah term *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang berarti golongan yang berpegang teguh pada Sunnah (tradisi) dan merupahan faham mayoritas ummat.

Di dalam kitab ensiklopedia berjudul *Al-Mausu'ah Al-'Arabiyah Al-Muyassarah,* sebagaimana dikutip oleh M. Tholhah Hasan, disebutkan bahwa ahlu al-sunnah wa al-jama'ah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi SAW dan membelanya. Mereka memiliki pendapat tentang masalah agama baik yang fundamental (*ushul*) maupun divisional (*furu'*). Di antara mereka ada yang disebut salaf yaitu generasi awal: sahabat, tabi'in, dan tabi'u al-tabi'in, di antara mereka juga ada generasi *khalaf*, yaitu generasi yang datang kemudian/belakangan. Di antara mereka ada yang toleransinya luas terhadap peran akal, dan di antara mereka ada juga yang toleransinya ketat terhadap peran akal. ***Di antara mereka ada yang bersikap reformatif (mujaddidun) dan di antaranya lagi ada yang bersikap konservatif (muhafidzun).***

KH. Sirajuddin Abbas mendefinisikan ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai kaum yang menganut I'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau.Drs. KH. Syamsudin Anwar, Mendefinisikan Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah penganut ajaran, paham (doktrin) yang menganut pada sunnah Nabi dan I'tiqad para sahabat Nabi.

Sedangkan menurut KH. Sa'id Agil Siradj, ahlu al-sunnah wa al-jama'ah adalah "*ma ana 'alaihi wa ashabihi*", yaitu jalan yang kami –Nabi SAW dan para sahabat- tempuh. Hal ini berarti bahwa ahlu al-sunnah wa al-jama'ah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua

aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran.

Kemudian pengertian ini mengalami perubahan ketika Ahlussunnah diartikan menurut presfektif Nahhdhatul ‘Ulama (NU). Dalam Qanun Asasi yang dirumuskan Hadhrastus Syaikh KH. Hasyim ‘Asy’ari tertulis bahwa Aswaja merupakan sebuah paham keagamaan di mana dalam bidang aqidah menganut pendapat Abu Hasan al-Asy’ari dan al-Maturidi, dalam bidang fiqih menganut salah satu dari keempat madzhab (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Hanbali), dan dalam bidang tasawuf menganut Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

Jika ditelusuri secara teoritis, definisi dari istilah sunni atau Aswaja akan sulit didapatkan secara pasti dan konsensus. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya perbedaan dalam menggunakan istilah sunni secara akademik dan politik.

B. SEJARAH MUNCULNYA FAHAM AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH

Sebenarnya sistem pemahaman Islam menurut Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah hanya merupakan kelangsungan desain yang dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur-rasyidin. Namun sistem ini kemudian menonjol setelah lahirnya madzhab Mu’tazilah pada abad ke II H.

Tercatat ada 3 hadits, dua diriwayatkan oleh Imam Turmidzi dan satu oleh Imam Tabrani. Dalam hadits ini diceritakan bahwa umat Yahudi akan terpecah ke dalam 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan Islam dalam 73 golongan.

Semua golongan umat Islam itu masuk neraka kecuali satu. "Siapa mereka itu, Rasul?" tanya sahabat. "Ma ana ‘Alaihi wa Ashabi," jawab Rasul.

Bahkan dalam hadist riwayat Thabrani, secara eksplisit dinyatakan bahwa golongan itu adalah Ahlussunah wa al-jama’ah. Ungkapan Nabi itu lantas menjadi aksioma umum. Sejak saat itulah kata Aswaja atau Sunni menjadi sedemikian populer di kalangan umat Islam. Sebenarnya bukan hanya itu yang melatarbelakangi lahirnya Aswaja. Karena dicatat bahwa Aswaja lahir sebagai respon dari gejolak politik yang terjdi pada masa khulafaur Rasyidin. Yakni dimulai sejak perang shiffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Bersama kekalahan Ali dalam tahkim dikarenakan pengkelabuan yang dilakukan dari pihak Muawiyyah.

Kemudian umat islam makin terpecah kedalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syi’ah yang secara umum dinisbatkan kepada pendukung Ali, Khawarij yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan keputusan tahkim, dan ada pula kelompok Jabariyyah yang melegitimasi kepemimpinan Muawiyyah. Selain ketiga golongan tersebut masih ada Murji’ah dan Qadariyyah.

Di antara kelompok-kelompk tersebut ada sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa’id Hasan bin Hasan Yasar al-Bashri lebih dikenal Imam Hasan al-Bashri (21-110 H/639-728 M) sebagai tokoh aswaja terkemuka, dalam masalah Qada dan Qadar menyangkut kehendak manusia, memilih pendapat Qadariah yang menyatakan pendapat bahwa manusia memiliki kewenangan untuk berkehendak, sedangkan dalam masalah dosa besar memilih pendapat Murji’ah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar menjadi kufur dan hanya imannya yang masih ada (fasiq). Pemikiran Hasan Bashri inilah yang

kemudian diteruskan oleh murid-muridnya serta generasi lapis kedua seperti Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), Malik bin Anas (93-179 H/713-796 M), al-Syafi'i (150- 204 H/ 767-820 M), Ahmad Bin Hanbal (w. 241 H/ 780-855 M), dan Harits bin asad al-Muhasibi (w. 333 H). Generasi tersebut kemudian diteruskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari (w.324 H/ 873-935 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H/ 944 M). Ia cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat cultural, ilmiah, dan berusaha mencari kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian antara berbagai fraksi politik (firqah) yang berkembang pada masa itu. Sebaliknya mereka mengembangkan system keberagamaan dan pemikiran yang sejuk, moderat dan tidak ekstrim. Dengan system keberagamaan seperti ini mereka tidak mudah mengkafirkan golongan yang terlibat pertikaian politik ketika itu.

Imam Hasan Al-Bashry mempunyai sebuah majlis ta'lim di Bashrah, tempat mengembangkan dan memancarkan ilmu Islam. Di antara murid beliau, bernama Washil bin Atha'. Ia adalah salah seorang murid yang pandai dan fasih dalam bahasa Arab.

Pada suatu ketika timbul masalah antara guru dan murid, tentang seorang mu'min yang melakukan dosa besar. Pertanyaan yang diajukannya, apakah dia masih tetap mu'min atau tidak? Jawaban Al-Imam Hasan Al-Bashry, "Dia tetap mu'min selama ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia fasik dengan perbuatan maksiatnya." Keterangan ini berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits karena Al-Imam ***Hasan Al-Bashry mempergunakan dalil akal tetapi lebih mengutamakan dalil Qur'an dan Hadits***.

Dalil yang dimaksud, sebagai berikut; pertama, dalam surat An-Nisa': 48;

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berbuat syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selian itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Tuhan ia telah membuat dosa yang sangat besar*.”

Kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“*Dari shahabat Abu Dzarrin berkata; Rasulullah SAW bersabda: Datang kepadaku pesuruh Allah menyampaikan kepadamu. Barang siapa yang mati dari umatku sedang ia tidak mempersekutukan Allah maka ia akan masuk surga, lalu saya (Abu Dzarrin) berkata; walaupun ia pernah berzina dan mencuri ? berkata (Rasul) : meskipun ia telah berzina dan mencuri*.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).

“*Allah berfirman: Demi kegagahanku dan kebesaranku dan demi ketinggian serta keagunganku, benar akan aku keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan; Tiada Tuhan selain Allah*.”

Tetapi, jawaban gurunya tersebut, ditanggapi berbeda oleh muridnya, Washil bin Atha’. Menurut Washil, orang mu’min yang melakukan dosa besar itu sudah bukan mu’min lagi. Sebab menurut pandangannya, “bagaimana mungkin, seorang mu’min melakukan dosa besar? Jika melakukan dosa besar, berarti iman yang ada padanya itu iman dusta.”

Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, sang murid tersebut dikucilkan oleh gurunya. Hingga ke pojok masjid dan dipisah dari jama’ahnya. Karena peristiwa demikian itu Washil disebut mu’tazilah, yakni orang yang diasingkan. Adapun beberapa teman yang bergabung bersama Washil bin Atha’, antara lain bernama Amr bin Ubaid.

Selanjutnya, mereka memproklamirkan kelompoknya dengan sebutan Mu’tazilah. Kelompok ini, ternyata dalam cara berfikirnya, juga dipengaruhi oleh ilmu dan falsafat Yunani. Sehingga, terkadang mereka terlalu berani menafsirkan Al-Qur’an sejalan dengan akalnya. Kelompok semacam ini, dalam sejarahnya terpecah menjadi golongan-golongan yang tidak terhitung karena tiap-tiap mereka mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Bahkan, diantara mereka ada yang terlalu ekstrim, berani menolak Al-Qur’an dan Assunnah, bila bertentangan dengan pertimabangan akalnya.

Mu’tazilah adalah aliran pemikiran yang kental dengan tradisi rasionalisme. Aliran pemikiran ini didirikan oleh Washil bin Atho’ (81-131 H). Faham Mu’tazilah ini semakin kuat, karena mendapatkan dukungan dari khalifah al-Ma’mun (berkuasa 813-833 M), dia adalah murid dari Washil bin Atho’. Dukungan terhadap Mu’tazilah ini berupa penyediaan fasilitas bagi forum-forum penyebaran faham ini. Di samping itu, al-Ma’mun juga mengeluarkan perintah untuk melakukan *Mihnah* (*inquisition*) yang dilaksanakan pada 218-234 H terhadap para hakim yang ada pada era tersebut. *Mihnah* sendiri adalah ujian keyakinan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan terhadap para hakim serta para tokoh berpengaruh atas dukungan para elit Mu’tazilah. Banyak ulama yang menjadi korban *mihnah* baik berupa pemenjaraan, penyiksaan fisik bahkan sampai pada hukuman mati. Salah seorang ulama yang terkena korban mihnah ini adalah imam ibnu Hanbal yang menolak al-Qur’an sebagai mahluk bukan kalamullah yang *qadim*.

Pada era Abu Hasan al-As’ari dan Abu Mansur al-Maturidi inilah konsepsi aswaja sebagai kelompok pemikiran sudah mulai tersistematisir. Pada era berikutnya istilah aswaja dalam lapangan teologi Islam semakin mapan,

sehinggga yang dimaksud dengan *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* adalah adalah kaum Asy'ariyah (pengikut al-Asy'ari) dan Maturidiyah (pengikut al-Maturidi). Dan dua tokoh ini kemudian disebut sebagai pendiri aswaja. Kemunculan aswaja pada era ini merupakan wacana tandingan (*counter discours*) terhadap dominasi faham Mu'tazilah di dunia Islam.

Abu Hasan al-Asy'ari dilahirkan di Basrah pada tahun 260 H/873 M dan wafat di Baghdad pada 324 H/ 935 M dan dimakamkan di antara Karkh dan pintu Basrah. Dia memiliki hubungan nasab dengan sahabat Nabi SAW yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari awalnya adalah penganut Mu'tazilah, dia berguru pada tokoh terkemuka Mu'tazilah terkemuka yaitu Abu Ali al-Juba'i (235-303 H), al-Saham dan al-Thawi. Berkaitan dengan madzhab fikih, menurut ibnu Subkhi dan Abu Bakar ibnu Faruq, Abu Hasan al-Asy'ari adalah pengikut madzhab Syafi'i, karena dia adalah murid dari Abu Ishaq al-Maruzi (w. 340 H). Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa al-Asy'ari adalah penganut madzhab Maliki.

Keluarnya al-Asy'ari dari Mu'tazilah adalah karena keraguan al-Asy'ari dan ketidakpuasan intelektual al-Asy'ari terhadap Mu'tazilah. Ketidakpuasan al-Asy'ari ini berkaitan dengan pola fikir dan metodologi Mu'tazilah yang terlalu mengandalkan akal tanpa dukungan kecerahan wahyu atau nash. Keluarnya al-Asy'ari dari Mu'tazilah juga disebabkan karena tragedi *Mihnah*. Di samping itu saat dalam masa keraguan, al-Asy'ari mengasingkan diri (berkhalwat) selama 15 hari serta melakukan istiharoh serta perenungan mendalam. Dalam pengasingannya tersebut konon al-Asy'ari bermimpi bertemu Nabi SAW dan diperintahkan untuk meninggalkan Mu'tazilah dan membela al-Sunnah.

Abu Mansur al-Maturidi lahir di Maturid-Samarkand pada 859 M dan wafat pada 944 M. Dalam hal fikih, al-Maturidi adalah penganut madzhab Hanafi. Dia adalah murid dari Muhammad bin Muqatil al-Razi (w. 248 H) dan murid dari Nushair bin Yahya al-Balkhi (w.228 H). Al-Maturidi memiliki hubungan nasab dengan sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Ayub al-Anshori

Dalam doktrin al-Asy'ari ada beberapa hal, yaitu: *Pertama*, posisi akal (*'aql*) dan nash (*naql*). Menurut al-Asy'ari iman (*'aqidah*) yang mantap haruslah berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Iman tanpa ilmu seperti orang yang lumpuh sedangkan ilmu tanpa iman seperti orang buta. Di samping itu, dalil-dalil naqli baru dapat dipahami dengan benar jika ditunjang oleh ilmu. Menurutnya "*aqal* dan *naql* bukanlah hal yang harus dipertentangkan, tetapi '*aqal* seharusnya dipergunakan untuk memahami *naql*". *Kedua*, Al-Asy'ari menolak ajaran Mu'tazilah yang tidak mengakui sifat-sifat Allah yang berbeda dengan dzatnya. *Ketiga*, al-Asy'ari menolak faham Mu'tazilah tentang keadilan yang wajib bagi Allah. Menurut al-Asy'ari kekuasaan Allah bersifat mutlak, sehingga tidak ada sesuatupun yang wajib bagi Allah. Sedangkan menurut Mu'tazilah, Allah berkewajiban mendatangkan yang baik bahkan yang terbaik bagi manusia. Allah berkewajiban menurunkan *lutf* bagi manusia. *Lutf* adalah semua hal yang akan membawa manusia pada ketaatan dan yang akan menjauhkan manusia dari maksiat, oleh karena itu Allah berkewajiban menurunkan Nabi atau Rasul untuk membawa petunjuk bagi manusia.

Keempat, menurut al-Asy'ari orang yang melakukan dosa besar tidak serta merta menjadi golongan kafir, statusnya tetap mu'min namun karena dosa besarnya maka dia menjadi *fasiq* (durhaka), dan apabila sampai mati dia tidak bertaubat maka nasibnya terserah kepada Allah, apakah mau dimasukan kedalam

surga karena kemurahan Allah atau dimasukan keneraka karena kedurhakaanya. Pendapat ini menjadi anti teas dari pendapat Mu'tazilah –serta Khawarij- bahwa pelaku dosa besar menjadi kafir karena perbuatan dosanya atau bukan kafir namun juga bukan mu'min (*fi al-manzilah baina al-manzilatain*).

Semenjak itulah maka para ulama' yang mengutamakan dalil al-Qur'an dan Hadits namun tetap menghargai akal pikiran mulai memasyarakatkan cara dan sistem mereka di dalam memahami agama. Kelompok ini kemudian disebut kelompok Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah. Sebenarnya pola pemikiran model terakhir ini hanya merupakan kelangsungan dari sistem pemahaman agama yang telah berlaku semenjak Rasulullah SAW dan para shahabatnya.

Sebagai konfigurasi sejarah, maka secara umum Aswaja mengalami perkembangan dengan tiga tahap secara evolutif.

Pertama, tahap embrional pemikiran sunni dalam bidang teologi bersifat eklektik, yakni memilih salah satu pendapat yang dianggap paling benar. Pada tahap ini masih merupakan tahap konsolidasi, tokoh yang menjadi penggerak adalah Hasan al-Basri

Kedua, proses konsolidasi awal mencapai puncaknya setelah Imam al-Syafi'I (w.205 H/820 M) berhasil menetapkan hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al- qur'an dalam konstruksi pemikiran hukum Islam. Pada tahab ini,kajian dan diskusi tentang teologi sunni berlangsung secara intensif.

Ketiga, merupakan kristalisasi teologi sunni disatu pihak menolak rasionalisme dogma,di lain pihak menerima metode rasional dalam memahami agama. Proses kristalisasi ini dilakukan oleh tiga tokoh dan sekaligus ditempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, yakni; Abu Hasan al-Asy'ari (w.324

H/935 M) di Mesopotamia, Abu Mansur al-Maturidi (w.331 H/944 M) di Samarkand, Ahmad Bin Ja'far al-Thahawi (w.331 H/944 M) di Mesir. (Nourouzzaman Shidiqi : 1996). Pada zaman kristalisasi inilah Abu Hasan al-Asy'ari meresmikan sebagai aliran pemikiran yang dikembangkan. Dan munculnya aswaja ini sebagai reaksi teologis-politis terhadap Mu'tazilah, Khawarij dan Syi'ah yang dipandang oleh Asy'ari sudah keluar dari paham yang semestinya.

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan lahirnya Ahlussunah wa al-jama'ah merupakan respon dari prtselisiahn politik pada masa itu, dimana ia lahir dengan mengenalkan kedamaian, keseimbangan, dan ***inilah sebenarnya ciri utama dari Ahlussunah wa al-jama'ah.***
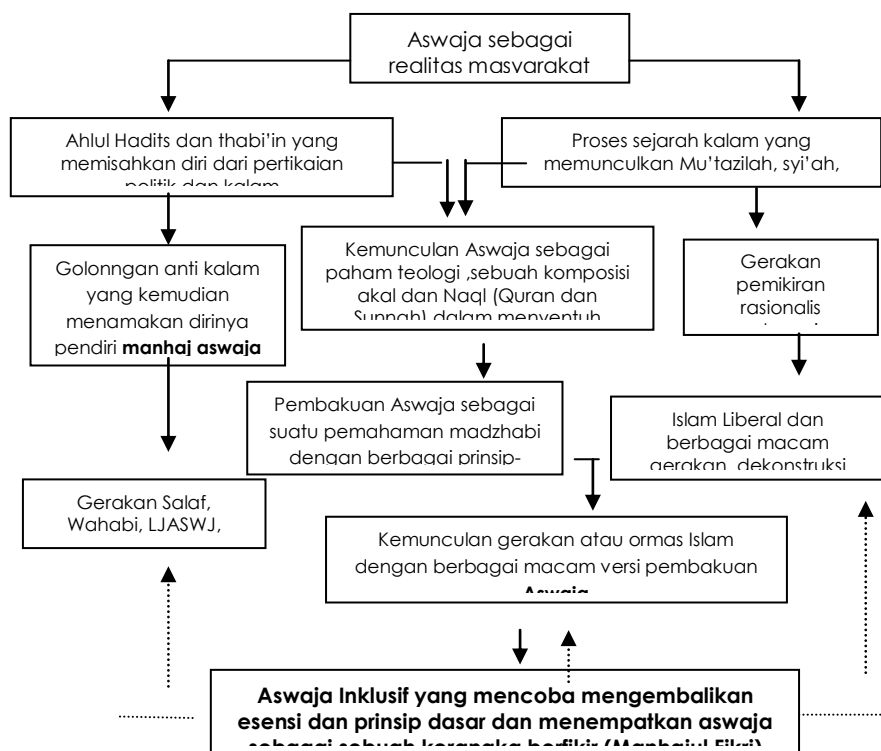
C. AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH SEBAGAI METODE BERFIKIR (MANHAJ AL FIKR)

Berfikir jernih, luwes dan kreatif tanpa tedeng aling-aling adalah sebuah cita-cita luhur intelektual muda NU yang menyerap banyak literatur baru dalam hidupnya. Sebuah usaha yang mendapat kecaman hebat dari para kyai berkaitan dengan tradisi lama yang dibangun.

Konsep Ahlussunnah wal Jama'ah adalah satu dari banyak objek pemikiran yang ingin dilacak kebenarannya oleh intelektual muda tersebut. Benarkah pemahaman Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah kita saat ini? Adakah ia sebuah tradisi yang tak bisa diberantas (Aqidah) atau hanyalah sebuah pemikiran yang debatable?

Sejak waktu berdirinya NU, hingga sekitar tahun 1994, pengertian Aswaja lebih didorongkan sebagai Madzab. Baru pada sekitar pertengahan dekade 1990 muncul gugatan yang mempertanyakan, tepatkah aswaja dianut sebagai madzhab, atau lebih tepat digunakan dengan cara lain ?

Aswaja sebagi madzhab artinya seluruh penganut Ahlussunnah Wal Jama'ah menggunakan produk hukum atau pandangan para Ulama yang dimaksud. Pengertian ini dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman mengingat perkembangan situasi yang berjalan sangat cepat dan membutuhkan inovasi baru untuk mengadapinya. Selain itu pertanyaan epistimologis terhadap pengertian itu adalah bagaimana mungkin terdapat madzhab di dalam madzhab? Dua gugatan tersebut dan banyak lagi yang lain, baik dari tinjauan sejarah, doktrin maupun metodologi, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Aswaja tidak lagi

dapat diikuti sebagai madzhab. Lebih dari itu, Aswaja harus diperlakukan sebagai Manhaj Al-Fikri atau metode berpikir.

Didalam PMII Aswaja dijadikan Manhajul Al-Fikri artinya Aswaja bukan dijadikan tujuan dalam beragama melainkan dijadikan metode dalam berfikir untuk mencapai kebenaran agama. Walaupun banyak tokoh yang telah mencoba mendekontruksi isi atau konsep yang ada dalam aswaja tapi sampai sekarang Aswaja dalam sebuah metode berfikir ada banyak relevasinya dalam kehidupan beragama, sehingga PMII lebih terbuka dalam membuka ruang dialektika dengan siapapun dan kelompok apapun.

Apapun ia, tentunya menjadi sebuah hal yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Betapa tidak? Ketika para intelektual muda NU bergeliat mencari makna kebenaran Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah yang dikultuskan dan menjadi unthoughtable para kiai justru akhirnya merasa terancam eksistensinya. Ada apa dibalik semua ini? Said Aqil Siradj, seorang pemikir muda NU yang banyak menyoroti tentang hal ini dan akhirnya mendapatkan nasib yang sama dengan sesama intelektualis mendasarkan bahwa hapuslah asumsi awal yang menyatakan ini sebagai madzhab pokok.

Rumusan Aswaja sebagai manhajul fikri pertama kali diintrodusir oleh Kang Said (panggilan akrab Prf. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA) dalam sebuah forum di Jakarta padatahun 1991. Upaya dekonstruktif ini selayaknya dihargai sebagai produk intelektual walaupun juga tidak bijaksana jika diterima begitu saja tanpa ada discourse panjang dan mendalam dari pada dipandang sebagai upaya 'merusak' norma atau tatanan teologis yang telah ada. Dalam perkembangannya, akhirnya rumus ini diratifikasi menjadi konsep dasar Aswaja di PMII. **Prinsip**

dasar dari aswaja sebagai manhajul fikri meliputi ; *tawasuth*(moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazzun* (seimbang) dan *Ta'addul* (Adil).

Dalam beberapa runutan pemikiran berikutnya, ia banyak menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah lahir dengan sebab bahwa ini adalah pondasi ideologi yang tak bisa ditawar-tawar. Pemahaman ini kemudian dikembalikan dengan watak asli Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah yang memberikan otoritas penuh kepada ulama untuk mempertahankan ilmu dan hak atas menafsirkan agama dari kesembronoan anak muda. Sebuah bangunan pengetahuan yang dibenturkan dengan prinsip berfikir yang *tawassuth* (Moderat), *tasamuh* (Toleran) *tawazun* (keseimbangan), dan *ta'adul* (keadilan) yang menjadi pembuka wacana inteletualitas ditubuh NU.

Satu kesimpulan awal yang diambil dari pemaparan diatas adalah para ulama merasa jijik dengan pembaharuan yang berefek pada pengutak-atikan ideologi yang diajarkan sebagai pondasi awal di pesantren berbasis NU. Jika dilakukan hal demikian, hancurlah pondasi yang selama ini dibangun, selain pengkultusan yang juga akan hilang begitu saja, sebuah penghormatan tinggi kepada kiai.

Berkembangnya dugaan bahwa ini terjadi karena tradisi Islam yang ada juga masih menimbulkan pertanyaan, karena Islam bukan lahir di Indonesia tetapi tersebar sampai ke negara ini. Maka, kemudian yang terjadi adalah bahwa Islam mengelaborasikan diri terhadap tradisi bangsa ini dengan meng-Islam-kan beberapa diantaranya. Persinggungan inipun menjadi sebuah masalah, bukan hanya karena belum berhasilnya menghilangkan rasa ketradisian yang asli, tetapi juga pada sebuah pertanyaan apakah sebuah tradisi Islam yang ada adalah tradisi asli dari bangsa Arab? atau jangan-jangan sudah terakulturasi dengan budaya

Gujarat?. Hal ini menjadi sebuah pemikiran serius tersendiri dalam mencapai sebuah kebenaran.

Lebih lanjut, konstruksi pemikiran yang ada sejatinya haruslah dihapuskan jika memang mau membahas konsep Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah dengan lebih komprehensip. Kalau tidak, yang ada adalah stempelisasi. Pemurtadan terhadap ideologi yang ada, karena mengutak-atik yang dianggap tak akan bersalah dan tak dapat disalahkan. Pemahaman yang sejati tentang makna Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah dan perdebatannya memang diakui haruslah dimulai dari sebuah asumsi bahwa ia adalah sebuah Manhaj al-Fikr (metode berpikir), bukan madzab yang berkarakteristik sebagaimana di atas. Aktualisasi dari prinsip yang Pertama adalah bahwa selain wahyu, kita juga memposisikan akal pada posisi yang terhormat (namun tidak terjebak pada mengagung-agungkan akal) karena martabat kemanusiaan manusia terletak pada apakah dan bagaimana dia menggunakan akal yang dimilikinya. Artinya ada sebuah keterkaitan dan keseimbangan yang mendalam antara wahyu dan akal sehingga kita tidak terjebak pada paham skripturalisme (tekstual) dan rasionalisme. Selanjutnya, dalam konteks hubungan sosial, seorang kader PMII harus bisa menghargai dan mentoleransi perbedaan yang ada bahkan sampai pada keyakinan sekalipun. Tidak dibenarkan kita memaksakan keyakinan apalagi hanya sekedar pendapatkita pada orang lain, yang diperbolehkan hanyalah sebatas menyampaikan dan mendialiektikakakan keyakinan atau pendapat tersebut, dan ending-nya diserahkan pada otoritas individu dan hidayah dari Tuhan. Ini adalah menifestasi dari prinsip tasamuh dari aswaja sebagai manhajul fikri.

Dan yang terakhir adalah tawazzun (seimbang). Penjabaran dari prinsip tawazun meliputi berbagai aspek kehidupan, baik itu perilaku individu yang

bersifat sosial maupun dalam konteks politik sekalipun. Ini penting karena seringkali tindakan atau sikap yang diambil dalam berinteraksi di dunia ini disusupi oleh kepentingan sesaat dan keberpihakan yang tidak seharusnya. walaupun dalam kenyataannya sangatlah sulit atau bahkan mungkin tidak ada orang yang tidak memiliki keberpihakan sama sekali, minimal keberpihakan terhadap netralitas. Artinya, dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa memandang dan menposisikan segala sesuatu pada proporsinya masing-masing adalah sikap yang paling bijak, dan bukan tidak mengambil sikap karena itu adalah manifestasi dari sikap pengecut dan oportunis.

Dengan adanya transisi Aswaja dari madzhab menjadi Manhaj Al-Fikri sebenarnya memberikan udara segar bagi kita mengapa? Karena dengan demikian nantinya kita akan dapat menghasilkan pandangan-pandangan yang tentu relevan dengan keadaan yang sedang kita alami pada masa sekarang, bukan hanya itu hal ini membuka pintu kretivitas umat. Tapi perlu kita sadari dengan adanya transisi ini, kita dituntut untuk lebih giat, termotivasi dalam usaha kita tafaquh fi al-din, agar nantinya apa yang kita hasilkan benar-benar membawa kemashlahatan bagi umat.

D. ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL FIKR & TRANSFORMASI SOSIAL

Sebagai upaya ‘kontektualisasi’ dan aktualisasi aswaja tersebut, rupanya perlu bagi PMII untuk melakukan pemahaman metodologis dalam menyentuh dan mencoba mengambil atau menempatkan Aswaja sebagai ‘sudut pandang / perspektif’ dalam rangka membaca realiatas Ketuhanan, realitas manusia dan kemanusiaan serta realitas alam semesta. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu , Aswaja sebaga Manhajul Fikri harus bisa menjadi ’busur’ yang bisa

menjawab berbagai macam realitas tersebut sebagai upaya mengkontekstualisasikan ajaran Islam sehingga benar-benar bisa membawa ***Islam sebagai rohmatan Lil Alamin, dengan tetap memegang 4 prinsip dasar Aswaja , yaitu :***

1. Tawwasuth (Moderat)

Tawassuth bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat, tidak ekstrim (baik ke kanan maupun ke kiri), tetapi memiliki sikap dan pendirian.hal ini sesuai dengan sabda Nabi muhammad SAW bahwa Khairul umur awsathuha (Paling baiknya sesuatu adalah pertengahannya). Tawassuth merupakan nilai yang mengatur pola pikir, yaitu bagaimana seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita. Dalam rentang sejarah, kita menemukan bahwa nilai ini mewujud dalam pemikiran para imam yang telah disebut di atas.

Di bidang aqidah atau teologi, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi hadir sebagai dua pemikir yang tawassuth. Di satu sisi mereka berusaha untuk menghindari pemikiran Mu'tazilah yang terlalu rasional dan memuja-muja kebebasan berpikir sehingga menomorduakan al-quran dan sunnah rasul. Tetapi di sisi lain beliau tidak sepakat dengan golongan Salafi yang sama sekali tidak memberi tempat bagi akal dan memaknai al-quran dan hadits secara tekstual. Mereka berusaha menggabungkan dua pendekatan itu dan kemudian melahirkan dua konsep teologi yang saling melengkapi.

Di bidang fiqih atau hukum Islam kita juga mendapatkan Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sebagai para pemikir yang moderat. Mereka berempat dengan ciri khasnya masing-masing membangun konsep fiqih Islam yang di dasarkan kepada Al-quran dan hadits, namun

pemahamannya tidak terjebak kepada fiqh yang terlalu bersandar kepada tradisi ataupun kepada rasionalitas akal belaka.

Di bidang tasawuf Al-Junaid tampil dengan pemikiran tasawuf yang berusaha mencari sinergitas antara kelompok falsafi dengan konservatif. beliau berhasil melahirkan konsep tasawuf sunni yang menjadikan taqwa (syari'ah) sebagai jalan utama menuju haqiqah. Dengan demikian, beliau berhasil mengangkat citra tasawuf yang waktu itu dianggap sebagai ajaran sesat sebab terlalu menyandarkan diri kepada filsafat Yunani dan tidak lagi mematuhi rambu-rambu syari'ah, seperti ajaran sufi Al-Hallaj. Apa yang dilakukan oleh al-Junaid sama dengan Wali Sanga pada masa awal Islam di Jawa ketika menolak ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar.

Dalam sejarah filsafat Islam pun kita mendapatkan seorang Al-Ghazali yang mampu mempertemukan antara konsep-konsep filosofis dengan al-quran dan hadits. Dia terlebih dahulu mementahkan teori-teori filsafat yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam seperti Ikhwan al-Shafa. Kemudian menjadikan nilai-nilai al-quran dan hadits sebagai pemandu pemikiran filosofis. Bukan filsafat yang ditolak Al-Ghazali, melainkan silogisme– silogisme filosofis yang bertentangan dengan al-quran dan hadits.

2. Tasammuh (Toleran)

Pengertian tasamuh adalah toleran. Sebuah pola sikap yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagaimana kita harus bersikap dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesadaran akan pluralisme atau keragaman, yang saling melengkapi bukan membawa kepada perpecahan.

Kita bisa menengok sejarah, bagaimana sikap para imam yang telah disebutkan di atas terhadap para penentang dan ulama-ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Para Imam tidak pernah menyerukan pelaknatan dan pengadilan kepada mereka, selama ajaran mereka tidak mengancam eksistensi agama Islam. Lihat pula bagaimana sikap Wali Sanga terhadap umat beragama lain (Hindu-Budha) yang sudah lebih dulu ada di Jawa. Yang terpenting bagi mereka adalah menciptakan stabilitas masyarakat yang dipenuhi oleh kerukunan, sikap saling menghargai, dan hormat-menghormati.

Di wilayah kebudayaan, kita bisa menengok bagaimana Wali Sanga mampu menyikapi perbedaan ras, suku, adat istiadat, dan bahasa sebagai élan dinamis bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perbedaan itu berhasil direkatkan oleh sebuah cita-cita bersama untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, keanekaragaman saling melengkapi, Unity in plurality.

3. Tawwazun (Seimbang)

Tawazun berarti keseimbangan dalam pola hubungan atau relasi baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antara Negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dan alam. Keseimbangan di sini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah, tidak menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan hidup.

Dalam ranah sosial yang ditekankan adalah egalitarianisme (persamaan derajat) seluruh umat manusia. Tidak ada yang merasa lebih dari yang lain, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Tidak ada dominasi dan eksploitasi seseorang kepada orang lain, termasuk laki-laki terhadap perempuan . Maka kita

lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW dan khulafaurrasyidun dengan tegas menolak dan berusaha menghapus perbudakan. Bagitu juga, sikap NU yang dengan tegas menentang penjajahan dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia.

Dalam wilayah politik, tawazun meniscayakan keseimbangan antara posisi Negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, menutup kran demokrasi, dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi segala peraturan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kita lihat bagaimana sikap Ahmad bin Hanbal kepada AlMakmun yang menindas para ulama yang menolak doktrin mu'tazilah. Dia membangun basis perlawanan kerakyatan untuk menolak setiap bentuk pemaksaan Negara, walaupun dia dan para ulama yang lain harus menahan penderitaan dan hukuman yang menyakitkan. Namun kita juga bisa melihat contoh lain sikap seorang al-Ghazali terhadap pemimpin yang adil bernama Nizam al-Muluk. Dia ikut berperan aktif dalam mendukung setiap program pemerintahan, memberi masukan atau kritik, dan hubungan yang mesra antara ulama' dan umara' pun tercipta. Kita juga bisa membandingkannya dengan posisi Wali Sanga sebagai penasehat, pengawas dan pengontrol kerajaan Demak.

Dalam wilayah ekonomi, tawazun meniscayakan pembangunan sistem ekonomi yang seimbang antara posisi Negara, pasar dan masyarakat. Kita melihat bagaimana Umar bin Abdul Azis mampu membangun ekonomi Islam yang kokoh dengan menyeimbangkan fungsi Negara (baitul mal) sebagai pengatur sirkulasi keuangan dan pendistribusian zakat; Mewajibkan setiap pengusaha, pedagang, dan pendistribusi jasa (pasar) untuk mengeluarkan zakat sebagai kontrol terhadap kekayaan individu dan melarang setiap bentuk monopoli; Serta menyalurkan zakat

kepada rakyat yang tidak mampu sebagai modal usaha dan investasi. Sehingga dalam waktu tiga tahun saja telah terbangun struktur ekonomi yang stabil dan kesejahteraan hidup terjamin. Dalam wilayah ekologi, tawazun meniscayakan pemanfaatan alam yang tidak eksploitatif (israf) dan merusak lingkungan. Banyak contoh dalam sejarah yang menunjukkan sikap ramah terrhadap lingkungan. Larangan menebang pohon waktu berperang misalkan, atau anjuran untuk reboisasi (penghijauan) hutan. Begitu juga ketika para intelektual muslim semacam al-Khawarizmi, al-Biruni, dan yang lain menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan lahan penelitian ilmu pengetahuan.

4. Ta'addul (Adil)

Yang dimaksud dengan ta'adul adalah keadilan, yang merupakan pola integral dari tawassuth, tasamuh, dan tawazun. Keadilan inilah yang merupakan ajaran universal Aswaja. Setiap pemikiran, sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan nilai ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sosial. Yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagaimana Nabi Muhammad mampu mewujudkannya dalam masyarakat Madinah. Bagitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundamen bagi peradaban Islam yang agung.

E. AHLU SUNNAH WAL JAMA'H SEBAGAI GERAKAN (HAROKAH)

1. Perspektif Sosial Ekonomi

Menyangkut bagaimana Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah dikerangkakan sebagai alat baca, perlu kiranya kita mulai pembacaan dan identifikasi persoalan yang dilanjutkan dengan perumusan kerangka teoritis dengan dilengkapi kerangka tawaran langkah-langkah yang akan kita ambil baik strategis maupun taktis.

Pertama, perlunya pembacaan yang cukup cermat atas realitas sosial ekonomi Indonesia. Ini diperlukan terutama untuk mengurai lapis-lapis persoalan yang ada dan melingkupi kehidupan sosial-ekonomi kita. Di antara beberapa persoalan yang harus kita dekati dalam konteks ini adalah; Pertama, fenomena kapitalisme global yang termanifestasikan melalui keberadaan WTO, world bank dan juga International Monetery Fund (IMF), serta institusi-institusi pendukungnya. Kedua, semakin menguatnya institusi-institusi ekonmi kepanjangan tangan kekuatan global tersebut di dalam negeri. Kekuatan-kekuatan tersebut memanifest melalui kekuatan bisnis modal dalam negeri yang berkolaborasi dengan kekutaan ekonomi global, ataupun melalui TNC atau MNC. Ketiga, liberalisasi barang dan jasa yang sangat berdampak pada regulasi barang dan jasa ekspor -impor.

Fenomena pertama berjalan dengan kebutuhan pasar dalam negeri yang sedang mengalami kelesuan investasi dan kemudian mendorong pemerintah untuk mengajukan proposal kredit kepada IMF dan WB. Pengajuan kredit tersebut membawa konsekuensi yang cukup signifikan karena Indonesia semakin terintegrasi dengan ekonomi global. Hal ini secara praktis menjadikan Indonesia

harus tunduk pada berbagai klausul dan aturan yang digariskan baik oleh WB maupun IMF sebagai persyaratan pencairan kredit. Dan aturan-aturan itulah yang kemudian kita kenal dengan structural adjustment program (SAP), yang antara lain berwujud pada; Pertama, pengurangan belanja untuk pembiayaan dalam negeri yang akan berakibat pada pemotongan subsidi masyarakat. Kedua, dinaikkannya pajak untuk menutupi kekurangan pembiayaan akibat diketatkan APBN. Ketiga, peningkatan suku bunga perbankan untuk menekan laju inflasi. Keempat, liberalisasi pasar yang berakibat pada terjadinya konsentrasi penguasaan modal pada segelontir orang dan liberalisasi perdagangan yang mengakibatakan munculnya penguasaan sektor industri oleh kelompok yang terbatas. Kelima, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berakibat pada penguasaan asst-aset BUMN oleh para pemilik asing. Keenam, restrukturisasi kelayakan usaha yang mengakibatkan munculnya standar usaha yang akan mempersulit para pelaku usaha menengah dan kecil.

Karakter umum liberalisasi yang lebih memberikan kemudahan bagi arus masuk barang dan jasa (termasuk invesasi asing) dari luar negeri pada gilirannya akan mengakibatkan lemahnya produksi domestic karena harus bersaing dengan produk barang dan jasa luar negeri. Sementara di level kebijakan pemerintah semakin tidak diberi kewenangan untuk mempengaruhi regulasi ekonomi yang telah diambil alih sepenuhnya oleh pasar. Sebuah ciri dasar dari formasi sosial neo-liberal yang menempatkan pasar sebagai aktor utama. Sehingga pengelolaan ekonomi selanjutnya tunduk pada mekanisme pasar yang float dan fluktuatif.

Implikasi yang muncul dari pelaksanaan SAP ini pada sektor ekonomi basis (petani, peternak, buruh, dan lain sebagainya) adalah terjadinya pemiskinan sebagai akibat kesulitan-kesulitan stuktural yang mereka hadapi akibatnya

menguntungkan investor asing. Terlebih ketika sektor ekonomi memperkenalkan istilah foreign direct investment (FDI) yang membawa arus deras investor asing masuk ke Indonesia secara langsung. Derasnya arus investasi yang difasilitasi oleh berbagai kebijakan tersebut pada gilirannya akan melemahkan para pelaku usaha kecil dan menengah.

Dari akumulasi berbagai persoalan tersebut, ada beberapa garis besar catatan kita atas realitas sosial-ekonomi; Pertama, tidak adanya keberpihakan Negara kepada rakyat. Ini bisa kita tengarai dengan keberpihakan yang begitu besar terhadap kekeutan-kekuatan modal internasional yang pada satu segi berimbas pada marjinalisasi besar-besaran terhadap kepentingan umat. Terhadap persoalan tersebut kita perlu mengerangkan sebuah model pengukuran pemihakan kebijakan. Dalam khazanah klasik kita mengenal satu kaidah yang menyatakan bahwa kebijakan seorang imam harus senantiasa mengarah kepada tercapainya kemaslahatan umat (Tasarruf al-Imam ‘ala al-Raiyati manuntun bi al-Maslahah).

Kedua, tidak terwujudnya keadilan ekonomi secara luas. Arus investasi yang mendorong laju industrialisasi pada satu segi memang positif dalam hal mampu menyerap tenaga kerja dalam negeri. Namun pada segi yang lain menempatkan pekrja pada sebagi pihak yang sangat dirugikan. Dalam point ini kita menemukan tidak adanya keseimbngan distribusi hasil antara pihak investor dengan tenaga kerja. investor selalu berada dalam posisi yang diuntungkan, sementara pekerja selalu dalam posisi yang dirugiakn. Sebuah kondisi yang akan mendorong terjadinya konglomerasi secara besar-besaran. Sehingga diperlukan pemikiran untuk menawarkan jalan penyelesaian melalui apa yang kita kenal dengan profit sharing. Yang dalam khazanah klasik kita kenal dengan mudharabah ataupun mukhabarah. Sehingga secara opertif pemodal dan pekerja terikat satu

hubungan yang saling menguntungkan dan selanjutnya berakibat pada produktifitaas kerja.

Ketiga, pemberian reward kepada pekerja tidak bisa menjawab kebutuhan yang ditanggung oleh pekerja. Standarisasi Upah Minimum Regional (UMR) sangat mungkin dimanipulasi oleh perusahaan dan segi tertentu mengkebiri hak-hak pekerja. Ini terjadi karena hanya didasarkan pada nilai nominal dan bukan kontribusi dalam proses produksi. Dalam persoalan ini kita ingin menawarkan modal manajemen upah yang didasarkan pada prosentasi kontribusi yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan ataupun proses produksi secara umum. Standarisasi yang kita sebut dengan UPH (upah prosentasi hasil) pada seluruh sektor ekonomi. Salah satu pertimbangan usulan ini adalah kaidah atau sebuah ayat bahwa harus ada distribusi kekayaan dalam tubuh umat itu secara adil dan merata untuk mencegah adanya konglomerasi ekonomi.

Keempat, tidak adanya perlindungan hukum terhadap pekerja. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kasus Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Ataupun contoh lain yang mengindikasikan satu kecenderungan bahwa kebijakan-kebijakan Negara lebih banyak diorientasikan semata untuk menarik investasi sebesar-besarnya tanpa pernah memikirkan implikasi yang akan muncul dilapangan. Termasuk potensi dirugikannya masyarakat baik secara ekologis (lingkungan dalam kaitannya dengan limbah industri), ekonomis (tidak berimbangnya penghasilan dengan daya beli), ataupun secara geografis (dalam hal semakin berkurangnya lahan pertanian ataupun perkebunan). Hampir tidak ada klausul level ini kita menuntut pemberlakuan undang-undang pasal 28 b UUD 1945 serta perlakuan perlindungan hak pekerja

yang dicetuskan kepada konferensi International Labour Organization (ILO) yang merupakan wadah untuk menampung Issue buruh Internasional di bawah PBB.

Kelima, perlunya masyaraakat dilibatkan dalam pembicaraan mengenai hal-hal penting berkaitan dengan pembuatan rencana kebijakn investasi dan kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan secara langsung dengan hajat hidup orang banyak. Ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi resistan yang ada dalam masyarakat termasuk scenario plan dari setiap kebijakan. Berkaitan dengan ini smapai di level kabupaten/kotamadya bahkan tingkat desa masih terdapat ketidakadilan informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat hampir-hampir tidak mengetahui apa yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah di wilayah mereka. Kondisi demikian pada banyak level akan merugikan masyarakat yang seharusnya mengetahui informasi-informasi tersebut secara merata.

Hal lain yang juga menyangkut persoalan ekonomi adalah perlunya elaborasi atas rujukan-rujukan fiqhiyah (termasuk ushul fiqh) bagi kerangka-kerangka operasional Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah sebagai manhaj al-fikr. Kebutuhan akan elaborasi ini dirasa sangat mendadak, terutama mengingat adanya kebingungan di beberapa tempat menyangkut ideologi dasar PMII dan kerangka paradigmanya terlebih jika dikaitkan dengan kemapuan Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah untuk menyediakan kerangka operatif yang akan memandu kader-kader PMII dilapangan masing-masing.

Pembicaraan mengenai berbagai persoalan tersebut mengantar kita untuk menawarkan langkah praktis berupa kerangka pengembangan ekonomi yang kemudian kita sebut sebagai konsep ekonomi bedikari. Konsep ini secara umum bisa kita definisikan sebagai konepsi pengelolaan ekonomi yang dibangun di atas kemampuan kita sebagai sebuah Negara.untuk mendukung tawaran tersebut, lima

langkah stategis kita usulkan; Pertama, adanya penyadaran terhadap masyarakat tentang struktur penindasan yang terjadi. Kedua, penghentian hutang luar negeri. Ketiga, adanya internalisasi ekonomi Negara. Keempat, pemberlakuan ekonomi political dumping. Kelima, maksimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan pemanfaatan tekhnologi berbasis masyarakat lokal (society-based technology).

Secara taktis langkah yang kita tawarkan yaitu: Pertama, perlunya sosialisasi atau kampanye tentang struktur penindasan yang terjadi pada masyarakat. Kedua, advokasi kepada masyarakat. Ketiga, perlunya penegasan pembenahan pertanggungjawaban pengelolaan hutang luar negeri langsung kepada presiden ketika meletakkan jabatan. Keempat, penggunaan dan maksimalisasi seluruh resources dalam negeri (sumber daya alam, pemanfaatan SDM, kultur dan juga pengetahuan). Kelima, nasionalisasi tekhnologi internasional.

2. Prespektif Sosial Politik, Hukum dan HAM

Akar permasalahan sosial, politik, hukum dan HAM terletak pada masalah kebijakan (policy). Satu kebijakan seyogyanya berdiri seimbang di tengah relasi "saling sadar" antara pemerintah, masyarakat dan pasar. Tidak mungkin membayangkan satu kebijakan hanya menekan aspek kepentingan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Dalam satu kebijakan harus senantiasa melihat dinamika yang bergerak di orbit pasar. Dalam kasus yang lain tidak bias jika kemudian pemerintah hanya mempertimbangkan selera pasar tanpa melibatkan masyarakat didalamnya.

Persoalan muncul ketika: *Pertama*, kebijakan dalam tahap perencanaan, penetapan, dan pelaksanaannya seringkali monopoli oleh pemerintah. Dan selama

ini kita melihat sedikit sekali preseden yang menunjukan keseriusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat. *Kedua*, kecendrungan pemerintah untuk selalu tunduk kepada kepentingan pasar, sehingga pada beberapa segi seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat. Kedua kondisi tersebut jika dibiarkan akan menggiring masyarakat pada posisi yang selalu dikorbankan atas nama kepentingan pemerintah dan selera pasar. Dan akan menciptakan kondisi yang memfasilitasi tumbuhnya dominasi dan bahkan otoritarianisme baru.

Kecendrungan demikian pada beberapa segi mewakili kepentingan untuk melakukan sentralisasi kekuasaan yang akan mengakibatkan munculnya kembali kedzaliman, ketidakadilan, dan ketidaksejahteraan. Dalam realitas demikian harus dilakukan desentralisasi sebagai memecah konsentrasi kekuasaan oleh satu pihak secara dominan. Yakni upaya balancing of power, yang diorientasikan untuk mendorong terjadinya perimbangan kekuatan, baik kekuatan masyarakat sipil, kekuatan pasar maupun kekuatan pemerintah. Bagaimana kemudian PMII merumuskan strategi gerakannya dalam menyikapi kondisi demikian, adalah pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan. Ini diperlukan terutama untuk memberikan panduan bagi kolektivitas gerakan kader PMII. Selama ini, PMII sebagai organisasi pergerakan masih bergerak di tempat, oleh karena itu ke depan perlu adanya strategi gerakan PMII untuk menyikapi itu.

Strategi gerakan PMII seharusnya mencakup dua aspek, yaitu *internal* dan *eksternal*. Strategi *pertama*, yaitu melakukan penguatan internal PMII yang meliputi strategi perjuangan, membangun pandangan hidup, dan pegangan hidup. Sehingga, PMII diharapakan memiliki daya dobrak terhadap kekuatan-kekuatan dominan dan otoriter. Yang kedua, aspek eksternal. PMII harus melakuakan penyegaran terhadap masyarakat bawah atau sipil atas ketertindasannya dari

kekuatan dominan. Dan selanjutnya adalah PMII harus bisa mengupayakan atau menembus infra struktural terutama dalam persoalan media, karena selama ini masih kalah dengan “Inul”. PMII harus bisa melakukan bargaining power dengan pemerintah melalui jalan struktural, termasuk melakuakan gerakan empowering civil society.

Kemudian kaitannya dengan Ahlussunnah wal Jama’ah yang juga menjadi nilai dasar (NDP) PMII, dimana substansinya adalah jalan tengah, maka sudah sepatutnya bahwa PMII memposisikan diri di tengah untuk mencari titik temu sebagai solusi. Dengan sikap seperti itu, PMII mengikuti nilai Ahlussunnah wal Jama’ah. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah seperti tawazun, akan dapat melahirkan nilai Ahlussunnah wal Jama’ah yang ta’adul. Dalam hal ini, yang menjadi titik tekan adalah dengan strategi dapat meruntuhkan kekuasaan dominan dan otoriter yang pada akhirnya bermuara menjadi gerakan revolusiner.

Jika demikian, PMII harus menjawab pertanyaan tersebut. Kalaupun harus, maka cara revolusioner itu ditempuh sebagai langkah terakhir. Maka yang harus dilakukan PMII adalah gerakan revolusi dengan maksud merubah tatanan, tapi bukan sengaja membuat kekerasan untuk menuju tatanan yang lebih baik dengan alasan kemaslahatan. Ketika pemerintah itu otoriter, jelas tidak selaras dengan nilai-nilai dalam PMII, tasharrufal-al-imam manutun ‘ala raiyyati kaitannya dengan kulluklum ra’in wa kullukum mas’ulunan raiyytih. Meski disadari, memperbaiki tatanan merupakan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi tatanan tersebut bersifat otoriter. Sudah sepatutnya PMII bergerak merubahnya. Upaya serius menstransformasikan nilai-nilai Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah sebagai salah satu sistem nilai yang terpatri menjadi ideologi pergerakan PMII adalah mendesak, termasuk dalam menata ulang kondisi sosial politik yang amburadul.

Sekali lagi, cara revolusioner merupakan langkah akhir . ketika ada alternatif lain win win solution atau ishlah bisa ditawarkan, maka cara revolusioner meski dihindarkan. Saat ini kondisi sosial politik Indonesia mengalami degradasi luar biasa. Ada empat variabel yang dapat membantu mencari akar persoalan.

Pertama, Negara dan pemerintahan. Dalam hal ini belum mampu menjawab tuntutan masyarakat kelas bawah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sebtulnya tidak berpihak pada rakyat, seperti adanya kenaikan harga-harga, merupakan salah satu pemicu munculnya ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Kedua, militer. Pada dasarnya adanya militer adalah karena untuk mengamankan Negara dari ancaman, bukan malah mengancam. Selama 32 tahun masyarakat Indonesia mempunyai pengalaman pahit dengan perlakuan-perlakuan militer. Meski, dalam hal tersebut harus ada pemilihan, secara institusional, institusi dan secara personal. Keinginan menjadikan militer professional merupakan cerminan adanya keinginan militer untuk berubah lebih baik. Namun, penegasan dan upaya ke arah professionalitas militer masih belum cukup signifikan dan menampakkan hasil. Peran militer terutama pada wilayah sosial politik menjadi cataan tersendiri yang harus dikontrol. Bukan berarti mengeliminir hak-hak militer sebagai salah satu komponen Negara yang juga berhak mengapresiasikan kehendaknya. Tetapi karena menyadari betul, militer sangat dibutuhkan pada wilayah dan pertahanan Negara, maka tidak seharusnya menarik-narik militer ke medan politik yang jelas-jelas bukanlah arena militer.

Ketiga, kalangan sipil. Ironisnya, ketika ada keinginan membangun tatanan civil society, yang arahnya ingin membangun supermasi sipil, namun

kenyataannya kalangan sipil terutama politisi sipil acapkali mengusung urusan Negara (pemerintahan) serta militer ke wilayah politik yang lebih luas. Sehingga yang terjadi adalah ketidakjelasan peran dan fungsi masing-masing.

Fungsi dan peran (pemerintahan) adalah sebagai penyelenggara bukanlah sebagai penguasa tunggal. Oleh karena itu Negara selalu dikontrol. Namun contoh yang semestinya berasal dari masyarakat ataupun kalangan poitisi yang mewakili di parleman kecendrungannya seperti dijelaskan sebelumnya, menyeret-nyeret dan seringkali mencampuradukkan urusan pemerintah dan militer ke dalam wilayaah politik. Oleh karena itu dari ketiga variabel tersebut pada kondisi kekinian yang ada, perlu penegasan dan penjelasan terhadap peran dan fungsi serta posisinya masing-masing. Terutama bagi kalangan sipil yang tereduksi menjadi kalangan politisi untuk tidak membawa kepentingan-kepentingan politiknya memasuki arena lain. Jika itu tetap berlangsung (ketidakjelasan peran dan fungsi Negara, militer dan parlemen atau parpol bahkan lembaga peradilan) maka niscaya ketidakpercayaan rakyat semakin mengkristal terhadap semua institusi tersebut.

Pada fase itu, rakyat dapat dikatakan tidak lagi membutuhkan perangkat-pernagkat seperti Negara, militer, parlemen atau parpol, dan lembaga peradilan. Realitas seperti itu dapat kita saksikan sampai hari ini. Meski telah bebrapa kali berganti kepemimpinan nasional, ternyata masalah yang timbul lebih banyak, sementara persoalan-persoalan yang lama juga belum teratasi. Oleh karena itu, menata ulang tatanan Indonesia hari ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan perlu kerjasama tanpa ada campur aduk antar fungsi masing-masing.

3. Presfektif Sosial Budaya

Persoalan social-budaya di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan; Pertama, analisa terhadap kondisi social budaya masyarakat, baik pada tingkatan lokal atau pada tingkat global. Kedua, analisa nilai-nilai budaya yang kemudian didalamnya terdapat nilai-nilai ke-Ahlussunnah wal Jama'ah-an sebagai nilai yang terpatri untuk melakukan perubahan ketika kondisi sosial budaya menjadi dasar pijakan. Dari itu semua, pembentukan karakter budaya menjadi tujuan akhirnya.

Ahlussunnah wal Jama'ah dalam konteks sosial budaya dijadikan nilai-nilai yang kemudian menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial budaya. Eksplorasi terhadap permasalahan lokal maupun global merupakan cara untuk mengetahui akar persoalan sosial budaya yang terjadi. Bahwa pada kenyataannya globalisasi ternyata mengikis budaya lokal didalam seluruh aspek kehidupan. Globalisasi tanpa kita sadari telah merusak begitu dalam sehingga mengaburkan tata sosial budaya Indonesia. Ironsnya, masyarkat menikmati produk-produk globalisasi sementara produk lokal menjadi teralienasi.

Permasalahan lain adalah adanya dominasi dari satu masyarakat, dalam hal ini adalah budaya dominan atas masyarakat yang memilki budaya minor. Hal ini merupakan satu pergeseran nilai akibat pengaruh sosial budaya masyarkat global yang global yang cenderung matrealistis dan hedonis, sehingga yang terjadi berikutnya adalah demoralisasi bukan hanya dimasyarakat, tetapi juga sudah merambah ditingkat penyelenggara Negara, poloitisi, militer, bahkan peradilan. Maka sebetulnya dalam konteks ini, kapitalisme atau globalisasi telah melakukan hegemoni terhadap kita. Perubahan global yang datang bertubi-tubi lewat media informasi menyebabkan relatifisme pemahaman terutama pemahaman keagamaan.

Mental inferor dari Negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia akan suit hilang karena sejalan dengan keinginan menjadi superior dari Negara-negara maju.

Berangkat dari kondisi tersebut, perlu adanya strategi budaya untuk melakukan perlawanaan ketika hegemoni kapitalisme global semakn “menggila”. Salah satu straegi itu mnejadikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai dasar strategi gerakan. Strategi yang dimaksud bisa dalam bentuk penguatan budaya-budaya lokal.

Dalam konteks sosial budaya, posisi Negara dengan masyarakat bukanlah *vis a vis* tetapi sebagaimana Negara, pasar dan globalisasi secara umum dapat sejajar. Terkait denga itu, PMII harus dapat menjembatani keinginan-keinginan masyarakat terhadap Negara agar kebijakan-kebijakan Negara tidak lagi merugikan masyarakat dan tidak lagi menguntungkan kapitalis global.

PMII harus secara tegas mengambil posisi ini untuk membantu mengantisipasi dampak ekonomi pasar dan globalisasi terhadap masyarakat.

Terutama untuk penerjemahan kebijakan Negara, kebijakan ekonomi pasar kemudian globalisasi secara umum yang berdampak pada pihak local yang sebetulnya menjadi sasaran distribusi barang. Juga mempengaruhi budaya. Disisnilah peran PMII dengan seperangkat nilai-nilai idealnya seperti tawazun,tasamuh dan ta’adul menjadi dasar guna menjembatani kesenjangan antara wilayah internal masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal itu maka pilihan agregasi PMII harus senantiasa diorientasikan untuk mengerangkakan formulasi rekayasa sosial yang diabdiakn sebesar-besarnya bagi pemberdayaan masyarakat dihadapan Negara maupun pasar. Sehingga dapat tercipta perimbangan kekuatan yang akan memungkinkan

terbentuknya satu tatanan masyarakat yang relasional-partisipatif antara Negara, pasar, PMII dan masyarakat, dimana PMII dengan masyarakat merupakan kesatuan antara system dengan subsisitem yang mencoba menjembatani masyarakat, Negara dan pasar. PMII dengan demikian berdiri dalam gerak transformasi harapan dan kebuthan masyarakat dihadapan Negara dan pasar.

F. PRINSIP ASWAJA SEBAGAI MANHAJ

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.

1. AQIDAH

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah *Ahlussunnah wal-Jama'ah* di antaranya Pilar *pertama* adalah aqidah *Uluhiyyah* (Ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT.

Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai Esksitensi sifat dan asma Allah SWT. Dimana terjadi diskursus terkait masalah apakah Asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (*ism*) bukanlan yang dinamai *(musamma)*, Sifat bukanlah yang disifati (*mausuf*), sifat bukanlah *dzat*. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (*Asma'*) Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya.

Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap Muslim

bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan semesta alam. Ia Esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang *kedua* adalah *Nubuwwat*, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rosul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam doktrin *Nubuwwat* ini, ummat manusia harus meyakini dengan sepebuhnya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa *risalah* (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang *ketiga* adalah *Al-Ma'ad*, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (*yaumul jaza'*). Dan mereka semua akan dihitung (*hisab*) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

2. BIDANG SOSIAL POLITIK

Berbeda dengan golongan *Syi'ah* yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara *(imamah)*, Ahlussunnah wal-jama'ah dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif *(fardhu kifayah)*. Pandangan *Syi'ah* tersebut juga berbeda dengan golongan *Khawarij* yang membolehkan komunitas berdiri tanpa *imamah* apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi *ahlussunnah wal jama'ah*, negara merupakan alat untuk

mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama *(mashlahah musytarakah)*.

Ahlussunnah wal-Jama'ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

a. Prinsip Syura (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut:

"Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri) .QS Al-Syura, 42: 36-39(

b. Prinsip Al-'Adl *(Keadilan)*

Keadilan adalah salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS An-Nisa, 4: 58(

c. Prinsip Al-Hurriyyah *(kebebasan)*

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari'ah dikenal dengan *Al-Ushulul-Khams* (prinsip yang lima), yaitu:

- *Hifzhu al-Nafs* (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
- *Hifzhu al-Din* (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan Kepercayaannya. Negara tidak berhak

memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.

- *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
- *Hifzhu al-Nasl*; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. *Hifzhu al-Nasl* berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
- *Hifzh al-'Irdh;* jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushulul Khams identik dengan konsep Hak Azazi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern – bahkan mungkin di kalangan *ahlussunnah wal-jama'ah*. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran baku bagi legitimasi sebuah kepemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak kemudian hari.

d. Prinsip Al-Musawah *(Kesetaraan Derajat)*

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan mausia lain, bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujuraat disebutkan:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujuraat, 49: 13(

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang Dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian disebutkan dalam surat Al-Ma'idah.

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Al-Maidah; 5: 48(

Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk mengayomi, melayani dan menjamin kemashlahatan bersama, dan tidak ada *privilege* (keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin Negara Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Khilafah Islamiyah bagi Ahlussunnah wal-Jama'ah. Sebagaimana pun tidak didapati perintah dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan – baik negara maupun kerajaan – harus mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

3. BIDANG ISTINBATH AL-HUKM *(Pengambilan Hukum Syari'ah)*

Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu:

4. Al-Qur'an
5. As-Sunnah
6. Ijma'
7. Qiyas

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum *(istinbath al-hukm)* tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum *naqli* posisinya tidak diragukan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam.

Sementara As-Sunnah meliputi al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para Shabat dan Tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses *istinbath al-hukm* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an.

As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus *(mutawatir),* terkenal *(masyhur)* ataupun terisolir *(ahad).* Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh *Ijma' Shahabah*.

Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Ijma'* adalah *Kesepakatan kelompok legislatif (ahl al-halli wa al-aqdi) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari ummat Muhammada pada*

suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.

Dalam Al-Qur'an dasar *Ijma'* terdapat dalam QS An-Nisa', 4: 115 *"Dan barang siapa menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."* Dan *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.."* QS Al-Baqarah, 2: 143.

Qiyas, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil *ijtihad* para Ulama. *Qiyas* yaitu mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum. *Qiyas* sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi'i.

4. TASAWUF

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan "Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; *Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apa pun."*

Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan *"Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah…* Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola

hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah.”

“berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun” kata Imam Al-Junaid, lalu *“menyucikan hati dari apa saja selain Allah.... Mereka* (kaum Sufi) *telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah..,”* kata Imam Al-Ghazali. Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya.

Ketidakterikatan kepada apapun selain Allah SWT adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan kita di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. *Zuhud* harus dimaknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa? karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai Hamba dan fungsinya sebagai Khalifah harus diwujudkan.

Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah zuhud namun juga sukses dalam ukuran duniawi. Kita lihat saja Imam Al-Junaid adalah adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar Ibn Abd Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pemimpin negara, Abu Sa’id Al Kharraj sukses sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzily sukses sebagai petani, dan Fariduddin al-Atthar sukses sebagai pengusaha parfum. Mereka adalah sufi yang pada maqomnya tidak

lagi terikat dengan urusan duniawi tanpa meninggalkan urusan duniawi.

Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut pada urusan lain seperti politik. Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial dan budaya. Dalam Tasawuf urusan-urusan tersebut tidak harus ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah zuhud kita maknai, yakni zuhud di dalam batin sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.

G. SEJARAH TEOLOGI ISLAM

Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran Islam di Makkah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Sistem pemerintahan kala itu dijalankan melalui majelis yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala suku yang dipilih menurut kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat.

Tetapi, pada saat Nabi SAW diangkat sebagai pemimpin, beliau mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok pedagang yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga kepentingan bisnisnya. Akhirnya, Nabi SAW bersama para pengikutnya terpaksa meninggalkan Makkah dan pergi (hijrah) ke Yatsrib (sekarang bernama Madinah) pada tahun 622 M.

Ketika masih di Makkah, Nabi SAW hanya menjadi pemimpin agama. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memegang fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Di sinilah awal mula terbentuk sistem pemerintahan Islam pertama, yakni dengan berdirinya negara Islam Madinah.

Ketika Nabi SAW wafat pada 632 M, daerah kekuasaan Madinah tak sebatas pada kota itu saja, tetapi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Negara Islam pada waktu itu, sebagaimana digambarkan oleh William Montgomery Watt dalam bukunya yang bertajuk Muhammad Prophet and Statesman, sudah merupakan komunitas berkumpulnya suku-suku bangsa Arab. Mereka menjalin persekutuan dengan Muhammad SAW dan masyarakat Madinah dalam berbagai bentuk.

Sepeninggal Nabi SAW inilah timbul persoalan di Madinah, yaitu siapa pengganti beliau untuk mengepalai negara yang baru lahir itu. Dari sinilah, mulai bermunculan berbagai pandangan umat Islam. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar as-Siddiq-lah yang disetujui oleh umat Islam ketika itu untuk menjadi pengganti Nabi SAW dalam mengepalai Madinah. Selanjutnya, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian, Umar digantikan oleh Usman bin Affan.

1. **Munculnya perselisihan**

Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat khilafah Islamiyah mengalami suksesi kepemimpinan dari Usman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali merupakan era kekacauan dan awal perpecahan di kalangan umat Islam. Namun, bibit-bibit perpecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Usman.

Di masa pemerintahan khalifah keempat ini, perang secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan para penentangnya. Peristiwa-peristiwa ini telah menyebabkan terkoyaknya persatuan dan kesatuan umat. Sejarah mencatat, paling tidak, dua perang besar pada masa ini, yaitu Perang Jamal (Perang Unta) yang terjadi antara Ali dan Aisyah yang dibantu Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah serta Perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan.

Faktor penyulut Perang Jamal ini disebabkan oleh yang Ali tidak mau menghukum para pembunuh Usman. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang dan menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair, dan Talhah. Zubair dan Talhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah.

Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ali semasa memerintah juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi--di masa pemerintahan Khalifah Usman yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan.

Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam, seperti Syiah, Khawarij, Murjiah, Muktazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunah wal Jamaah, Jabbariyah, dan Kadariah.Aliran-aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan (aspek sosial dan politik). Namun, dalam perkembangan

selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan.

"Kelompok khawarij yang akhirnya menjadi penentang Ali mengganganggap bahwa Ali tidak melaksanakan keputusan hukum bagi pihak yang memeranginya sebagaimana ajaran Alquran. Karena itu, mereka menunduh Ali kafir dan darahnya halal," kata guru besar filsafat Islam, Prof Dr Mulyadi Kartanegara, kepada Republika.

Sementara itu, kelompok yang mendukung Ali dan keturunannya (Syiah) melakukan pembelaan atas tuduhan itu. Dari sinilah, bermunculan berbagai macam aliran keagamaan dalam bidang teologi. Selain persoalan politik dan akidah (keimanan), muncul pula pandangan yang berbeda mengenai Alquran (makhluk atau kalamullah), qadha dan qadar, serta sebagainya.

2. **Sunni dan Syiah Dua Aliran Teologi yang Masih Bertahan**

Dari sekian banyak aliran kalam (teologi) yang berkembang di masa kejayaan peradaban Islam, seperti Syiah, Khawarij, Muktazilah, Murjiah, Kadariyah, Jabbariyah, Asy'ariyah, Maturudiyah, dan sebagainya, hingga saat ini hanya dua aliran yang masih memiliki banyak pengikut. Kedua aliran itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah (biasa disebut dengan kelompok Sunni) dan Syiah.

Penganut kedua paham ini tersebar di berbagai negara di dunia yang terdapat komunitas Muslim. Tak jarang, dalam satu negara Muslim, terdapat dua penganut aliran ini. Secara statistik, jumlah Muslim yang menganut paham Sunni jauh lebih banyak dibandingkan yang menganut paham Syiah. Wikipedia menyebutkan,

sekitar 90 persen umat Muslim di dunia merupakan kaum Sunni dan sekitar 10 persen menganut aliran Syiah.

Namun, sumber lain menyebutkan, paham Syiah dianut oleh sekitar 20 persen umat Islam. Sementara itu, penganut Islam Sunni diikuti lebih dari 70 persen. Rujukan lain menyebutkan, penganut Islam Sunni sebanyak 85 persen dan Syiah 15 persen.

Kendati jumlahnya tak lebih dari 20 persen, penganut Syiah ini tersebar hampir di seluruh dunia. Yang terbesar ada di Iran dan Irak, kemudian sedikit di Afghanistan, Pakistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, beberapa negara pecahan Uni Soviet, beberapa negara di Eropa, dan sebagian di Amerika Serikat.

Seperti halnya Syiah, paham Sunni juga dianut oleh umat Islam di negara-negara tersebut. Tetapi, itu dalam komposisi yang berbeda-beda antara satu negara dan negara yang lain. Paham Sunni dianut lebih banyak umat, termasuk di Indonesia.

Di Iran yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, 90 persen merupakan penganut Syiah dan hanya delapan persen yang menganut aliran Ahlusunah Waljamaah. Karena jumlahnya mayoritas, paham Syiah tidak hanya diperhitungkan sebagai aliran teologi, tetapi juga sebagai gerakan politik di Iran.

Di Irak, 60 persen penduduk Muslimnya menganut paham Syiah dan 40 persen merupakan Sunni. Namun, ada juga yang menyebutkan, penganut Islam Syiah di negeri 'Seribu Satu Malam' ini berkisar 60-65 persen dan penganut Suni 32-37 persen. Para penganut Syiah di Irak merupakan orang dari suku Arab. Sementara

itu, penganut Islam Sunni adalah mereka yang berasal dari suku Arab, Kurdi, dan Turkmen.

Di negara Muslim lainnya, seperti Afghanistan, jumlah Muslim Sunni mencapai 80 persen, Syiah 19 persen, dan penganut agama lainnya satu persen. Di Sudan, 70 persen penduduknya merupakan penganut Islam Sunni yang mayoritas bermukim di wilayah utara Sudan. Di Mesir, 90 persen penduduknya adalah penganut Islam yang mayoritas beraliran Suni. Sementara itu, sisanya menganut ajaran sufi lokal.

Sedangkan, masyarakat Muslim di Lebanon, selain menganut paham Sunni dan Syiah, juga menganut paham Druze. Namun, dari 59 persen penduduk Lebanon yang beragama Islam, tidak diketahui secara pasti berapa komposisi penganut paham Sunni, Syiah, dan Druze.

Berbagai sumber yang ada menyebutkan bahwa komunitas Suku Kurdi (kurang dari satu persen) yang bermukim di Lebanon, termasuk dalam kelompok Sunni. Jumlah mereka diperkirakan antara 75 ribu hingga 100 ribu orang. Selain itu, ada pula ribuan Suku Beduin Arab yang tinggal di wilayah Bekaa dan Wadi Khaled, yang semuanya itu menganut paham Sunni. Kendati demikian, di beberapa negara Muslim yang mayoritas menganut paham Sunni, seperti Indonesia dan Malaysia, penganut Syiah nyaris tidak diperhitungkan, baik sebagai aliran teologi maupun gerakan politik.

3. **Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah?**

Ketika membicarakan aliran-aliran teologi dalam Islam, ada sebuah hadis Nabi SAW yang selalu diutarakan, "Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu

di antaranya yang selamat, sedangkan lainnya menjadi golongan yang rusak. Beliau ditanya, siapa golongan yang selamat itu? Beliau menjawab Ahlus Sunnah wal Jama'ah." (Hadis riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ahmad).

Banyak ulama berpendapat, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti semua yang berasal dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, pengakuan, maupun hal-hal lain yang dikaitkan dengan pribadi Rasulullah SAW. Itu sebabnya aliran ini disebut juga Ahlul Hadis was Sunnah (golongan yang berpegang pada hadis dan sunah).

Siapa dan kelompok manakah yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Mayoritas umat Islam mengaku mempraktikkan sunah-sunah Nabi SAW, namun secara ideologi dan emosional terikat dengan aliran-aliran yang berbeda.Untuk menjawab pertanyaan di atas, secara definitif tidaklah mudah. Ada aspek-aspek yang mesti dilihat sebelum menggolongkan kelompok tertentu sebagai Ahlus Sunnah atau bukan. Aspek-aspek yang dimaksud adalah sejarah, sosial, budaya, dan politik.

Mengenai hal ini, ada beberapa alasan. Pertama, ajaran Islam mampu mengubah lingkungan sosial dan budaya yang berimplikasi pada perubahan pandangan hidup masyarakatnya. Kedua, dalam proses perubahan dari kondisi lama pada kondisi baru, terjadi penghayatan terhadap ajaran Islam yang dipengaruhi oleh keadaan sosial budaya setempat. Setiap masyarakat akan menghayati dan merespons ajaran Islam dengan cara yang berbeda karena mereka berada di suatu masa dan lingkungan yang tidak sama.

Itulah mengapa ada Asy'ariyah yang berkembang di Irak, Maturidiyah di Samarkand, dan Thohawiyah di Mesir. Ketiganya dianggap sebagai Ahlus Sunnah

wal Jama'ah. Pada awalnya, aliran-aliran tersebut muncul untuk merespons realitas yang sedang dihadapi umat Islam. Ketika itu, ide-ide yang ditawarkan ulama besar adalah cara pandang baru tentang kehidupan beragama, bukan menawarkan aliran teologi baru.

Sejarah mencatat, munculnya Asy'ariyah adalah respons terhadap kebijakan penguasa Dinasti Abbasiyah yang menjadikan Muktazilah sebagai aliran resmi pemerintah. Pengaruh paham Muktazilah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M), Al-Mu'tasim (218-228 H/833-842 M), dan Al-Wasiq (228-233 H/842-847 M).Muktazilah terkenal mengagungkan rasionalitas yang sulit diterima oleh masyarakat awam. Kemudian, Asy'ariyah muncul menawarkan cara pandang baru yang lebih sederhana dan membumi. Doktrin-doktrinnya didasarkan pada sunah-sunah Nabi SAW dan tradisi para sahabat.

Sebagai sebuah cara pandang, perbedaan dalam tubuh Asy'ariah pun muncul. Muhammad Tholhah Hasan dalam bukunya Wawasan Umum Ahlus Sunnah wal Jamaah menulis bahwa dalam Asy'ariyah, terdapat perbedaan-perbedaan visi.Visi Abu al-Hasan al-Asy'ari (imam Asy'ariyah) tidak sama dengan murid-muridnya, seperti Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghozali, dan As-Sanusi. Padahal, mereka mengklaim dirinya penganut Asy'ari. Demikian pula dalam mazhab fikih, terdapat perbedaan pandangan dan fatwa antara Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, seperti An-Nawawi, Ar-Rofi'i, Al-Buthi, Al-Qoffal, dan lain-lain.

4. Dari *Mazhab* menjadi *Manhaj*

Dalam perjalanan sejarahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berhenti pada manhaj al-fikr (cara pandang) semata, tetapi menjelma menjadi firqoh (kelompok)

yang terorganisasi. Dikatakan demikian karena Ahlus Sunnah wal Jamaah membentuk suatu doktrin dan mempunyai pengikut yang tetap. Jika seseorang mengaku sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bersangkutan harus punya ciri-ciri tertentu dalam keyakinan, sikap, dan perilaku.Ciri-ciri itu kemudian menjadi pembeda antara penganut Ahlus Sunnah dan penganut aliran teologi lainnya. Masalah menjadi lebih rumit tatkala aliran-aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri punya karakter dan cirinya sendiri-sendiri.

Ada pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut Ahlul Atsar, yaitu mereka yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Mayoritas kelompok ini mengikuti pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ada yang disebut Al-Asya'iroh, yang sekarang menjadi umat Muslim mayoritas di beberapa negara, termasuk Indonesia. Ada pula kelompok Ahlus Sunnah ala Al-Maturidiyah yang terkenal dengan penggunaan rasionalitasnya.

Jika ada orang yang mencari-cari manakah di antara ketiga aliran di atas yang paling benar, jawabannya tergantung dari aliran manakah orang tersebut berasal. Jika ia orang Indonesia, mungkin akan menjawab Al-Asya'iroh-lah yang paling absah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Akan tetapi, lebih arif jika umat Islam menyikapi perbedaan itu sebagai rahmat Allah SWT. Mari, kita biarkan perbedaan-perbedaan aliran teologi dalam Islam laksana warna-warni bunga yang mekar di tengah taman. Bukankah sebuah taman jauh lebih indah jika ditumbuhi aneka bunga dibandingkan taman yang hanya memiliki satu macam bunga? Tidak ada kebenaran, kecuali Allah SWT.

H. ASWAJA DI ERA MODERN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Perkembangan keislaman di Indonesia dalam setiap fase sejarahnya selalu berkaitan erat dengan dinamika dunia Islam khususnya di Timur tengah. Memasukan era modern, umat Islam dihadapkan pada kenyataaan pahit bahwa ummat Islam tertinggal jauh dari Barat, baik secara social, politik, ekonomi bahkan keilmuan. Dalam keadaan semacam maka muncul gerakan di internal ummat Islam berupa semangat pembaruan Islam atau yang kemudian dikenal dengan gerakan tajdid. Gerakan ini bertujuan untuk membangkitkan ummat Islam dari keterpurukan serta mengembalikan kejayaan yang pernah diraih oleh umat Islam pada era keemasannya.

Gerakan tajdid ini dimotori oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897 M). Dia lahir di Asadabad-Iraq, dia menghabiskan masa mudanya di Afghanistan dan setelah itu dia berkelana ke berbagai Negara sebelum akhirnya tinggal di Mesir. Di Mesir al-Afghani mendesakkan pengaruhnya pada muridnya, seorang intelektual Mesir yaitu Muhammah Abduh (1849-1905 M). Di Syiria juga muncul gerakan yang sama yang dimotori oleh Muhammad Rasyid Ridha (w.1935 M) dan al Kawakibi (w.1902 M). Gerakan tajdid ini juga biasa disebut dengan gerakan Salafi. Salafi ini menisbatkan diri pada tokoh abad 14 yaitu Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qoyyim al Jauziyah, keduanya adalah tokoh madzhab Hanbali.

Di Jazirah Arab muncul juga gerakan Wahabi. Wahabi adalah gerakan pembaharu yang muncul pada abad ke-18 dan diprakarsai oleh Muhammad bin ‘Abdul Wahab (w. 1791 M), dia adalah penganut Madzhab Hanbali yang taat dan berpegang teguh pada pemikiran Ibnu Taymiyah. Dia menyerukan kembali pada

Islam yang asli dan murni bebas dari bid’ah yang mengotorinya dari masa kemasa. Dia memiliki murid yang giat antara lain Ibnu Sa’ud dan anaknya ‘Abdul Aziz. Ibnu Saud memerintah di wilayah Dar’iyah Ibnu Saud dan anaknya ‘Abdul Aziz memberontak terhadap kekuasaan Turki Utsmani di Jazirah Arab dan berhasil mengusai Makkah pada tahun 1803 M. Mereka kemudian terusir dari Makkah dan pindah ke Nejd, dan mendirikan negara Saudi Arabia yang menganut faham Wahabi dengan ibu kota Riyadh.

Pada abad ke 19 dan 20, banyak ulama Indonesia yang pergi ketanah suci baik untuk belajar maupun untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, gerakan pembaharuan wahabi dan salafi fundamental (Islam puritan) yang sedang marak diperbincangakan di Timur Tengah juga pada giliranya membawa pengaruh terhadap para ulama Indonesia yang datang ke tanah suci. “Gaya beragama” Islam di Indonesia yang demikian toleran dan akomodatif terhadap budaya-budaya yang telah tumbuh di Indonesia sebelumnya, menjadi “lahan potensial” bagi ulama Indonesia yang terpengaruh dengan gerakan pembaharuan Wahabi dan Salafi yang ada di Timur Tengah.

Misalnya Haji Abdullah Ahmad adalah salah satu ulama Indonesia yang belajar di tanah suci, dia belajar kepada Syaikh Ahmad Khatib (1855-1916). Ahmad Khatib merupakan ulama kelahiran Minangkabau yang menetap di Makkah mulai 1876. Di samping Haji Abdullah Ahmad, Syaikh Ahmad Khatib memiliki murid-murid yang juga menjadi tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Di Minangkabau murid-muridnya menjadi pelopor gerakan pembaharuan, antara lain: Syaikh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Haji Abdul Karim Amrullah (1879-1945), dan di Jawa muridnya yang menjadi pembaharu adalah Haji Ahmad Dahlan (1869). Tokoh-tokoh tersebutlah yang

kemudian memainkan peran penting dalam gerakan pembaharuan Islam di Indonesia.

Pengaruh gerakan pembaharuan di Indonesia semakin terlihat jelas dan tersistematisir saat Ahmad Dahlan (1868-1923 M) mendirikan Muhammadiyah pada 12 November 1912. Untuk merespon gerakan pembaharuan di Indonesia dan untuk merespon kekuasaan Ibnu Sa'ud di Makkah dan Madinah agar tetap menghormati tradisi empat madzhab Sunni, maka KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) mendirikan Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926.

Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap fase sejarahnya, aswaja selalu muncul sebagai respon dan anti tesa terhadap fenomena ketidak seimbangan (baca: ekstrimitas pemikiran). Dan watak dasar dari pemikiran aswaja selalu menjadi anti tesa sekaligus sintesa bersifat eklektik, yaitu mengambil hal-hal yang positif dari berbagai arus pemikiran yang ada.

Materi 03:

NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP)

A. Historisitas Nilai Dasar Pergerakan (NDP)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi kemahasiswaan berusaha menggali nilai- nilai moral yang lahir dari pengalaman dan keberpihakan insan warga pergerakan dalam bentuk rumusan-rumusan yang diberi nama Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Secara historis, NDP PMII mulai terbentuk pasca Independensi PMII ketika Mukernas III di Bandung (1-5 Mei 1976). Pada saat itu penyusunan NDP masih berupa kerangkanya saja, lalu diserahkan kepada tim PB PMII. Namun, hingga menjelang Kongres PMII VIII di Bandung, penyusunan tersebut belum dapat diwujudkan. Hingga akhirnya saat Kongres PMII VIII di Bandung (16-20 Mei 1985) menetapkan penyempurnaan rumusan NDP dengan ***Surya Dharma Ali sebagai ketua umum PB PMII waktu itu.*** Penyempurnaan ini berlangsung hingga 1988. Selanjutnya pada tanggal 14-19 September 1988 ketika Kongres IX PMII, NDP mulai disahkan di Surabaya.

B. ARTI

Secara esensial NDP adalah rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia, dengan kerangka pendekatan Ahlussunnah wal-Jama‟ah. NDP harus senantiasa menjiwai seluruh aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi, serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan masing-masing anggota. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam harus dihayati dan diamalkan secara kaffah atau menyeluruh oleh seluruh anggota dengan

mencapai dan mengamalkan iman (aspek aqidah), Islam (aspek syari‟ah) dan Ihsan (aspek etika, akhlak dan tasawuf) untuk memohon Ridlo-Nya serta memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat (sa‟adah ad-darain). Sebagai tempat hidup dan mati, negeri maritim Indonesia merupakan rumah dan medan gerakan organisasi. Di Indonesia organisasi hidup, demi bangsa Indonesia organisasi berjuang. Sebagai tempat semai dan tumbuh negeri Indonesia telah memberi banyak kepada organisasi, oleh sebab itu organisasi dan setiap anggotanya wajib memegang teguh komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. NDP adalah penegasan nilai atas watak keindonesiaan organisasi.

NDP ini merupakan tali pengikat (kalimatun sawa') yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama. Seluruh anggota dan kader PMII harus memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII baik secara personal maupun kolektif dalam medan perjuangan sosial yang lebih luas, dengan melakukan keberpihakan yang nyata melawan ketidakadilan, kesewenangan, kekerasan, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

Organisasi menggunakan Ahlussunnah wal-Jama‟ah sebagai pendekatan berpikir (manhaj al-fikr) untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Memilih Ahlussunnah wal-Jama‟ah sebagai pendekatan berpikir dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam merupakan keniscayaan di tengah kenyataan masyarakat Indonesia yang serba majemuk. Dengan Ahlussunnah wal-Jama‟ah yang mengenal nilai kemerdekaan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), keadilan (al-‟adalah), toleransi (tasamuh), dan nilai perdamaian (al-shulh), maka kemajemukan etnis, budaya dan agama menjadi potensi penting bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

NDP sebagai penegasan atas watak keindonesiaan organisasi. Di Indonesia organisasi hidup, demi bangsa Indonesia organisasi berjuang. Dengan ahlussunnah wal jama'ah mengenal kemerdekaan, persamaan, keadilan, toleransi, dan nilai perdamaian, maka kemajemukan etnis, budaya, dan agama menjadi potensi bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

C. FUNGSI

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) berfungsi sebagai:

1. **Kerangka refleksi (landasan berfikir)**

   Sebagai kerangka refleksi, NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan Nilai Dasar Pergerakan. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus-menerus, sehingga butiran-butiran Nilai Dasar Pergerakan menjadi hidup dan menjiwai setiap gerak dan kegiatan organisasi. Merupakan kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan dan refleksi apakah tindakan dan kegiatannya telah mendekati Nilai Dasar Pergerakan.

2. **Kerangka aksi (landasan berpijak)**

   Sebagai kerangka aksi, NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi – refleksi yang dilakukan secara terus-menerus. Tahap memahami Nilai Dasar harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan Nilai itu dalam gerak dan tindakan, kemudian setelah bergerak dan bertindak harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati Nilai Dasar.

3. **Kerangka ideologis (sumber motivasi)**

   Sebagai kerangka ideologis, NDP menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. Begitu juga menjadi landasan berfikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.

D. KEDUDUKAN

1. NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi
2. NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi
3. NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berfikir, berbicara, dan bertindak setiap anggota.

E. RUMUSAN NILAI- NILAI DASAR PERGERAKAN

1. Tauhid.

Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Di dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia, (*Q.S. Al-Ikhlas, Al-Mukmin:25, Al-Baqarah:130-131*).

PERTAMA, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah adalah dzat yang fungsional. Allah Menciptakan, Memberi Petunjuk, Memerintah dan Memelihara alam semesta. Allah juga Menanamkan Pengetahuan, Membimbing dan Menolong manusia. Allah Maha Mengetahui, Maha Menolong, Maha Bijaksana, Hakim Maha Adil, Maha Tunggal, Maha Mendahului dan Maha Menerima segala bentuk Pujaan dan Penghambaan, (*Q.S. Al-Hasyr:22-24*).

KEDUA, keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada hal yang ghaib, (*Q.S. Al-Baqoroh:3, Muhammad:14-15, Al-Alaq:4, Al-Isro":7*).

KETIGA, oleh kerena itu tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan lewat perbuatan. Maka, konsekuensinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mampu melarutkan dan menetaskan nilai-nilai tauhid dalam berbagai kehidupan serta tersosialisasikan hingga merambah sekelilingnya, (*Q.S. Al-Baqoroh:30*, *Al-A"raf:129, An-Nahl:62*, *Fathir:39*). Hal ini dibuktikan dengan pemisahan yang tegas antara hal-hal yang profan dan yang sakral. Selain atas Allah sebagai Dzat Yang Maha Kuasa, boleh dilakukan dekonstruksi dan desakralisasi atas segalah hal. Sehingga tidak terjadi penghambaan pada hal-hal yang sifatnya profan, seperti jabatan, institusi, teks, orang dan seterusnya.

KEEMPAT, PMII memilih pendekatan berpikir Ahlussunnah wal-Jama"ah untuk memahami dan menghayati keyakinan Tauhid.

2. HABLUL MINANNALLAH (Hubungan dengan Allah).

Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaanNya yang lain, (*Q.S. Al-Dzariat:56, Al-A"raf:179, Al-Qashash:27*).

Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai khalifah dan

memenuhi posisinya sebagai Hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhlukNya. Sebagai hamba Allah (*Q.S. Shad:82-83, Al-Hujurat:4*), manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuanNya. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah, (*Q.S. Al-Imron:153, Hud:88*). Dengan demikian, dalam kedudukan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan manusia dengan Allah, yaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah dan sebagai Hamba Allah (*Q.S. Al-An"am:165, Yunus:14*). Kedua pola ini dijalani secara seimbang, lurus dan teguh dengan yang lain, (*Q.S. Shad:72, Al-Hajr:29, Al-Ankabut:29*).

Memilih salah satu pola akan membawa kepada kedudukan dan fungsi manusia yang tidak sempurna. Sebagai akibatnya manusia tidak akan dapat mengejawantahkan prinsip tauhid secara maksimal. Pola hubungan dengan Allah juga harus dijalani dengan ikhlas, (*Q.S. Al-Ra"d:11*).

Artinya pola itu dijalani hanya untuk mengharapkan Keridlaan dari Allah. Sehingga pusat perhatian dengan menjalani dua pola ini adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sedangkan hasil optimal sepenuhnya kehendak Allah, (*Q.S. Al-Hadid:22*).

Dengan demikian berarti diberikan penekanan kepada proses menjadi insan yang mengembangkan dua pola hubungan dengan Allah. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, akan muncul manusia-manusia yang mempunyai kesadaran tinggi, kreatif, dan dinamis dalam hubungan dengan Allah. Sekaligus didukung dengan ketakwaan dan tidak pernah pongah kepada Allah, (*Q.S. Al-Imron:159*).

Dengan karunia akal, manusia berfikir, merenungkan tentang kemahakuasaan-Nya, yakni kemahaan yang tidak tertandingi oleh siapapun, akan tetapi manusia yang dilengkapi dengan potensi-potensi positif memungkinkan dirinya untuk menirukan fungsi ke mahakuasaan-Nya itu. Sebab dalam diri manusia terdapat fitrah uluhiyah, yakni fitran suci yang selalu memproyeksikan tentang kebaikan dari keindahan, sehingga tidak mustahil ketika manusia melakukan sujud dan dzikir kepada-Nya, berarti manusia tengah menjalani fungsi al-Quddus. Ketika manusia berbelah kasih dan bebuat baik kepada tetangga dan sesamanya, maka berarti ia telah memerankan fungsi arRahman dan ar-Rahim. Ketika manusia bekerja dengan kesungguhan dan ketabahan untuk mendapatkan rizki, maka manusia telah menjalankan fungsi alGhoniyya. Dengan demikian pula,dengan peran ke-maha-an Allah yang lain, asSalam, al-Mun'im dan sebagainya, (*Q.S. Al-Baqoroh:213*).

Di dalam melakukan pekerjaannya manusia diberi kemerdekaan untuk memilih dan menentukan dengan cara yang paling disukai, (Q.*S. Al-A"raf:54, Hud:7, Ibrahim:32, An-Nahl:3, Bani Isroil:44, Al-Ankabut:44, Luqman:10, Al-Zumar:5, Qaf:38, Al-Furqan:59, Al-Hadid:4*). Dari semua tingkah lakunya manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah diupayakan. Karenanya manusia dituntut untuk selalu memfungsikan secara maksimal kemerdekaan yang dimilikinya, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan alam dan kerumunan masyarakat, (*Q.S. Al-Ra"d:8, Al-Hijr:21, Al-An"am:96, Yasin:38, Al-Sajadah:12, AlFurqan:2, Al-Qomr:49*).

Sekalipun di dalam diri manusia dikaruniai kemerdekaan sebagai esensi kemanusiaan untuk menentukan dirinya, namun kemerdekaan itu selalu dipagari oleh keterbatasan-keterbatasan, sebab perputaran itu semata-mata

tetap Dikendalikan Oleh Kepastian-Kepastian Yang Maha Adil dan Bijaksana. Semua alam semesta selalu tunduk pada sunnah-Nya, pada keharusan universal atau taqdir, (*Q.S. Al-Baqoroh:164, Al-Imron:164, Yunus:5, An-Nahl:12, Al-Rum:22, AlJatsiyah:3*).

Jadi manusia bebas berbuat dan berusaha untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah dia menjadi mukmin atau kafir, pandai atau bodoh. Manusia harus berlomba-lomba mencari kebaikan, tidak terlalu cepat puas dengan hasil jerih payah dan karyanya. Tetapi harus sadar pula dengan keterbatasan-keterbatasannya, karena semua itu terjadi sesuai sunnatullah, hukum alam dan sebab akibat yang selamanya tidak berubah, maka segala upaya harus diserrtai dengan tawakkal. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya harus selalu dinamis, penuh dengan gerak dan semangat untuk berprestasi secara tidak fatalistis. Dan apabila usaha itu belum berhasil, maka harus ditanggapi dengan lapang dada, qona'ah (menerima) karena disitulah sunnatullah berlaku. Karenanya setiap usaha yang dilakukan harus disertai dengan sikap tawakkal kepadaNya.

3.HABLUL MINANNAS (Hubungan dengan manusia).

Kenyataan bahwa Allah meniupkan ruhNya kepada materi dasar manusia, menunjukan bahwa manusia berkedudukan mulia diantara ciptaan Allah yang lain. Kesadaran moral dan keberaniannya untuk memikul tanggung jawab dan amanat dari Allah yang disertai dengan mawas diri menunjukkan posisi dan kedudukannya, (*Q.S. Al-Mu"minun:115*).

Mamahami ketinggian eksistensi dan potensi yang dimiliki oleh manusia, manusia mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sebagai warga dunia, manusia harus berjuang dan menunjukkan peran yang

dicita-citakan. Tidak ada yang lebih tinggi antara yang satu dengan lainnya, kecuali ketaqwaannya, (*Q.S. Al-Hujurat:13*).

Setiap manusia memiliki kekurangan (*Q.S. At-Takatsur; Al-Humazah; AlMa"un; Az-Zumar:49, Al-Hajj:66*) dan kelebihan, ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya (*Q.S. Al-Mu"minun:57-61*) tetapi ada pula yang terlalu menonjolkan potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerjasama, menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama, (*Q.S. Ali Imran:103, AnNisa":36-39*).

Manusia telah dan harus selalu mengembangkan tanggapannya terhadap kehidupan. Tangagapan tersebut pada umumnya merupakan usaha mengembangkan kehidupan berupa hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan demikian, maka hasil itu merupakan budaya manusia yang sebagian dapat dirubah. Pelestarian dan perubahan selalu mewarnai kehidupan manusia, inipun dilakukan dengan selalu memuat nilai-nilai sehingga budaya yang bersesuaian bahkan yang merupakan perwujudan dan nilai-nilai tersebut dilestarikan, sedangkan budaya yang tidak bersesuaian dapat diperbarui.

Kerangka bersikap tersebut mengisyaratkan adanya upaya bergerak secara dinamis, kreatif dan kritis dalam kehidupan manusia. Manusia dituntut memanfaatkan potensinya yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui pemanfaatan potensi diri tersebut sehingga manusia menyadari asal mulanya kejadian dan makna kehadirannya di dunia.

Dengan demikian pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dari semangat yang dijiwai oleh sikap memahami yang senantiasa berada dalam religiusitas. Manusia dan alam selaras dengan perkembangan kehidupan dan mengingat

perkembangan suasana. Memang manusia harus menegakkan iman, taqwa dan amal sholeh guna mewujudkan kehidupan yang baik dan penuh rahmat di dunia. Di dalam kehidupan dunia itu, sesama manusia saling menghormati harkat dan martabat masing-masing, bersederajat, berlaku adil dan mengusahakan kebahagiaan bersama. Untuk itu diperlukan usaha bersama yang harus didahului dengan sikap keterbukaan, komunikasi dan dialog yang egaliter dan setara antar sesama. Semua usaha dan perjuangan ini harus terus menerus dilakukan sepanjang sejarah.

Melalui pandangan seperti ini pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikembangkan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan kerelaan dan kesepakatan untuk bekerjasama serta berdampingan setara dan saling pengertian. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama yakni, hidup dalam kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Tolak ukur bernegara adalah keadialan, persamaan hukum serta adanya permusyawaratan.

Sedangkan hubungan antar muslim dan non muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia dengan tanpa mengorbankan keyakinan terhadap universalitas dan kebenaran Islam sebagai ajaran kehidupan yang paripurna. Dengan tetap berpegang pada keyakinan ini. Dibina hubungan dan kerja sama secara damai dalam mencapai cita-cita bersama umat manusia, (*Q.S. Al-Kaafirun*).

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia tercakup dalam persaudaraan antar insan pergerakan, persaudaraan sesama umat Islam (*Q.S Al-Hujuraat, 9-10*), persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama umat manusia. Perilaku persaudaraan ini harus menempatkan insan

pergerakan pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya.

4. HABLUL MINAL 'ALAM (Hubungan dengan alam).

Alam semesta adalah ciptaan Allah, (*Q.S. Hud:61, Al-Qoshash:77*). Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya, (*Q.S. An-Nahl: 122, Al-Baqoroh:130, Al-Ankabut:38*).

Alam juga menunjukan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah, (*Q.S. Al-Ankabut:64, Al-jaatsiyah:3-5*). Nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan alam. Sebagai ciptaan Allah, alam bekedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukan alam bagi manusia (*Q.S. AlSyura:20, Yusuf:109, Al-Anam:32, Al-Baqoroh:29*) dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam. Bukan penghambaan kapada Allah. Allah mendudukkan manusia sebagai khalifah (*Q.S. Al-Baqoroh:30*).

Sudah seharusnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya (*Q.S. Al-Jaatsiyah:12-13, AlGhaasyiyah:17-26*), bukan menjadikannya sebagai obyek eksploitasi (*Q.S. ArRum:41*).

Perlakuan baik manusia terhadap alam dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan untuk kebaikan akhirat. Di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal shaleh, (*Q.S. Al-Baqarah:62, AlA"ashr*).

Kearah semua itulah hubungan manusia dengan alam ditujukan. Dengan sendirinya cara-cara memanfaatkan alam, memakmurkan bumi dan

menyelenggarakan kehidupan pada umumnya juga harus bersesuaian dengan tujuan yang terdapat dalam hubungan antara manusia dengan alam tersebut. Cara-cara itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan bersama. Melalui pandangan ini haruslah dijamin kebutuhan manusia terhadap perkerjaan, nafkah dan masa depan, maka jelaslah pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. (Q.*S. Al-Mu"minun:17-22, Al-Hajj:65*).

Hidup bersama antar manusia berarti hidup antar kerjasama. Tolong menolong dan tenggang rasa (*Q.S. Abasa:17-32*, *An-Naazi"aat:27-33*). Salah satu dari hasil penting dari cipta, rasa, dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menciptakan teknologi untuk memudahkan, dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia. Dalam memanfaatkan alam diperlukan Iptek, karena alam memiliki ukuran, aturan, dan hukum tersendiri. Alam perlu didayagunakan dengan tidak mengesampingkan sumber pengetahuan adalah Allah. Penguasaan dan pengembangannya disandarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Nya. Ayat-ayat berupa wahyu dan seluruh ciptaan Nya. Untuk mengetahui dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah itulah manusia mengerahkan kesadaran moral, potensi kreatif berupa akal dan aktifitas intelektualnya.

Salah satu hasil penting dari cipta, rasa, dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Manusia menciptakan itu untuk memudahkan dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia . Dalam memanfaatkan alam diperlukan iptek, karena alam memiliki ukuran, aturan, dan hukum tertentu; karena alam ciptaan Allah bukanlah sepenuhnya siap pakai, melainkan memerlukan pemahaman terhadap alam dan ikhtiar untuk mendayagunakannya.

Namun pada dasarnya ilmu pengetahuan bersumber dari Allah. Penguasaan dan pengembangannya disandarkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat tersebut berupa wahyu dan seluruh ciptaanNya. Untuk memahami dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah itulah manusia mengerahkan kesadaran moral, potensi kreatif berupa akal dan aktifitas intelektualnya. Di sini lalu diperlukan penalaran yang tinggi dan ijtihad yang utuh dan sistimatis terhadap ayat-ayat Allah, mengembangkan pemahaman tersebut menjadi iptek, menciptakan kebaruan iptek dalam koteks ke,manusiaan, maupun menentukan simpul-simpul penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditimbulkannya. Iptek merupakan perwujudan fisik dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama digunakan untuk memudahkan kehidupan praktis.

Penciptaan, pengembangan dan penguasaan atas iptek merupakan keniscayaan yang sulit dihindari. Jika manusia menginginkan kemudahan hidup, untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama bukan sebaliknya. Usaha untuk memanfaatkan iptek tersebut menuntut pengembangan semangat kebenaran, keadilan , kmanusiaan dan kedamaian. Semua hal tersebut dilaksanakan sepanjang hayat, seiring perjalanan hidup manusia dan keluasan iptek. Sehingga, berbarengan dengan keteguhan iman-tauhid, manusia dapat menempatkan diri pada derajat yang tinggi .

Di sini lalu diperlukan penalaran yang tinggi dan ijtihad yang utuh dan sistematis terhadap ayat-ayat Allah. Pengembangan pemahaman tersebut secara tersistematis dalam ilmu pengetahuan yang menghasilkan iptek juga menunjuk pada kebaharuan manusia yang terus berubah pencitaan pengembangan dan pengusahaan terhadap Iptek merupakan keniscayaan yang sulit dihindari, jika manusia menginginkan kemudahan hidup untuk kesejahteraan dan

kemakmuran bersama, usaha untuk memanfaatkan Iptek tersebut menuntut keadilan, kebenaran, kemanusiaan dan kedamaian. Semua hal tersebut dilaksanakan sepanjang hayat, seiring perjalanan usia dan keluasan Iptek, sehingga berbarengan dengan iman dan tauhid manusia dapat mengembangkan diri pada derajat yang tinggi..

Maka jelaslah hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dengan alam berarti hidup dalam kerjasama, tolong menolongan dan tenggang rasa.

Implementasinya, setiap kader harus menjaga alam dari bahaya yang merusaknya. Misalnya, menjaga alam dari bahaya nuklir, penebangan hutan, eksploitasi alam atau kerusakan alam akibat bom bunuh diri yang akhir–akhir ini ramai diperbincangkan. Ini semua dilakukan sebagai bentuk implementasi nilai–nilai yang ada di PMII dalam menjaga alam dan manusia itu sendiri.

Dengan NDP itu diharapkan akan terbentuknya sosok pribadi muslim yang berbudi luhur, berilmu, bertaqwa, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuaannya. Sehingga cita–cita ideal PMII dalam mencetak kader ulul albab dengan ciri menjalankan dzikir, fikir dan amal soleh secara dialektis, kritis dan transformatif akan dapat terwujud dengan senantiasa menjaga komitmen keislaman, kemahasiswaan dan keindonesiaan.

F. PMII dan Keutuhan Pancasila; Membumikan NDP PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang merupakan organisasi keislaman yang berbasis pengkaderan dan bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independensi dan professional , (seharusnya) mempunyai peranan penting dalam mempertahankan Pancasila

sebagai ideologi Negara yang kemudian menjadi landasan dalam membentuk karakter bangsa.

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas, perlu memperoleh perhatian khusus oleh para aktivis mahasiswa, khususnya PMII yang memang memiliki kerangka atau acuan dalam segala aktivitas gerakan yang dilakukan.

Kerangka acuan tersebut harus menjadi titik pijak gerakan dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk dalam membentuk karakter berkebangsaaan.

Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang notabene menjadi ideologi alternatif dalam mengimbangi laju globalisasi, agar tercipta tatanan yang seimbang "tanpa tekanan dan dominasi". Keberadaan Aswaja –sebagai ideologi yang ditawarkan- bisa mengadaptasi dengan situasi dan kondisi. Terntunya, segala langkah perubahan yang diambil harus tetap berlandaskan pada paradigm kaidah al-Muhafadzatu ala Qodim al-Sholih wa al-akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah, (meyamakan langkah dengan mempertahankan sebuah tradisi yang kondisinya masih baik dan relevan dengan masa kini atau berkolaborasi dengan nilai-nilai baru yang kenyataannya pada era kekinian dan masa mendatang akan lebih baik).

Sementara Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII yang merupakan rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia, dengan kerangka pendekatan Ahlussunnah wal-Jama'ah. NDP harus senantiasa menjiwai seluruh aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi, serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan masing-masing anggota. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam harus dihayati dan diamalkan secara

kaffah atau menyeluruh oleh seluruh anggota dengan mencapai dan mengamalkan Iman (aspek aqidah), Islam (aspek syari'ah) dan Ihsan (aspek etika, akhlak dan tasawuf.

Sebagai tempat hidup dan mati, negeri maritim Indonesia merupakan rumah dan medan gerakan organisasi. "Di Indonesia organisasi hidup, demi bangsa Indonesia organisasi berjuang". Sebagai tempat semai dan tumbuh negeri Indonesia telah memberi banyak kepada organisasi. Oleh sebab itu, organisasi dan setiap anggotanya wajib memegang teguh komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. NDP adalah penegasan nilai atas watak keindonesiaan organisasi.

NPD PMII yang di dalamnya terdapat nilai ketuhanan (Tauhid), nilai ke-hamba-an sebagai seorang makhluk yang berelasi dengan penciptanya (Hablun minallah), nilai humanism (Hablun minannas), dan nilai kecitaan terhadap alam dan tanah air (hablun minal alam). Dan Ahlussunnah wal Jama'ah digunakan sebagai pendekatan berpikir (Manhaj al-Fikr) untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Pilihan atas Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai pendekatan berpikir dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam merupakan keniscayaan di tengah kenyataan masyarakat Indonesia yang serba majemuk. Dengan Ahlussunnah wal Jama'ah yang mengenal nilai kemerdekaan (al-Hurriyah), persamaan (al-Musawah), keadilan (al-'Adalah), toleransi (Tasamuh), dan nilai perdamaian (al-Shulh), maka kemajemukan etnis, budaya dan agama menjadi potensi penting bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan. (Sekali lagi) terlebih dalam rangka menjaga eksistensi pancasila di bumi Nusatara.

PENUTUP

Itulah Nilai Dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang dipergunakan sebagai landasan teologis normatif, etis dan motivatif dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku warga PMII, baik secara perorangan maupun bersama-sama dan kelembagaan. Rumusan tersebut harus selalu dikaji dan dipahami secara mendalam, dihayati secara utuh dan terpadu, dipegang secara teguh dan dilaksanakan secara bijaksana.

Dengan Nilai Dasar Pergerakan tersebut dituju pribadi muslim yang berbudi luhur, berilmu, bertaqwa, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya, yaitu sosok ulul albab Indonesia yang sadar akan kedudukan dan peranannya sebagai khalifah Allah di bumi dalam jaman yang selalu berubah dan berkembang , beradab, manusiwi, adil penuh rahmat dan berketuhanan.

Materi 04:

Ke-KOPRI-an.

A. Sejarah Lahirnya KOPRI

Keputusan bersejarah pada pelaksanaan Kongres II PMII yang diselenggarakan di Murnajati Malang menyatakan organisasi berbasis mahasiswa ini keluar dari partai NU dan berbentuk independen. Deklarasi PMII dalam dokumen historisnya di kenal dengan "Deklarasi Murnajati".

Independensi ini sifatnya pada ruang gerakan PMII secara keorganisasian karena sisi ideologi ke-Islam-an masih mengekor dengan organisasi induknya (NU). Independensi ini dipicu oleh kondisi sosial politik nasional yang secara otomatis melibatkan partai NU sebagai bagian di dalam pemerintahan dan legislatif membuat PMII baik secara langsung maupun tidak langsung terseret didalamnya. PMII seakan siap dijadikan apa saja sesuai dengan keputusan partai NU; sebagai anak, sebagai mitra maupun sebagai kepanjangan tangan penanaman ideologi parati NU di kalangan mahasiswa.

Tak hanya sifatnya yang strategis, sifat dependen PMII dengan partai NU juga membawa implikasi organisasi yang birokratis. Untuk bisa melakukan kegiatan internal maupun ekternal, PMII harus meminta persetujuan dan tanda tangan dari pimpinan partai NU. Realisasi demikian dirasakan oleh kader PMII sebagai suatu hambatan dan keterbatasan dalam bergerak. Meski harus diakui, selama PMII dependen dengan partai NU lah yang membuck up seluruh kegiatan organisasi.

Ketua umum PB PMII Zamroni pada saat berlangsungnya Kongres Murnajati tersebut di tengah-tengah isu keluarnya PMII dari partai NU mendengar adanya desas-desus aspirasi yang berkembang di kalangan kader puteri. Berbeda

dengan kongres sebelumnya, di Murnajati ini kader puteri hadir lebih banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Latar belakang kader yang sebelumnya sudah mengenal PMII dari pengasuh pesantren.

Terekam dari kegelisahan kader puteri adalah peran dan posisi mereka di PMII. Bertambahnya jumlah kader perempuan di PMII tak bisa dilepaskan dari PMII. Dalam usianya yang masih sangat muda, tiga tahun sejak PMII didirikan pada tahun 1960, perkembangan kader perempuan secara kuantitas di propinsi Jawa Timur melesat drastis. Saat berlangsung kongres mereka berkumpul dan mengadakan musyawarah kecil membahas persoalan yang dihadapi. Yang menjadi ganjalan kader perempuan PMII saat itu adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan departemen keputerian yang mengakomodir kader perempuan tidak berjalan efektif karena lingkupnya yang sangat sempit. Departemen tak bisa membuat keputusan yang memudahkan kader perempuan menjalin hubungan dengan pihak luar PMII. Seperti misalnya ketua departemen tak bisa mengeluarkan surat dengan kop dan tanda tangan sendiri. Akibatnya kader permpuan PMII tertinggal dari gerbong gerakan perempuan saat itu karena tak bisa menjalin kerjasama. Kurang leluasanya ruang bergerak bagi kader perempuan semakin dalam dilema ketika PMII secara organisasi membatasi aktifis perempuan.
2. Meskipun dari sisi kuantitas kader perempuan jumlahanya lebih banyak dari laki-laki namun setiap kegiatan PMII yang melibatkan kaum perempuan hanya ditempatkan pada posisi yang tidak strategis. Tidak ada keleluasaan untuk menentukan diri, potensi dan bakat apa yang harus dikembangkan oleh masing-masing kader selama di PMII, semuanya seakan sudah ditentukan oleh PMII yang notabene diisi kader laki-laki.

3. Keterlibataban kader perempuan dalam aktifitas publik saat itu selalu berputar dalam lingkaran sebagai peserta dari kegitaan yang dilaksanakan oleh organisasi lain. Dilingkungan partai NU dan Muslimat, kader perempuan sering dipakai untuk penerima tamu, paduan suara, dan peserta karnaval acara hari-hari besar nasional dan keagamaan.
4. Pengaruh eksistensi organisasi di luar PMII yang memilki sayap gerakan perempuan turut andil dalam proses pendidikan kader bangsa. Organisasi sayap dengan leluasa melakukan kegiatan sosial-kemasyarakatan tanpa melanggar aturan bersama yang disepekati dalam organisasi induk. Organisasi sayap ini seperti misalnya Bayangkara (ikatan istri polisi), Persit, Kohati, Gerwani dll.
5. Organisasi sayap berbasis perempuan di era tahun 60-an telah memainkan ideologisasi kepada masyarakat basis yang menjadi konstituennya. Seperti misalnya, Gerwani hadir dengan bangunan ideologi komunis yang disampaikan dalam siu-isu emansipasi perempuan.

Alasan dibentuknya Korps PMII Putri (KOPRI) yang mengemuka saat itu berasal dari kebutuhan kader perempuan PMII untuk memisahkan diri dari induknya, yakni PMII. Mereka tak hanya merasa kurang leluasa dalam melakukan aktivitas gerak perempuan di dalam tubuh PMII, melainkan setting sosial politik yang kian tidak mendukung bagi eksistensi kader perempuan jika masih tetap mengurung diri dalam departemen.

Sejarah organisasi yang bernama Korp PMII Putri yang disingkat KOPRI mengalami proses yang panjang dan dinamis. ***KOPRI berdiri pada Kongres III PMII pada tanggal 7 – 11 Februari 1967 di Malang Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputrian dan lahir bersamaan dengan Mukernas II PMII di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1967. Dengan ketua***

KOPRI Ismi Maryamah BA dan sekretaris Maryamah BA. Semula KOPRI Pusat berkedudukan di Jakarta, kemudian berdasarkan keputusan MUBES I PMII di Garut Jawa Barat pada tanggal 20-27 Januari 1969, dipindahkan ke Surabaya Jawa Timur, yang operasional/pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada PW PMII Jawa Timur. Munas KOPRI yang pertama dilaksanakan di Makasar Ujungpandang pada tanggal 25-30 April 1970, bersamaan dengan pelaksanaan Kongres IV PMII.

Kemudian pada periode 1973-1988 KOPRI bubar. Hal ini disebabkan karena selama periode 1970-1973 PP KOPRI tidak pernah mengadakan kegiatan dan dinilai gagal, yang klimaksnya mereka tidak mampu membuat Laporan Pertanggungjawaban pada Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat tahun 1973. Dengan ketua KOPRI saat itu Adibah Hamid. Pada Kongres V ini tidak ada satu orangpun pengurus PP KOPRI yang hadir, sehingga Kongres mengeluarkan Pernyataan Ciloto yang isinya meminta pengurus KOPRI mengadakan Mubes khusus KOPRI dengan limit waktu enam bulan.

KOPRI dibentuk kembali pada Kongres IX PMII di Surabaya tahun 1988 dengan ketua Khofifah, sekretaris Ulha Soraya. Sampai pada Kongres XII PMII di Medan Sumatera Utara tahun 2000, KOPRI bubar kembali. Dengan ketua KOPRI saat itu Luluk Hur Hamidah, sekretaris Wahidah Suaeb. KOPRI dibubarkan berdasarkan hasil voting, yang berbeda hanya satu suara. Merasa pengalaman pahit itu terasa, bahwa kader-kader perempuan PMII pasca Kongres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu, maka oleh sebab itu kader-kader perempuan PMII menganggap perlu dibentuknya wadah kembali, Kongres XIII di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur pada tanggal 16 – 21 April 2003 sebagai momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah, maka terbentuklah POKJA Perempuan dan kemudian lahirlah kembali KOPRI di

Jakarta pada tanggal 29 September 2003 dengan ketua KOPRI Winarti dan sekretaris Nina Hunainah pada periode kepengurusan A. Malik Haramain 2003-2005.

B. KETUA PMII DAN KETUA KOPRI DARI PERIODE 1960-2017.

Periode 1960-1961

Hasil Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin di Surabaya 14-16 April 1960

Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi

Sekretaris Umum : H. Said Budairi

Departemen Keputrian : Mahmudah Nahrowi

Periode 1961-1963

Kongres I PMII di Tawangmangu Surakarta Jateng Desember 1961

Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi

Sekretaris Umum : H. Said Budairi

Departemen Keputrian : Enny Suhaeni

Periode 1963-1967

Kongres II PMII di Kaliurang Yogyakarta 25-29 Desember 1963

Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi

Sekretaris Umum : Harun Al-Rasyid

Departemen Keputrian : Enny Suhaeni

Periode 1967-1970

Kongres III PMII di Malang Jawa Timur 7-11 Februari 1967

Ketua Umum : M. Zamroni

Sekretaris Umum : Fahmi Ja’far

Departemen Keputrian : Tien Hartini

PP Badan KOPRI :

(Hasil Mukernas II PMII Semarang 25 September 1967)

Ketua Umum : Ismi Maryam BA

Sekretaris Umum : Maryamah BA

Kedudukan : di Jakarta

Catatan : berdasarkan keputusan Mubes I PMII di Leles Garut Jabar 20-27 Januari 1969 KOPRI berpindah kedudukannya di Surabaya Jawa Timur

Periode 1970-1973

Kongres IV PMII di Makasar Ujungpandang 25-30 April 1970

Ketua Umum PMII : M. Zamroni

Sekretaris Umum : Madjidi Syah

Departemen Keputrian : Enny Suhaeni

PP Badan KOPRI

Ketua Umum : Adibah Hamid

Sekretaris Umum : Aminah Asraf BA

Kedudukan : Surabaya Jatim

Periode 1973-1977

Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat 23-28 Desember 1973

Ketua Umum PMII : Abduh Paddare

Sekretaris Jenderal : Ahmad Bagdja

Sekbid Keputrian : Wus’ah Suralaga

Periode 1977-1981

Kongres VI PMII di Wisma Tanah Air Jakarta 8-12 Oktober 1977

Ketua Umum PMII : Ahmad Bagja

Sekretaris Jenderal : Muhyidin Arubusman

Sekbid KOPRI : Fadilah Suralaga

Resuffle : Ida Farida

(*Fadilah Suralaga naik sebagai Ketua IV Bidang KOPRI*)

Periode 1981-1984

Kongres VII PMII di Pusdiklat Pramuka Cibubur Jakarta 1-5 April 1981

Ketua Umum PMII : Muhyidin Arubusman

Sekretaris Jenderal : H. Tahir Husien

Ketua Bidang KOPRI : Fadilah Suralaga

Sekbid KOPRI : Lilis Nurul Husnaputri

Periode 1985-1988

Kongres VIII PMII di Bandung Jawa Barat 16-20 Mei 1985

Ketua Umum PMII : Surya Darma Ali

Sekretaris Jenderal : M. Isa Muhsin

Ketua IV PMII (Bid KOPRI) : Iis Kholilah

Sekretaris VIII PMII (Bid KOPRI) : Dede Mahmudah

Hasil Resuffle:

Ketua IV PMII (Bid KOPRI) : Iriani Suaidah

Sekretaris VIII PMII (Bid KOPRI) : Hj. Siti Ma'rifah

Periode 1988-1991

Kongres IX PMII di Wisma Haji Surabaya Jawa Timur November 1988

Ketua Umum PMII : M. Iqbal Assegaf

Sekretaris Jenderal : Abd Khalik Ahmad

Ketua KOPRI : Khofifah

Sekretaris Bid KOPRI : Ulha Soraya

(*Pada Kongres ke IX di Surabaya ini KOPRI dibentuk kembali*)

Periode 1991-1994

Kongres X PMII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 21-27 Oktober 1991

Ketua Umum PMII : Ali Masykur Musa

Sekretaris Jenderal : M. Syukur Sabang

Ketua KOPRI : Jauharoh Haddad

Sekretaris KOPRI : Siti Khadijah RM

Catatan: pada Kongres ke X ini awalnya kandidat calon ketua KOPRI ada 3 calon, yaitu: Calon dari Surabaya, Calon dari Yogyakarta dan Calon dari Lampung. Dua calon pertama mengundurkan diri sehingga tinggal satu calon yaitu calon nomor 3 dari Lampung, Jauharoh Haddad.

Periode 1994-1997

Kongres XI PMII di Samarinda Kalimantan Timur 29 Oktober-3 Mopember 1994

Ketua Umum PMII : A. Muhaimin Iskandar

Sekretaris Jenderal : Rusdin M. Noor

Ketua KOPRI : Diana Mutiah

Sekretaris : -

Periode 1997-2000

Kongres XII PMII di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur 1997

Ketua Umum PMII : Syaiful Bahri Anshori

Sekretaris Jenderal : Usman Sadiqin

Ketua KOPRI : Lulu' Nurhamidah

Sekretaris KOPRI : Wahidah Suaeb/Erni Sugiyati

Periode 2000-2003

Kongres XIII PMII di Medan Sumatera Utara 2000

Ketua Umum PMII : Nusron Wahid

Sekretaris Jenderal : Cupli Risman

KOPRI : Bubar

Catatan : KOPRI dibubarkan pada forum Kongres ini melalui voting yang hanya beda 1 suara antara yang setuju dibubarkan dan yang menolak dibubarkan.

Periode 2003-2005

Kongres XIV PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan 2003

Ketua Umum PMII : Malik Haramain

Sekretaris Jenderal : Isra D Pramulyo

Ketua KOPRI : Wiwin Winarti

Sekretaris KOPRI : Nina Hunainah

Catatan : KOPRI dibentuk kembali dengan status Semi Otonom, berdasarkan hasil POKJA amanat Kongres XIV PMII 2003. Forum POKJA Perempuan PMII dilaksanakan oleh PB PMII pada tanggal 26-29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Periode 2005-2007

Kongres XV PMII di Bogor Jawa Barat 2005

Ketua Umum PMII : Herry Haryanto Azumi

Sekretaris Jenderal : Radli Kaelani

Ketua KOPRI : Ai' Maryati Sholihah

Sekretaris KOPRI : -

Periode 2007-2010

Kongres XVI di Batam Maret 2008

Ketua Umum PMII : Radli Kaelani

Sekretaris Jenderal : Zaini Sofari

Ketua KOPRI : Eem Marhamah

Sekretaris KOPRI : Suriyanti R.

Periode 2010-2013

Kongres XVII di Banjar Baru Kalsel

Ketua Umum PMII : Adien Jauharudin

Sekretaris Jenderal : Jabidi Ritonga

Ketua KOPRI : Irma Muthoharoh

Sekretaris KOPRI : Herwanita

Periode 2014-2016

Kongres XVIII di Jambi

Ketua Umum PMII : Aminuddin Ma'aruf

Sekretaris Jendral :

Ketua KOPRI : Ai Rahmayanti

Sekretaris KOPRI :

Periode 2017-2019

Kongres XVIII di Jambi

Ketua Umum PMII	: Agus Herlambang
Sekretaris Jendral	:
Ketua KOPRI	: Septi Rahmawati
Sekretaris KOPRI	:

Korps PMII Putri adalah wadah kader putri PMII yang bersifat Semi Otonom, yang berarti setengah otonom yaitu setengah mengurus urusan sendiri. KOPRI merrupakan badan yang dibentuk oleh PMII yang mempunyai hak semi otonomi, yaitu mempunyai beberapa wewenang untuk mengatur manajemen dan administrasi organisasi dan bersifat koordinatif dengan lembaga lainnya serta bertanggungjawab pada ketua Umum. KOPRI ini ada di setiap level organisasi PMII, mulai dari Pengurus Besar, Pengurus Koordinator Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon.

C. VISI DAN MISI KOPRI

Visi KOPRI adalah tercapainya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Misi KOPRI adalah Mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender.

D. **KOPRI Sebagai Asset Pemberdayaan Perempuan**

KOPRI harus memandang potensi kekuatan konstituens yang berlakang pendidikan memadai, merupakan potensi yang dapat dioptimalkan

perannya dalam gerakan tranformatif. Watak pergerakan yang mengedepankan idealisme merupakan kekuatan potensi bagi KOPRI untuk menjalankan fungsi *social control* sebagai salah satu *preassure group*. Dengan kekuatan nilai Islam insklusif dalam bingkai paradigma *Ahlu Sunnah wa al-Jamaah* menjadi landasan moril dalam beraktivitas. Maka KOPRI sangat potensial untuk melakukan trasfomasi menjadi gerakan yang mendukung perjuangan menuju masyarakat yang berkesetaraan.

Gerakan-gerakan yang muncul kemudian memang memiliki kekuatan *human resources* yang kemudian menjadi kiblat bagi gerakan perempuan di Indonesia. Kondisi ini membuat KOPRI menjadi silau dan minder sehingga lebih memilih untuk mengembangkan gerakan perempuan melalui wadah-wadah baru tersebut. Akan tetapi KOPRI memiliki peluang yang bisa dimenej menjadi sebuah kekuatan yang sejajar bahkan di atas gerakan-gerakan perempuan yang baru ada pada saat wacana gender muncul.

E. Membangun Citra Diri Kader

Untuk membangun citra kader KOPRI, dalam buku Potret Gerakan Perempuan PMII disebutkan, yaitu antara lain:

1. Intelektual-Akademik

Pilihan untuk bergumul dalam dunia intelektual-akademik ini seharusnya memang merupakan sesuatu yang intern dalam diri kader. Hal ini mengingat kader KOPRI merupakan insan akademik dalam posisi sebagai mahasiswa aktif yang lekat dengan atribut intelektual.

2. Gerakan Perempuan dan Advokasi Sosial

Kultur gerakan merupakan bagian dari cara penyampaian aspirasi dan bentuk perjuangan kader. Maraknya gerakan perempuan Indonesia

sejak terbukanya keran demokrasi telah manjadi bahasan sendiri dalam agenda global di Indonesia selain isu HAM dan demokratisasi. Gerakan perempuan ini menemukan momentumnya seiring dengan membesarnya laju persoalan pelik yang menimpa kaum perempuan.

Persoalan perempuan yang kemudian menjadi isu tersebut secara garis besar tergambar dari kasus-kasus yang menimpa Tenaga Kerja Wanita yang kian semerawut, kekerasan dalam rumah tangga, jual beli perempuan dan anak atau *trafikking*, masalah pelacuran yang tak mengundang solusi. Dari masalah di atas tak ayal aktivis-aktivis perempuan yang getol menempatkan gerakan perempuan sebagai upaya untuk merubahnya. Karena yang menjadi target utama dalam dari gerakan perempuan adalah sentuhan persoalan perempuan kepada penentu kebijakan. Gerakan masa ini dalam sejarahnya dipandang efektif sebagai aplikasi dan fungsi *agent of control* terhadap kebijakan Negara. Di sinilah kader KOPRI juga turut melibatkan diri.

3. Politisi dan Aktivitas Politik

Menjadi politisi atau menggeluti aktivitas politik bagi kader KOPRI merupakan sesuatu yang prestis. Namun demikian keterlibatan mereka dalam wilayah pertarungan ini masih ditampakkan dengan sikap malu-malu baik ketika mereka masih menjadi mahasiswa atau ketika menyandang gelar alumni. Berbeda dengan laki-laki, wilayah politik yang mengharuskan pemainnya terlibat dalam “pertarungan” membuat kader perempuan enggan berhadapan dengan resiko. Resiko yang dimaksud adalah spekulasi intrik dan konspirasi didalamnya.

4. **Professional**

   Kader yang menentukan pilihan ini dalam hitungan jari. Pasalnya kader KOPRI yang memilki titik kecenderungan menekuni sebuah profesi secara professional (diangap kurang popuer) dibandingkan dengan garapan lainnya, terutama politik. Hal ini bisa dimaklumi mereka tidak dapat enjoy dan mengaktualisasikan gagasannya mengingat iklim yang tercipta tidak (belum) kondusif. Penyebab lainnya adalah latar belakang akademis kader KOPRI yang masih berkisar pada *Islamic Studies.* Komunitas KOPRI tidak mampu mensuplai kebutuhan pasar berupa tenaga kerja yang professional yang mensyaratkan kemampuan teknokratis. Akibatnya posisi dalam birokrasi, sektor swasta tidak diduduki kader-kader KOPRI.

5. **Kelompok Sosial Keagamaan**

   Inilah pilihan citra diri kader Kopri yang menempati posisi mayoritas. Posisi mereka pada kelompok sosial keagamaan, jika mau jujur sesungguhnya bukanlah pilihan prioritas. Bermodal basic pendidikan Pesantren yang sarat nilai-nilai agama membuat kader KOPRI banyak mengambil pilihan dalam bidang sosial-keagamaan setelah lulus kuliah. Pilihan ini terlihat dari aktivitas mereka ketika masih terlibat dalam organisasi PMII. Di KOPRI mereka banyak menyeburkan diri dalam aktivitas sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, advokasi anak-anak jalanan, pendidikan alternatif kaum miskin kota dan pengajian keliling. Aktivitas inilah yang nantinya membentuk citra diri kader dalam keberpihakan pada aktifitas sosial-keagamaan.

F. **Strategi Pengembangan KOPRI**

1. **Penguatan Institusi**

   Strategi pembubaran KOPRI merupakan sikap aksionisme (berbuat asal berbuat) sebagai dampak eforia kesetaraan gender. Karena kesadaran kesetaraan gender yang masih ada pada tingkat retorika tetapi tidak aplikatif pada kebijakan. Karena pembubaran organisasi pada dasarnya bentuk ketidakmampuan sebuah kelompok untuk tetap bertahan. Dari aspek historis menunjukkan tidak ada sesuatu yang biasa melahirkan organisasi yang disebut KOPRI.

   Akan tetapi meminjam analisa Weber tentang masyarakat, KOPRI bisa menjadi sebuah masyarakat berdasarkan konvensi dari individu-indvidu yang bukan sebuah harga mati. KOPRI bisa menjadi sebuah wadah tempat bernegoisasi dari pada individu-individu yang berada didalamnya, sehingga kesempatan - kesempatan tersebut didasarkan pada *practical Needs* dan *strategic needs* dari individu-individu yang ada didalamnya.

2. **Mempertegas Posisi**

   Kebutuhan akan penguatan institusi perempuan merupakan jawaban yang amat penting untuk strategi perjuangan kaum perempuan. Karena sebenarnya pemberdayaan kaum perempuan mau tidak mau masih dilakuakn di dua aras. Aras pertama adalah pemberdayaan secara individual, pemberdayaan secara individual inilah yang mengandalkan seleksi alam. Sehingga hasil yang akan diraih oleh seorang perempuan tergantung seberapa besar bakat dan usahanya sebagai penentu nasib. Aras kedua, adalah pemberdayaan institusi yang kondusif untuk perjuangan perempuan dan institusi yang berspektif jender.

3. **Penguatan Ideologi dan Paradigma Gerakan**

   Penguatan ideologi di sini adalah upaya yang dilakukan untuk menanamkan penggalian/pengkajian/eksplorasi pemikiran yang berkaitan dengan ideolgi yang kita anut yaitu Islam *Ahlu Sunnah wa al-Jamaah*. Bahwa metodologi berfikir *Ahlu Sunnah wa al-Jamaah* masih memungkinkan untuk dikembangkan terutama untuk pemikiran KOPRI tentang kesetaraan gender. Tidak hanya itu bahwa secara umum masih dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut pengembangan pemikiran yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat secara luas, juga tentang hubungan Negara dan masyarakat.

   Bahwa warga KOPRI harus memahami agenda besar KOPRI yang membentuk kader perempuan yang memahami Islam secara insklusif dan pluralis agar nantinya dapat membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadilan gender.

4. **Reformasi Produk Hukum, Struktur dan Manajemen Organisasi**

   Salah satu kelemahan yang menyebabkan KOPRI kurang dapat mempertahankan institusinya secara menyeluruh adalah manajemen organisasi yang lemah. Kurang kontrol atau perhatian dari PB kepada cabang adalah salah satu sebab kader-kader menjadi kurang menaruh kepercayaan kepada KOPRI, namun ini semua tidak lepas dari kemauan dan responsifitas kader, karena pada dasarnya hubungan timbal balik *top-down*, dan *bottom up* antara PB dan cabang yang akan sangat menentukan kelangsungan organisasi.

   Bahasa sederhana dari uraian tersebut adalah perlunya saling menjaga komunikasi sehingga terjalin komunikasi dua arah. Dengan demikian tidak terjadi *miscommunication* dan *misunderstanding* antara struktur yang ada di atas maupun di bawah. Bahwa kesadaran untuk mendapatkan akses informasi

dan beraktivitas adalah kunci utama memanaj institusi KOPRI. Konsolidasi yang intensif akan dapat menumbuhkan kepercayaan kader sehingga akan memperkuat institusi secara menyeluruh. Untuk perlu diciptakan design organisasi yang humanis, fungsional dan rigid antara PB dengan cabang.

5. **Penguatan Intelektual**

   Salah satu agenda besar KOPRI adalah menjadikan kader-kadernya berkualitas, dan ini terkait erat dengan intelektualitas. Penguatan intelektual kader adalah yang mutlak dilakukan dalam upaya memperkuat institusi. Penguatan intelektual sebagai upaya untuk mencerahkan kader agar mampu berfikir dan bertindak kritis terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam lingkungan kita mulai dari masyarakat sampai Negara. Semakin banyak kader yang berkulitas akan semakin menampakkan bergainning KOPRI secara eksternal. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat intelektual kader adalah dengan memperkuat sistem kaderisasi, karena sistem kaderisasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mempunyai *bergainning position* baik secara internal maupun eksternal.

6. **Penguatan Jaringan**

   Salah satu modal untuk terus meningkatkan *bergainning position* KOPRI secara institusi maupun individu adalah adanya kepercayaan dari luar terhadap KOPRI untuk melakukan kerjasama bersama apapun bentuk dan orientasinya.

   Bahwa hal ini menjadi suatu yang urgen mengingat dengan adanya jaringan secara tidak langsung KOPRI telah melakukan *opinion building* ke luar. Pembangunan jaringan keluar tentu saja tidak begitu saja terjadi namun minimal ada upaya bagaimana kita diakui, diterima dan dipercaya untuk bisa

memberikan ide-ide/pemikiran kita sehingga KOPRI tidak hanya besar di rumah namun kecil di luar.

Bahwa KOPRI dengan kekuatan massanya harus mampu menunjukan kelayakan untuk diperhitungkan di luar, terlebih lagi dalam upaya transformasi wacana dan pemberdayaan masyarakat. Akan menjadi kontra-produktif kemudian, bila ternyata KOPRI dengan modal massanya tidak mampu melakukan aksional apapun. Atau minimal ada sesuatu gerakan yang cukup menunjukan ciri khusus KOPRI dibandingkan dengan organisasi lainnya.

7. Penguatan Masyarakat Khususnya Perempuan

Sebagai organsiasi kemasyarakatan yang konsern pada pemberdayaan perempuan KOPRI berusaha untuk melakukan gerakan moral yang dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Khususnya perempuan terutama dalam memahami hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat negara. Oleh karenanya wajib bagi kader-kader untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan bisa menyentuh kepada lini kehidupan, maka profesionalitas kader yang dibarengi kepekaan/respon sosial yang tinggi akan menjadi modal bagi KOPRI untuk dapat memberdayakan masyarakat.

Keberpihakan KOPRI terhadap masyarakat lemah khususnya perempuan yang kurang mendapatkan keadilan akan hak-hak nya adalah menjadi salah satu agenda yang penting dikedepankan. Dasar dari hal ini adalah akses perempuan dalam ruang publik masih lemah dan perlu dilakukan terutama berkaitan dengan penguatan hak-hak politik. Bahwasannya perempuan mempunyai kepentingan lebih besar untuk akses terhadap segala informasi dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan karena perempuan sering kali

dekat dengan persoalan keluarga dan masalah anak-anak sehingga seharusnya lebih mewakili banyak kepentingan masyarakat. Oleh karena KOPRI dituntut untuk memilki kepekaan/respon sosial dengan ikut serta melakukan pemberdayaan perempuan dengan melakukan penguatan hak-hak perempuan khususnya hak politiknya. Capaian akhir dari usaha ini adalah demokratisasi masyarakat.

Materi 05:

SEJARAH PERGERAKAN MAHASISWA, TANGGUNGJAWAB & ANTROPOLOGI KAMPUS

Mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam setiap episode panjang perjalanan bangsa ini. Hal ini tentu saja sangat beralasan mengingat bagaimana pentingnya peran mahasiswa yang selalu menjadi aktor perubahan dalam setiap momen - momen bersejarah di Indonesia. Sejarah telah banyak mencatat, dari mulai munculnya Kebangkitan Nasional hingga Tragedi 1998, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan. Beberapa tahun belakangan ini telah banyak tercatat bahwa sudah beberapa kali mahasiswa menancapkan taji intelektualitasnya secara aplikatif dalam memajukan peradaban bangsa ini dari masa penjajahan Belanda, Masa Penjajahan Jepang, Masa Pemberontakan PKI, Masa Orde Lama, Hingga Masa orde baru, peran mahasiswa tidak pernah absen dalam catatan peristiwa penting tersebut.

A. FASE EKSISTENSI SEMANGAT GERAKAN 1901-1998

1. 1901

Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda sejak masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda. Penderitaan rakyat Nusantara yang tiada tara telah menggugah hati nurani sekelompok orang-orang Belanda dengan melancarkan kritik. Pada tahun 1863 sistem tanam paksa dihapuskan dan Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal, dimana modal-modal swasta mulai diperkenankan masuk ke Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang yang sangat besar bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda.

Keadaan ini telah melahirkan perkebunan milik swasta yang semakin meluas, bahkan mencapai wilayah di Sumatera Timur. Namun pada pelaksanaannya, sistem ini ternyata tidak mengubah nasib rakyat. Sistem ekonomi ini sama-sama mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Sistem politik ekonomi tersebut menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda. Pemerintah kolonial dengan birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-baiknya namun akibatnya adalah tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap keganasan kapitalisme modern semakin lemah, dan kemerosotan kesejahteraan hidup semakin pesat.

Inilah awal mula munculnya ide untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dinamakan Politik Etis. **Politik Etis** atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Politik ini dipelopori oleh *Pieter Brooshooft* dan *C. Th. Van Deventer* yang membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib rakyat pribumi.

Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Program yang dilaksanakan oleh ***Ratu Wilhelmina*** yang pada waktu itu baru bertahta lalu menyampaikan keinginannya pada waktu ia berpidato, di dalam politik etis berisi Tiga kebijakan Van Deventer/***Trias Van Deventer*** atau tiga bidang yaitu **Irigasi, Migrasi, dan Edukasi** . ***Irigasi*** merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk pertanian, dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit. Selain itu dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur terutama jalan raya dan jalur kereta api sebagai

media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. ***Edukasi*** merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda sendiri yaitu mendapatkan tenaga kerja terdidik namun dengan gaji yang murah. Sementara itu ***Emigrasi*** merupakan program pemerataan penduduk Pulau Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa pada tahun 1900. Kawasan perkebunan yang begitu luas tidak berbanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Maka dari itu dibuatlah pemukiman baru di Pulau Sumatera dimana pemukiman tersebut pada awalnya adalah perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pegawai.

Dampak yang ditimbulkan oleh politik etis tentunya ada yang negatif dan positif namun yang perlu diketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang melahirkan golongan terpelajar dan terdidik yang di kemudian hari akan membuat pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam.

2. 1908

Dalam Sejarah peradaban bangsa Indonesia, ada beberapa catatan peristiwa yang layak kita pandang sebagai awal mula pergerakan mahasiswa di tanah air. Pergerakan tersebut bermula pada tahun 1908. Pada masa itu,mahasiswa - mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA mendirikan sebuah wadah pergerakan pertama di Indonesia yang bernama **Boedi Oetomo,** dimana organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Wadah ini merupakan bentuk

sikap kritis mahasiswa tersebut terhadap sistem kolonialisme Belanda yang menurut mereka sudah selayaknya dilawan dan rakyat harus dibebaskan dari bentuk penguasaan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa ini, walaupun terkesan gerakan yang mereka lakukan masih menunjukkan sifat primordialisme Jawa. Organisasi ini berdiri berawal dari kegiatan akademis berupa diskusi rutin di perpustakaan STOVIA yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Indonesia yang belajar di STOVIA antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman. Melalui diskusi itulah mahasiswa - mahasiswa tersebut mulai memikirkan nasib masyarakat Indonesia yang makin memprihatinkan ditengah kondisi penjajahan dan selalu dianggap bodoh oleh Belanda, disamping itu diperparah dengan kondisi para pejabat pemerintahan pada saat itu dari kalangan pribumi (pangreh praja) yang justru makin menindas rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelanggengan jabatannya, seperti menarik pajak yang tingi terhadap rakyat untuk menarik simpati atasan dan pemerintahan Belanda.

Selain itu, pada tahun 1908 ini juga, mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi di Belanda yaitu Drs. Mhd. Hatta mendirikan organisasi Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging pada tahun 1922. Organisasi ini awalnya merupakan suatu wadah kelompok diskusi mahasiswa yang kemudian orientasi pergerakannya lebih jelas dalam hal politik. Misi nasionalisme yang ditunjukkan organisasi ini lebih jelas dipertajam dengan bergantinya nama organisasi ini menjadi Perhimpunan Indonesia. Melalui majalah Indonesia Merdeka, mereka yang tergabung dalam organisasi ini mulai gesit dalam melancarkan propaganda pergerakannya, sudah banyak artikel yang dimuat dalam majalah tersebut yang mengkritisi bagaimana kondisi bangsa pada saat itu, sampai muncul statement

yang mengatakan bahwa sudah saatnya Bangsa Indonesia tidak menyebut negaranya dengan sebutan Hindia Belanda. Termasuk dalam majalah tersebut memuat tulisan yang disebut manifesto 1925 yang isinya antara lain:

1. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri;
2. Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak mana pun dan;
3. Tanpa persatuan kukuh dari pelbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sulit dicapai.

Selain itu, masih ada organisasi pemuda mahasiswa yang lain seperti Indische Partij yang secara radikal menyuarakan kemerdekaan Indonesia,selain itu ada juga Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang arah pergerakan politiknya lebih condong ke ideologi nasionalisme demokratik yang berlandaskan Islam. Yang perlu kita catat dalam sejarah kemahasiswaan periode ini adalah ketika insiatif beberapa mahasiswa pada tahun 1908 tersebut telah memunculkan sebuah momentum bersejarah yang diperingati setiap tahun sebagai hari kebangkitan nasional yang jatuh pada saat Boedi Oetomo didirikan. Momentum inilah yang telah menjadi batu loncatan awal bagi setiap pergerakan bangsa di tahun - tahun berikutnya.

3. 1928

Sejarah berlanjut pada periode berikutnya di tahun 1928. Pada awalnya, mahasiswa di Surabaya yang bernama Soetomo pada tanggal 19 oktober 1924 mendirikan Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club). Di tempat yang berbeda, oleh Soekarno dan kawan - kawannya dari Sekoleah Tinggi Teknik (ITB) di Bandung beriniisiatif untuk mendirikan Kelompok Studi Umum (Algemeene Studi Club) pada tanggal 11 Juli 1925. Pembentukan kedua

kelompok diskusi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap perkembangan pergerakan politik mahasiswa yang semakin tumpul pada masa itu.

Kemudian pada tahun 1926, terbentuklah organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang merupakan organisasi yang berusaha untuk menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia dan lebih menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa. Hal tersebut lah yang kemudian mereka realisasikan dengan menyelenggarakan sebuah kongres paling bersejarah dalam dunia kepemudaan mahasiswa di tanah air. Yaitu Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928 yang kemudian menghasilkan sumpah pemuda yang sangat bersejarah tersebut.

4. 1945

Periode ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, peran pemuda mahasiswa juga tidak lepas dan terlihat sangat vital dalam mewujudkan suatu misi besar bangsa Indonesia pada saat itu yaitu melepaskan diri dari belenggu pejajahan atau merebut kemerdekaan. Kondisi pergerakan mahasiswa pada saat itu tidak semudah pada periode - perode sebelumnya. Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Dan secara praktis, akhirnya mahasiswa - mahasiswa pada saat itu mulai menurunkan intensitas pergerakannya dan lebih mengerucutkannya dalam bentuk kelompok diskusi. Yang berbeda pada masa tersebut adalah, mahasiswa - mahasiswa pada waktu itu lebih memilih untuk menjadikan asrama mereka

sebagai markas pergerakan. Dimana terdapat 3 asrama yang terkenal dalam mencetak tokoh - tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah, yaitu asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Melalui diskusi di asrama inilah kemudian lahir tokoh - tokoh yang nantinya bakal menjadi motor penggerak penting munculnya kemerdekaan bangsa Indonesia.

Tokoh - tokoh tersebut secara radikal dan melalui pergerakan bawah tanah melakukan desakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah melalui radio mereka mendengar bahwa telah terjadi insiden bom atom di Jepang, dan mereka berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mahasiswa - mahasiswa yang terdiri dari Soekarni dan Chairul Saleh inilah yang akhirnya terpaksa menculik tokoh proklamator tersebut sampai ke Rengasdengklok agar lebih memberikan tekanan kepada mereka untuk lebih cepat dalam memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa Rengasdengklok.

5. 1966

Pada masa setelah kemerdekaan, mulai bermunculan secara bersamaan organisasi - organisasi mahasiswa di berbagai kampus. Berawal dari munculnya organisasi mahasiswa yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta, yang dimotori oleh Lafran Pane dengan mendirikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tanggal 5 Februari 1947. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah pergerakan mahasiswa yang dilatarbelakangi oleh 4 faktor utama yang meliputi Situasi Dunia Internasional, Situasi NKRI, Kondisi Mikrobiologis Ummat Islam di Indonesia, Kondisi Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan. Selain itu pada tahun yang sama,

dibentuk pulalah Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang didirikan melalui kongres mahasiswa di Malang. Lalu pada waktu yang berikutnya didirikan juga organisasi - organisasi mahasiswa yang lain seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berhaluan pada ideologi Marhaenisme Soekarno, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GAMSOS) yang lebih cenderung ke ideologi Sosialisme Marxist, dan Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang lebih berpandangan komunisme sehingga cenderung lebih dekat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).Sebagai imbas daripada kemenangan PKI pada pemilu tahun 1955, organisasi CGMI cenderung lebih menonjol dibandingkan dengan organisasi - organisasi mahasiswa lainnya. Namun justru hal inilah yang menjadi cikal bakal perpecahan pergerakan mahasiswa pada saat itu yang disebabkan karena adanya kecenderungan CGMI terhadap PKI yang tentu saja dipenuhi oleh kepentingan - kepentingan politik PKI. Secara frontal CGMI menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi - organisasi mahasiswa lainnya terutama dengan organisasi HMI yang lebih berazazkan Islam. Berbagai bentuk propaganda politik pencitraan negatif terus dibombardir oleh CGMI dan PKI kepada HMI, beberapa bentuk propaganda yang mereka wujudkan yaitu salah satunya melalui artikel surat kabar yang berjudul Quo Vadis HMI. Perseturuan antara CGMI dan HMI semakin memanas ketika CGMI berhasil merebut beberapa jabatan di organisasi PPMI dan juga GMNI, terlebih setelah diadakannya kongres mahasiswa V tahun 1961.

Atas beberapa serangan yang terus menerus dilakukan oleh pihak PKI dan CGMI terhadap beberapa organisasi mahasiswa yang secara ideologi bertentangan dengan mereka, akhirnya beberapa organisasi mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), PMKRI, PMII, Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila

(Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI), mereka sepakat untuk membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Dimana tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain.

Berawal dari semangat kolektifitas mahasiswa secara nasional inilah perjuangan mahasiswa yang dikenal sebagai gerakan angkatan '66 inilah yang kemudian mulai melakukan penentangan terhadap PKI dan ideologi komunisnya yang mereka anggap sebagai bahaya laten negara dan harus segera dibasmi dari bumi nusantara. Namun sayangnya, di tengah semangat idealisme mahasiswa pada saat itu ada saja godaan datang kepada mereka yang pada akhirnya melunturkan idealisme perjuangan mereka, dimana setelah masa orde lama berakhir, mereka yang dulunya berjuang untuk menruntuhkan PKI mendapatkan hadiah oleh pemerintah yang sedang berkuasa dengan disediakan kursi MPR dan DPR serta diangkat menjadi pejabat pemerintahan oleh penguasa orde baru. Namun di tengah gelombang peruntuhan idealime mahasiswa tersebut, ternyata ada sesosok mahasiswa yang sangat dikenal idealimenya hingga saat ini dan sampai sekarang tetap menjadi panutan para aktivis - aktivis mahasiswa di Indonesia, yaitu Soe Hok Gie. Ada seuntai kalimat inspiratif yang dituturkan oleh Soe Hok Gie yang sampai sekarang menjadi inspirasi perjuangan mahasiswa di Indonesia, secara lantang ia mengatakan kepada kawan - kawan seperjuangannya yang telah berbelok idealimenya dengan kalimat "lebih baik terasingkan daripada hidup dalam kemunafikan".

6. 1974

Periode ini sangat berbeda sekali dengan periode sebelumnya di tahun 1966, dimana pada masa pergerakan mahasiswa tahun 1966 mahasiswa melakukan afiliasi dengan pihak militer dalam menumpas PKI. Pada periode 1974 ini, mahasiswa justru berkonfrontasi dengan pihak militer yang mereka anggap telah menjadi alat penindas bagi rakyat. Gelombang perlawanan bermula sejak dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap meneyengsarakan rakyat. Selain itu, isu pemberantasan korupsi juga dengan lantang digalakkan oleh mahasiswa yang mendesak agar pemerintah lebih tegas dalam menjerat koruptor yang terdiri dari pejabat - pejabat pemerintahan saat itu. Melalui pergerakan inilah muncul suatu gerakan yang disebut "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori oleh Arif Budiman dan Hariman Siregar yang menyuarakan isu korupsi dan kenaikan BBM. Menyusul pergerakan mahasiswa yang terus meluas, secara inisisatif mahasiswa membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo.

Namun ketika kebusukan - kebusukan rezim pemerintahan orde baru terus mencuat di permukaan, dengan serta merta pemerintah melakukan berbagai rekayasa politik guna meredam protes massa dan mempertahankan status quo, terlebih menjelang pemilu tahun 1971.

Namun hal tersebut tidak juga berhasil dalam meredam gelombang protes mahasiswa, secara bersama - sama, masyarakat dan mahasiswa terus melancarkan sikap ketidakpercayan mereka terhadap 9 partai politik dan Golongan Karya yang selama ini menjadi wadah aspirasi politik mereka dengan munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971. Dimana gerakan ini dimotori oleh Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan, dan Arif Budiman. Selain itu mahasiswa juga melancarkan kritik kepada pemerintah yang telah melakukan

pemborosan anggaran negara dengan melakukan beberapa proyek eksklusif yang dinilai tidak perlu untuk pembangunan. Salah satunya adalah dengan mendirikan Taman Mini Indonesia Indah, yang sebenarnya proyek - proyek tersebut dijadikan alasan bagi Indonesia untuk terus - menerus menyerap hutang terhadap pihak luar negeri.

Gelombang Protes semakin meledak ketika harga barang kebutuhan semakin melambung dan budaya korupsi di kalangan pejabat pemerintah semakin menular, gelombang protes inilah yang memunculkan suatu gerakan yang dikenal dengan nama peristiwa Malari pada tahun 1974 yang dimotori oleh Hariman Siregar. Melalui gerakan tersebut lahirlah Tritura Baru selain daripada 2 tuntutan yaitu Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga.

7. 1977-1978

Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagain kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes kecil tetap ada.

Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakikat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional.

Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah

yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia.

Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional.

Gerakan bersifat nasional namun tertutup dalam kampus, Oktober 1977

Gerakan mahasiswa tahun 1977/1978 ini tidak hanya berporos di Jakarta dan Bandung saja namun meluas secara nasional meliputi kampus-kampus di kota Surabaya, Medan, Bogor, Ujungpandang (sekarang Makassar), dan Palembang. [1] 28 Oktober 1977, delapan ribu anak muda menyemut di depan kampus ITB. Mereka berikrar satu suara, **"Turunkan Suharto!".** Besoknya, semua yang berteriak, raib ditelan terali besi. Kampus segera berstatus darurat perang. Namun, sekejap kembali tentram.

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1977, berkumpulnya mahasiswa kembali

10 November 1977, di Surabaya dipenuhi tiga ribu jiwa muda. Setelah peristiwa di ITB pada Oktober 1977, giliran Kampus ITS Baliwerti beraksi. Dengan semangat pahlawan, berbagai pimpinan mahasiswa se-Jawa hadir memperingati hari Pahlawan 1977. Seribu mahasiswa berkumpul, kemudian berjalan kaki dari Baliwerti menuju Tugu Pahlawan.

Sejak pertemuan 28 Oktober di Bandung, ITS didaulat menjadi pusat konsentrasi gerakan di front timur. Hari pahlawan dianggap cocok membangkitkan nurani yang hilang. Kemudian disepakati pusat pertemuan nasional pimpinan mahasiswa di Surabaya.

Sementara di kota-kota lain, peringatan hari Pahlawan juga semarak. Di Jakarta, 6000 mahasiswa berjalan kaki lima kilometer dari Rawamangun (kampus IKIP) menuju Salemba (kampus UI), membentangkan spanduk,"Padamu Pahlawan Kami Mengadu". Juga dengan pengawalan ketat tentara.

Acara hari itu, berwarna sajak puisi serta hentak orasi. Suasana haru-biru, mulai membuat gerah. Beberapa batalyon tempur sudah ditempatkan mengitari kampus-kampus Surabaya. Sepanjang jalan ditutup, mahasiswa tak boleh merapat pada rakyat. Aksi mereka dibungkam dengan cerdik.

Konsolidasi berlangsung terus. Tuntutan agar Soeharto turun masih menggema jelas, menggegerkan semua pihak. Banyak korban akhirnya jatuh. Termasuk media-media nasional yang ikut mengabarkan, dibubarkan paksa.

Pimpinan Dewan Mahasiswa (DM) ITS rutin berkontribusi pada tiap pernyataan sikap secara nasional. Senat mahasiswa fakultas tak henti mendorong dinamisasi ini. Mereka bergerak satu suara. Termasuk mendukung Ikrar Mahasiswa 1977. Isinya hanya tiga poin namun berarti. "Kembali pada Pancasila

dan UUD 45, meminta pertanggungjawaban presiden, dan bersumpah setia bersama rakyat menegakan kebenaran dan keadilan".

Peringatan Tritura 10 Januari 1978, dihentikannya gerakan oleh penguasa

Peringatan 12 tahun Tritura, 10 Januari 1978, peringatan 12 tahun Tritura itu jadi awal sekaligus akhir. Penguasa menganggap mahasiswa sudah di luar toleransi. Dimulailah penyebaran benih-benih teror dan pengekangan.

Sejak awal 1978, 200 aktivis mahasiswa ditahan tanpa sebab. Bukan hanya dikurung, sebagian mereka diintimidasi lewat interogasi. Banyak yang dipaksa mengaku pemberontak negara.

Tentara pun tidak sungkan lagi masuk kampus. Berikutnya, ITB kedatangan pria loreng bersenjata. Rumah rektornya secara misterius ditembaki orang tak dikenal.

Di UI, panser juga masuk kampus. Wajah mereka garang, lembaga pendidikan sudah menjadi medan perang. Kemudian hari, dua rektor kampus besar itu secara semena-mena dicopot dari jabatannya. Alasannya, terlalu melindungi anak didiknya yang keras kepala.

Di ITS, delapan fungsionaris DM masuk "daftar dicari" Detasemen Polisi Militer. Sepulang aksi dari Jakarta, di depan kos mereka sudah ditunggui sekompi tentara. Rektor ITS waktu itu, Prof Mahmud Zaki, ditekan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membubarkan aksi dan men-drop out para pelakunya. Sikap rektor seragam, sebisa mungkin ia melindungi anak-anaknya.

Beberapa berhasil tertangkap, sisanya bergerilya dari satu rumah ke rumah lain. Dalam proses tersebut, mahasiswa tetap "bergerak". Selama masih ada wajah yang aman dari daftar, mereka tetap konsolidasi, sembunyi-sembunyi. Pergolakan

kampus masih panas, walau Para Rektor berusaha menutupi, intelejen masih bisa membaca jelas

Periode NKK/BKK

Pada masa inilah pergerakan mahasiswa mulai dimatikan peran dan fungsinya oleh pemerintah, yaitu sejak terpilihnya Soeharto untuk yang ketiga kalinya melalui Pemilihan Umum. Maka guna meredam sikap ktiris mahasiswa terhadap pemerintah dan untuk mempertahankan status quo pemerintahan maka dikeluarkanlah Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) melalui SK No.0156/U/1978. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim. Menyusul diadakannya konsep NKK tersebut maka pemerintah melakukan tindakan pembekuan terhadap beberapa organisasi Dewan Mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia yang kemudian diganti dengan membentuk struktur organisasi baru yang disebut Badan Koordinasi Kampus (BKK). Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U/1979 kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud

tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.

Sehingga praktis, kondisi kehidupan mahasiswa dalam melakukan pergerakan politik menjadi lumpuh. Yang kemudian akhirnya menyebabkan mahasiswa hanya fokus ke urusan akademis dan menjadi apatis. Terlebih lagi dengan munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan yang pada saat itu justru menjadi alat kepentingan politik pemerintah. Sehingga tidak heran pada saat itu kondisi rezim semakin kuat dan tegak.

8. 1990

Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra, menamggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hiden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.

Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara termasuk birokrasi kampus. Sehingga, tidaklah mengherankan bila akhirnya berdiri Dewan

Mahasiswa di UGM tahun 1994 yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air sebagai landasan bagi pendirian model organisasi kemahasiswaan alternatif yang independen.

Dengan dihidupkannya model-model kelembagaan yang lebih independen, meski tidak persis serupa dengan Dewan Mahasiswa yang pernah berjaya sebelumnya upaya perjuangan mahasiswa untuk membangun kemandirian melalui SMPT, menjadi awal kebangkitan kembali mahasiswa pada tahun 1990-an.

Gerakan yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987 - 1990 sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang.

9. 1998

Namun pengekangan terhadap mahasiswa melalui NKK/BKK tidak bertahan lama. Gejolak krisis moneter di seluruh dunia telah membuat kondisi perekonomian di Indonesia terguncang hebat. Hal tersebut ditandai dengan menaiknya angka tukar rupiah terhadap dolar yang menembus Rp 17.000/Dolar. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa yang akhirnya animo pergerakannya mulai bangkit setelah sebelumnya mengalami mati suri yang cukup panjang. Dimulai ketika pada saat 20 mahasiswa UI yang mendatangi gedung MPR/DPR RI denga tegas menolak pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan melalui sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional kepada MPR. Kondisi Indonesia semakin tegang sejak harga BBM melonjak naik hingga 71% yang ditandai dengan beberapa kerusuhan yang terjadi di Medan yang setidaknya telah memakan 6 korban jiwa. Kegaduhan berlanjut pada tanggal 7 Mei dan 8 Mei. Yaitu peristiwa

cimanggis,dimana pada saat itu telah terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis, yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata, Kemudian peristiwa Gejayan di Yogyakarta yang telah merenggut nyawa 1 orang mahasiswa.

Hal tersebut tentu saja makin membuat panas situasi antara mahasiswa dan pemerintah, terutama terhadap militer yang mereka anggap telah berbuat semena-mena terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pun akhirnya semakin merebak dan meluas. Di Jakarta sendiri, ribuan mahasiswa telah berhasil menduduki gedung MPR/DPR RI pada tanggal 19 Mei 1998. Atas berbagai tekanan yang terjadi itulah akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00, presiden RI pada saat itu, yaitu Soeharto resmi mengundurkan diri, dan kemudian menyerahkan jabatannya ke wakil presidennya yaitu Prof.BJ Habibie.

Namun hal tersebut tidak serta merta membuat masyarakat puas, karena mereka masih menganggap bahwa Habibie merupakan antek orde baru. Peristiwa terus berlanjut hingga menjelang akhir tahun, yaitu ketika sidang istimewa MPR digelar pada bulan November. Mahasiswa terus melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Habibie yang masih mereka anggap sebagai regenerasi Orde Baru, dan menyatakan sikap ketidakpercayaan terhadap anggota MPR/DPR RI yang masih berbau orde baru. Selain itu mereka juga mendesak agar militer dibersihkan dari kegiatan politik dan menentang dwifungsi ABRI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di

Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa. Aksi perlawanan terus bergejolak dan ketika itulah tragedi ini bermula. Yaitu ketika beberapa aksi mahasiswa tersebut dihadang oleh pihak militer yang bersenjata api lengkap dengan kendaraan lapis baja mereka. Usaha militer untuk membubarkan mahasiswa telah mengakibatkan bentrok yang cukup hebat, usaha tersebut diwarnai dengan beberapa tembakan senjata yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa secara membabi buta guna membubarkan massa. Alhasil, Tindakan membabi buta yang dilakukan pihak militer pada saat itu telah menyebabkan 17 orang meninggal dunia, dan ratuan lainnya luka berat. Korban meninggal dan luka-luka tidak hanya memakan nyawa mahasiswa saja, mulai dari tim relawan kemanusiaan, wartawan, dan masyarakat juga ikut menjadi korban, termasuk anak kecil yang masih berusia 6 tahun tewas tertembak peluru nyasar.

Peristiwa reformasi inilah yang kemudian menjadi catatan kelam negeri ini, yang telah menumpahkan darah mereka-mereka yang ingin berjuang untuk negeri. Yang juga menjadi titik pencerahan baru bagi perubahan Indonesia di masa selanjutnya. Dimana kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kebebasan pers yang sebelumnya tidak dijumpai pada masa orde baru kembali diperoleh oleh masyarakat di negeri ini. Namun, ada 1 agenda reformasi yang sampai sekarang belum bisa terwujudkan yaitu pemberantasan korupsi yang hingga kini masih menjadi wabah berbahaya bagi stabilitas negara.

Gerakan Mahasiswa 1998

Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998.

Pada April 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya (tanpa wakil presiden), setelah didampingi Try Soetrisno (1993-1997) dan Baharuddin Jusuf Habibie (Oktober 1997-Maret 1998). Namun, mereka tidak mengakui Soeharto dan melaksanakan pemilu kembali. Pada saat itu, hingga 1999, dan selama 29 tahun, Partai Golkar merupakan partai yang menguasai Indonesia selama hampir 30 tahun, melebihi rejim PNI yang menguasai Indonesia selama 25 tahun. Namun, terpilihnya Soeharto untuk terakhir kalinya ini ternyata mendapatkan kecaman dari mahasiswa karena krisis ekonomi yang membuat hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kemiskinan.

Gerakan ini mendapatkan momentumnya saat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Namun para analis asing kerap menyoroti percepatan gerakan pro-demokrasi pasca Peristiwa 27 Juli 1996 yang terjadi 27 Juli 1996. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah

mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:

Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
Laksanakan amandemen UUD 1945,
Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
Tegakkan supremasi hukum,
Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

Gedung parlemen, yaitu Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ dan Forum Kota karena mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR. Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya sang Presiden tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal.

Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. *Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998* juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi. Sampai saat ini, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran HAM berupa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh aparat terhadap keempat orang mahasiswa.

Gerakan tahun 1998

Pembentukan (Krisis keuangan Asia)

Pada bulan **Mei 1998**, **Indonesia** mengalami pukulan terberat **krisis ekonomi 1997-1999**, yang menerpa kawasan **Asia Timur**, **Asia Selatan**, dan **Asia Tenggara**. Meningkatnya **inflasi** dan **pengangguran** menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidak-puasan terhadap pemerintahan zaman **Orde Baru** (**Kabinet Pembangunan**) dan merajalelanya **korupsi** juga meningkat. Presiden Republik Indonesia, setelah masa bakti **1993-1998** bersama **Try Soetrisno**, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi **krisis**. Ini adalah insiden terbaru, ketika mahasiswa Indonesia meneriakkan aspirasi rakyat dan dipukuli karena dianggap akan menimbulkan gangguan.

Tragedi Trisakti

Soeharto mendapatkan surat dari Harmoko, mantan ketua DPR saat itu, ketika sedang menghadiri konferensi tingkat tinggi antar-negara di Mesir pada tanggal 20 Mei 1998. Isi surat itu adalah : "Soeharto harus mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI karena Jakarta tidak aman lagi". Surat ditandatangani oleh 15 orang, termasuk 14 menteri Kabinet Pembangunan VII, yang merasa telah "meninggalkan" Soeharto. Puncak kebencian mereka pada zaman orde baru telah meradang dalam gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan Tragedi Trisakti pada tanggal 12-20 Mei 1998. Saat itu, Soeharto Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, dan pada akhirnya posisi Soeharto digantikan oleh Baharuddin Jusuf Habibie yang

sebelumnya adalah wakil presiden terakhir pada zaman orde baru. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 memang begitu monumental, karena telah berhasil menurunkan Soeharto dari jabatannya.

Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto telah tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Sepanjang aksi unjuk rasa itu, ada empat orang yang tertembak aparat kepolisian. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (1978 - 1998), Heri Hertanto (1977 - 1998), Hafidin Royan (1976 - 1998), dan Hendriawan Sie (1975 - 1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Mereka telah ditemukan tewas di bekas bangunan mal yang terbakar. Alhasil, keluarga keempat mahasiswa yang tertembak mengadukan penembakan oleh aparat yang mereka anggap sebagai pelanggaran ham berat.

Tragedi Semanggi

Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto telah tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. *Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998* juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi. Akhirnya, setelah Soeharto mundur dan Baharuddin Jusuf Habibie menjadi Presiden RI ke-3 untuk periode 1998-2003, pada November 1998, muncul kembali Tragedi Semanggi.

Tragedi Semanggi terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, dan terjadi kembali pada tanggal 24 September 1999, ketika zaman Kabinet Reformasi Pembangunan Baharuddin Jusuf Habibie telah berakhir, walaupun tanpa wakil presiden. Mahasiswa juga menganggap bahwa rejim Baharuddin Jusuf Habibie masih sama dengan rejim Soeharto. Kesamaan yang mudah mereka lihat yaitu Dwifungsi ABRI/TNI. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu, masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa.

Keadaan di Gedung Nusantara boleh dikatakan aman terkendali. Tidak ada satupun mahasiswa yang mengacaukan keamanan berani masuk. Tidak mungkin mereka mampu menerobos pintu gerbang karena telah digembok dan di-las oleh penjaga yang begitu ketatnya. Penjagaan keamanan begitu diperketat sampai ke kawasan Semanggi. Semua kendaraan pribadi dan umum dikosongkan. Namun, ketika mahasiswa bentrok dengan penjaga keamanan yang begitu ketatnya, semua mahasiswa berhasil dibubarkan. Namun, ada sebagian kecil dari mahasiswa yang dibubarkan, mereka meninggal di tempat karena ditembak aparat. Hal tersebutlah yang membuat peristiwa itu dinamakan sebagai "Tragedi Trisakti". Tragedi Semanggi berlanjut pada tanggal 24 September 1999. Sama seperti Tragedi Trisakti, tragedi ini mampu menurunkan tahta kepresidenan Baharuddin Jusuf Habibie yang cuma bertahan 1 tahun. Ketika itu, pada awal September 1999,

sasaran unjuk rasa yang mereka tuju adalah rumah dinas BJ Habibie, yang dituding mendapatkan harta kekayaannnya dari korupsi. Namun, pada 24 September 1999, Baharuddin Jusuf Habibie akhirnya dilengserkan dari jabatannya. Akhirnya, pada bulan Oktober 1999, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Presiden RI 1999-2004, walaupun Kabinet Persatuan Indonesia Abdurrahman Wahid cuma bertahan 2 tahun.

Mahasiswa Sebagai Penancap Tombak Peradaban

Peradaban bangsa ini semakin mengalami perubahan adalah tak lain karena ada peran pemuda mahasiswa di dalamnya. Catatan sejarah tersebut setidaknya telah menjadi bukti bahwa mahasiswa selalu menempatkan diri dalam setiap perubahan historik dan patriotik di negeri ini. Mengapa Harus Mahasiswa???

Berdasarkan karakterisitik alamiahnya, pemuda mahasiswa memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan elemen - elemen masyarakat lainnya. Sebagai seorang yang memiliki jiwa muda, mahasiswa merupakan sesosok figur yang bisa dikatakan memiliki karakter yang masih memiliki idealisme yang tinggi dalam berjuang, mereka tidak segan - segan untuk menyuarakan kekesalan dan kritik mereka terhadap siapapun yang mereka anggap menyimpang dari kondisi ideal. Mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktifitas pendidikan yang terbilang tinggi sehingga mereka beranggapan bahwa ilmu yang mereka dapatkan merupakan sebuah senjata pamungkas untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Mahasiswa juga dikenal kreatif dalam membangun ilmu yang didapatkannya serta mengaplikasikannya ke masyarakat karena secara biologis pemuda masih memiliki kondisi yang fresh untuk berpikir dan bertindak secara

fisik. Mahasiswa sebagai pemuda juga memiliki keingintahuan dan sikap kritis yang tinggi terhadap kondisi di sekitarnya, dan dengan modal intelektualitas yang ia punya ia senantiasa mampu untuk memperjuangkan kondisi sosial yang dilihatnya agar menjadi lebih ideal dan dinamis.

Pada kesimpulannya, mahasiswa memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change (agen perubahan) dan agent of social control (agen pengawas sosial) yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang karena pada intinya apa yang ia buat adalah semata - mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang, yang kedua adalah kekuatan intelektualitasnya, melalui ilmu pengetahuan yang ia raih di bangku pendidikan, ia senantiasa ingin mengaplikasiakan segenap keilmuannya untuk gerakan moral dan pengabdian kepada masyarakat, karena baginya ilmu merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang harus diamalkan, yang ketiga adalah mahasiswa sebagai seorang pemuda memiliki semangat dan jiwa muda yang merupakan karakter alami yang pasti dimiliki oleh setiap pemuda secara biologis, dimana melingkupi kekuatan otak dan fisik yang bisa dikatakan maksimal, lalu kratifitas, responsifitas, serta keaktifannya dalam membuat inovasi yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

Mungkin hal - hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa pemuda mahasiswa yang selalu menjadi aktor peradaban dan tulang punggung perjuangan bangsa dalam membangun peradabanya, bahkan seorang Soekarno juga mengakui kemampuan yang dimiliki pemuda mahasiswa tersebut melalui statementnya "berikan aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncang dunia". Dan memang begitu lah kenyataannya dan fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun perihal tinta emas yang telah digoreskan oleh pemuda mahasiswa dimanapun dia berada.

B. MAHASISWA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Berbicara tentang Mahasiswa, sebagian besar dari kita sudah mengetahui siapa yang disebut Mahasiswa. Semua orang mempunyai pengertian yang berbeda tentang Mahasiswa dan semua itu tidak ada yang salah (perspektif orang yang bicara).

A. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Perguruan tinggi tertentu. Selanjutnya menurut Sarwono (1978) Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di Perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun.

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan Perguruan Tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.

Mahasiswa menurut Knopfemacher (dalam Suwono, 1978) adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan di harapkan menjadi calon-calon intelektual.

Dari pendapat di atas bisa dijelaskan bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang nantinya diharapkan menjadi calon-calon intelektual.

Namun jika kita mendefinisikan mahasiswa secara sederhana, maka kita akan menafikan peranannya yang nyata dalam perkembangan arus bangsa. Ketika kita mencoba menyederhanakan peran mahasiswa dengan mengambil definisi ‘setiap orang yang belajar di perguruan tinggi’, definisi itu akan mempersempit makna atau esensi dari mahasiswa itu sendiri. Mengingat sejarah panjang

mahasiswa dalam peranannya membangun bangsa, seorang Indonesianis, Ben Anderson menyatakan bahwa, “sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya”.

Fenomena mahalnya biaya pendidikan, menuntut mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Sehingga segala energi dikerahkan untuk mendapat gelar sarjana atau diploma sesegera mungkin. Tak ayal lagi tren study oriented mewabah di kalangan mahasiswa. Pertanyaan adalah, apakah cukup dengan bekal ilmu yang dipelajari dari bangku kuliah dan indeks prestasi yang tinggi untuk mengarungi kehidupan pasca wisuda? Ternyata tidak. Dunia kerja yang akan digeluti oleh alumnus perguruan tinggi tidak bisa diarungi dengan dua modal itu saja. Ada elemen yang harus dipertimbangkan, yakni kemampuan soft skill. Kemampuan ini terkait dengan kemampuan berkomunikasi dan bahasa, bekerja dalam satu team, serta kemampuan memimpin dan dipimpin.

B. Peran Mahasiswa

1. Agent Of Change(Generasi Perubahan)

Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan.Artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya. Dengan harapan bahwa suatu hari mahasiswa dapat menggunakan disiplin ilmunya dalam membantu pembangunan indonesia untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Mahasiswa adalah salah satu harapan suatu bangsa agar bisa berubah ke arah lebih baik.hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki intelek yang cukup bagus dan cara berpikir yang lebih matang, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah.

Hal-hal yang menunjang :

- Kesadaran Sosial (kepekaan serta kesadaran tentang kehidupan masyarakat, mengerti keadaan yang berkenaan dengan masyarakat, perlu diadakan komunikasi)
- Kematangan Berpikir (sudah dipikirkan (dipertimbangkan) baik-baik)
- Sikap Intelektual

2. Social Control(Generasi Pengontrol)

Sebagai generasi pengontorol seorang mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar.Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan. Mahasiswa diupayakan agar mampu mengkritik,memberi saran dan memberi solusi jika keadaan sosial bangsa sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa,memiliki kepekaan, kepedulian, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar tentang kondisi yang teraktual. Asumsi yang kita harapkan dengan perubahan kondisi social masyarakat tentu akan berimbas pada perubahan bangsa. Intinya mahasiswa diharapkan memiliki sense of belonging yang tinggi sehingga mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu menjadi orang yang senantiasa mencarikan solusi berbagai problem yang sedang menyelimuti mereka.

Hal-hal yang menunjang :

- Kemantapan Spiritual yang stabil, aman, teguh hati, tetap tidak berubah yang berhubungan dengan kejiwaan (rohani/batin)
- Integritas Pribadi
- Ketauladanan

3. Iron Stock(Generasi Penerus)

Sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di pemerintahan kelak. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan bangsa Indonesia . Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terus-menerus. Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan.

Dalam hal ini mahasiswa diartikan sebagai cadangan masa depan. Pada saat menjadi mahasiswa kita diberikan banyak pelajaran, pengalaman yang suatu saat nanti akan kita pergunakan untuk membangun bangsa ini.

Hal-hal yang menunjang :

- Kemandirian (bersifat keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain)
- Tanggung jawab pembelajaran diaman keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb
- Penguasaan Iptek

4. Moral Force(Gerakan Moral)

Mahasiswa sebagai penjaga stabilitas lingkungan masyarakat, diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Bila di lingkungan sekitar terjadi hal-hal yang menyimpamg dari norma yang ada, maka mahasiswa dituntut untuk merubah dan meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mahasiswa sendiripun harus punya moral yang baik agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan juga harus bisa merubah ke arah yang lebih baik jika moral bangsa sudah sangat buruk, baik melalui kritik secara diplomatis ataupun aksi.

Hal-hal yang menunjang :

- Mampu terjun dalam lingkungan apapun
- Tanggung jawab (keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb)
- Tanggap dan kritis (segera mengetahui keadaan dan memperhatikan sungguh-sungguh,cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yg timbul)

C. Fungsi Mahasiswa

Berdasarkan tugas perguruan tinggi yang diungkapkan M.Hatta yaitu membentuk manusisa susila dan demokrat yang

- Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat
- Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan
- Cakap memangku jabatan atau pekerjaan di masyarakat

Berdasarkan pemikiran M.Hatta tersebut, dapat disederhanakan bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis, yang selanjutnya hal tersebut akan menjadi sebuah fungsi bagi mahasiswa itu sendiri. Insan akademis itu sendiri memiliki dua ciri yaitu : memiliki sense of crisis, dan selalu mengembangkan dirinya.

Insan akademis harus memiliki sense of crisis yaitu peka dan kritis terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya saat ini. Hal ini akan tumbuh dengan sendirinya bila mahasiswa itu mengikuti watak ilmu, yaitu selalu mencari pembenaran-pembenaran ilmiah. Dengan mengikuti watak ilmu tersebut

maka mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai masalah yang terjadi dan terlebih lagi menemukan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.

Insan akademis harus selalu mengembangkan dirinya sehingga mereka bisa menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Dalam hal insan akademis sebagai orang yang selalu mengikuti watak ilmu, ini juga berhubungan dengan peran mahasiswa sebagai penjaga nilai, dimana mahasiswa harus mencari nilai-nilai kebenaran itu sendiri, kemudian meneruskannya kepada masyarakat, dan yang terpenting adalah menjaga nilai kebenaran tersebut.

D. Posisi Mahasiswa

Mahasiswa dengan segala kelebihan dan potensinya tentu saja tidak bisa disamakan dengan rakyat dalam hal perjuangan dan kontribusi terhadap bangsa. Mahasiswa pun masih tergolong kaum idealis, dimana keyakinan dan pemikiran mereka belum dipengarohi oleh parpol, ormas, dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa dapat dikatakan memiliki posisi diantara masyarakat dan pemerintah.

Mahasiswa dalam hal hubungan masyarakat ke pemerintah dapat berperan sebagai kontrol politik, yaitu mengawasi dan membahas segala pengambilan keputusan beserta keputusan-keputusan yang telah dihasilkan sebelumnya. Mahasiswa pun dapat berperan sebagai penyampai aspirasi rakyat, dengan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dilanjutkan dengan analisis masalah yang tepat maka diharapkan mahasiswa mampu menyampaikan realita yang terjadi di masyarakat beserta solusi ilmiah dan bertanggung jawab dalam menjawab berbagai masalah yang terjadi di masyarakat.

Mahasiswa dalam hal hubungan pemerintah ke masyarakat dapat berperan sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu membantu menyosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tak jarang kebijakan-kebijakan pemerintah mengandung banyak salah pengertian dari masyarakat, oleh karena itu tugas mahasiswalah yang marus "menerjemahkan" maksud dan tujuan berbagai kebijakan kontroversial tersebut agar mudah dimengerti masyarakat.

Posisi mahasiswa cukuplah rentan, sebab mahasiswa berdiri di antara idealisme dan realita. Tak jarang kita berat sebelah, saat kita membela idealisme ternyata kita melihat realita masyarakat yang semakin buruk. Saat kita berpihak pada realita, ternyata kita secara tak sadar sudah meninggalkan idealisme kita dan juga kadang sudah meninggalkan watak ilmu yang seharusnya kita miliki. Contoh kasusnya yang paling gampang adalah saat terjadi penaikkan harga BBM beberapa bulan yang lalu.

Perjuangan-perjuangan yang dilakukan mahasiswa kini sudah kehilangan esensinya, sehingga masyarakat sudah tidak menganggapnya suatu harapan pembaruan lagi. Sedangkan golongan-golongan atas seperti pengusaha, dokter, dsb merasa sudah tidak ada lagi kesamaan gerakan. Perjuangan mahasiswa kini sudah berdiri sendiri dan tidak lagi "satu nafas" bersama rakyat.

Oleh karena itu Mahasiswa harus tetap menjaga idealismenya sebagai agen kontrol sosial (agent of social control) dan agen perubahan sosial (agent of social change). Sejak era pra kemerdekaan sampai era reformasi, mahasiswa mampu mengambil peran strategis bagi perubahan sosial, politik dan ekonomi.

E. Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa

Dasar pikir perguruan tinggi dipandang sebagai institusi independen, merupakan hal yang menguatkan pemahaman kita bahwa didalamnya terisi oleh

para intelektual bangsa dan calon-calon pemimpin masa depan yang mempunyai spesifikasi ilmu masing-masing, di STAIN ada mahasiswa pendidikan Agama islam, Tadris bahasa Inggris, Pendidikan bahasa Arab, Psikologi islam, Komunikasi islam, dan lain sebagainya. Tuntutan atau tanggung jawab ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sebuah perguran tinggi membawa kita ke pertarungan sesungguhnya yaitu relaitas dalam bermasrakat nantinya.

Proses pembelajaran disekolah-sekolah maupun diperguruan tinggi ditujukan untuk membekali diri pelajar untuk dapat menjawab tuntutan yang ada dimasyarakat pada umumnya yakni melalui transformasi keilmuan dapat tercipta pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan peningkatan taraf hidup berbangsa dan bernegara.

Yang menjadi tugas sahabat-sahabati adalah mengamalkan ilmu yang sahabat-sahabati dapatkan dikampus nantinya untuk kepentingan dalam bermasyarakat. Baik dalam hal ikut andil dalam memberikan tawaran solusi dari sebuah masalah yang dihadapi, peningkatan SDM, ataupun yang lain.

Sebagai mahasiswa kita mempunyai peran double, pertama sebagai kaum terpelajar yang kedua sebagi anggota dari masyarakat. Oleh karena itu dengan sendirinya tanggung jawabnya juga menjadi lebih besar karena memainkan dua peran sekaligus. Mahasiswa mempunyai kekuatan dalam daya nalar dan keilmuannnya dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun, unsur penting dari ilmu dan daya pikir itu adalah entitas nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Seperti yang disampaikan oleh KH. Idham Cholid, bahwa ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan.

Perguruan tinggi adalah sebuah institusi yang tidak sekedar untuk kuliah, mencatat pelajaran, pulang dan tidur. Tapi harus dipahami bahwa perguruan tinggi adalah tempat untuk penggemblengan mahasiswa dalam melakukan

kontempelasi dan penggambaran intelektual agar mempunyai idealisme dan komitmen perjuangan sekaligus tuntutan perubahan.

Penggagasan terhadap terminologi perguruan tinggi tidak akan bisa dilepaskan dari suplemen utama, yaitu mahasiswa. Stigma yang muncul dalam diskursus perguruan tinggi selama ini cenderung berpusat pada kehidupan mahasiswa. Hal ini sebagai konsekuensi logis agresitivitas mereka dalam merespon gejala sosial ketimbang kelompok lain dari sebuah sistem civitas akademika.

Akan tetapi fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa derap modernisasi di Indonesia dengan pembangunan sebagai ideologinya telah memenjarakan mahasiswa dalam sekat institusionalisasi, transpolitisasi dan depolitisasi dalam kampus. Keberhasilan upaya dengan dukungan penerapan konsep NKK/BKK itu, pada sisi lain mahasiswa dikungkung dunia isolasi hingga tercerabut dari realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, mahasiswa mengalami kegamangan atas dirinya maupun peran-peran kemasyrakatan yang semestinya diambil. Mahasiswapun tidak lagi memiliki kesadaran kritis dan bahkan sebaliknya bersikap apolitis.

Melihat realitas seperti itu maka perlu ditumbuhkan kesadaran kritis mahassiwa dalam merespon gejala sosial yang dihadapinya, karena di samping belum tersentuh kepentingan praktis, mahasiswa lebih relatif tercerahkan (well informed) dan potensi sebagai kelompok dinamis yang diharapkan mampu mempengaruhi atau menjadi penyuluh pada basis mayarakat baik dalam lingkup kecil maupun secara luas. Dengan tataran ideal seperti itu, semestinya mahasiswa dapat mengambil peran kemasyrakatan yang lebih bermakna bagi kehidupan kampus dan mayarakat.

C. ANTROPOLOGI KAMPUS

A. Pengertian Kampus

Kampus, berasal dari bahasa Latin; campus yang berarti "lapangan luas", "tegal". Dalam pengertian modern, kampus berarti, sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Bisa pula berarti sebuah cabang daripada universitas sendiri. Misalnya, Universitas Indonesia di Jakarta, yang memiliki 'kampus Salemba' dan 'kampus Depok', atau Universitas Diponegoro yang memiliki 'kampus Pleburan' dan 'kampus Tembalang', atau pola IAIN yang dulu mempunyai banyak cabang di daerah yang sekarang berubah menajdi STAIN, atau seperti yang sekarang dijalani UWH Semarang yang mempunyai banyak cabang di daerah.

Kampus juga terkadang menyediakan asrama untuk mahasiswa. Di Inggris dan banyak negara jajahannya seperti Amerika Serikat dan lain-lain, sebuah kampus terdiri dari universitas atau sekolah dengan asrama atau tempat kos atau pondok para mahasiswa. Di sana sebuah gedung sekolah berada di kompleks yang sama dengan gedung penginapan. Di Indonesia hal-hal seperti ini kadang-kadang ada pula, terutama di tempat akademi militer, dan sekarang mulai dilakukan pula oleh beberapa kampus besar seperti UI, Undip, dan IAIN, dengan mendirikan asrama di sekitar kampus akan membuat mahasiswa lebih banyak mengabiskan waktunya untuk studi dan mudah dikontrol oleh pihak kampus.

Kampus merupakan tempat belajar-mengajar berlangsungnya misi dan fungsi perguruan tinggi. Dalam rangka menjaga kelancaran fungsi-fungsi tersebut, Upaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-ketentuan di dalam kampus.

B. Norma Akademik (Etika Kampus)

Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa Ubaya berkaitan dengan aktivitas akademik. Adapun tujuan norma akademik adalah agar para mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu dan/seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan baik masalah-masalah akademik maupun masalah-masalah non akademik.

Masalah akademik adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler, Masalah non akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan non kurikuler. Sedangkan Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma dan etika kampus. Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku/atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Ubaya. Etika kampus meliputi 2 hal penting yaitu ketertiban dan tata krama.

C. TIPOLOGI MAHASISWA

Ada kampus pasti ada civitas akademika, baik rektor, pembantu rektor, dekan, dosen, pegawai, dan mahasiswa. Semua civitas akademika tersebut satu sama lainnya saling terkait. Mahasiswa sebagai komponen utama (karena jumlahnya lebih banyak ketimbang yang lainnya) sangat penting duperhatikan bagi denyut nadi kampus. Mahasiswa datang dari berbagai penjuru daerah tentu mempunyai latar belakang dan karakter yang berbeda-beda.

Sebagai mahasiswa, mayoritas anggota baru PMII perlu memahami berbagai jenis tipologi mahasiswa, dan kira-kira ingin menampatkan dirinya dalam tipe seperti apa. Kita meconba melakukan klasifikasi atas tipologi mahasiswa, walau ini tidak bersifat paten karena setiap diri kita bisa membuat tipologi sesuai dengan yang kita lihat dan rasakan. Anda sendiri bisa memegang

dua katagori atau tiga bahkan empat sekaligus dari tipologi yang kitra susun ini. Bahkan mungkin masih membuka munculnya jenis tipologi lainnya. Yang penting semoga Anda bisa berguna bagi diri Anda sendiri dan bagi orang lain dalam lingkungan kehidupan keluarga, organisasi dan masyarakat.

1. Mahasiswa Pemimpin (Aktivis)

Tipikal mahasiswa seperti ini selalu terlihat mencolok dan aktif dibandingkan mahasiswa lainnya. Hidupnya di perkuliahan sangat bervariatif – diisi dengan berbagai kegiatan, dan ia tidak hanya belajar dari kuliah semata, namun juga belajar dari lingkungan. Ia akan aktif di organisasi, baik intra maupun ektra kampus. Biasanya –tapi tidak mengikat- tipe mahasiswa seperti ini tidak memiliki keinginan yang besar untuk lulus terlalu cepat, karena ia mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Cita-citanya, biasanya ingin menjadi pemimpin perusahaan, lurah, bupati, DPR, menteri, bahkan presiden.

2. Mahasiswa Pemikir (Kritis)

Tipikal mahasiswa jenis ini selalu berpikir dan terus berpikir. Hobinya membaca buku, diskusi dan menulis. Terkadang orang jenis ini –karena terus belajar- tanpa menghiraukan sekitarnya, agar bisa mendapatkan jawaban atas apa yang dipikirkannya. Biasanya tipe mahasiswa seperti ini jika telah lulus ingin jadi ilmuwan, peneliti, dosen atau akademisi.

3. Mahasiswa Study Oriented (Akademis)

Tipikal mahasiswa jenis ini selalu rajin masuk kuliah dan melaksanakan tugas-tugas akademik. Mahasiswa jenis ini tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di kampus. Pokoknya yang penting mendapatkan nilai bagus dan cepat lulus.

4. Mahasiswa Hedonis

Tipe mahasiswa seperti ini tiada banyak berpikir, tidak mau aktif di organisasi. Ia selalu menjalani kehidupan dengan hedonis, glamour, dan happy-happy. Kalau ke kampus sering memakai pakaian yang norak, memakai mobil, dan nongkorong di mall, kafe, dan tempat hiburan lainnya.

5. Mahasiswa Agamis

Tipikal mahasiswa seperti ini kemana-mana selalu membawa al-Qur'an, berpakaian ala orang Arab, tampil (sok) islami, menjaga jarak terhadap lain jenis yang tidak muhrim.

6. . Mahasiswa Apatis

Tipikal Mahasiswa yang tak memiliki daya emosional terhadap disekelilingnya, cenderung bersikap cuek, acuh tak acuh akan kondisi yang mungkin saja membutuhkan dirinya.

D. PMII DAN REKAYASA KAMPUS

Dunia perpolitikan mahasiswa yang tak pernah lepas dari wilayah kampus membuat PMII mau atau tidak mau akan terlibat dalam pusaran rebutan kekuasaan kampus. Meskipun diakui ataupun tidak, mahasiswa pada umunya cenderung bersikap apolitis dengan berbagai isu kebijakan birokrat kampu s dan para pejabat mahasiswa, namun tetap saja mahasiswa berpolitik dalam arti yang lebih luas. Dikarenakan politik memiliki lingkup yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, tergantung sudut pandang masing-masing.

PMII sebagai organisasi ekstra kampus membina dan mendistribusikan kader-kadernya untuk aktif dalam lembaga-lembaga kampus, bahkan akan mendorong kadaer-kader terbaik memimpin lembaga-lembaga tersebut. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut, bagi PMII adalah sebagai ruang

distribusi kader karena di lembaga tersebut kader PMII bisa menempa dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya agar lebih maju dan profesional.

PMII memandang lembaga intra kampus sangat strategis sebagai wahana kaderisasi. Pada umumnya, ada beberapa jenis lembaga kampus yang memiliki otoritas tertentu dalam mengayomi kampus dan mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Fakultas/Jurusan (HMF/J) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Lembaga-lembaga tersebut bermain dalam wilayah internal kampus dan kepengurusannya berisikan mahasiswa yang tercatat masih aktif program studinya. Secara umum ke tiga jenis lembaga ini memiliki andil penting dalam rekayasa kampus. Mau kemana dan bagaimana nantinya kampus akan dikelola, lembaga inilah yang akan mewujudkannya dalam tataran kerja nyata di lapangan.

Dengan menguasai lembaga intra kampus, PMII akan semakin meneguhkan perjuangannya dalam menyalurkan aspirasi mahasiswa di segala lapisan baik akademisi, organisatoris hingga preman kampus. Perlu diingat bahwa Perguruan Tinggi merupakan salah satu sarana yang dibuat dalam meningkatkan pembangunan negara secara umum, oleh karena itu tak heran bahwa banyak perubahan besar yang diawali dari gerakan lembaga kemahasiswaan ini. Adanya lapangan bola, internet, pustaka hingga tempat parkir merupakan fasilitas yang diberikan karena adanya sebuah permintaan yang dalam hal ini diajukan oleh mahasiswa secara umum dan disampaikan kepada pihak birokrat melalui lembgaga kemahasiswaan jalur komunikasi antara mahasiswa dan birokrat kampus. Ketika birokrat kampus serta lembaga-lembaga ini tidak mampu berkoordinasi dalam mengaspirasikan harapan civitas kampus umum, maka akan timbul saling ketidakpercayaan, stagnansi hingga kemerosotan akreditasi kampus dalam tataran akademis, fasilitas dan budaya.

Demikianlah paparan seputar kehidupan perkuliahan, dimana kampus dan mahasiswa berada. Kampus bisa menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan aktualisasi dan apresiasinya sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan sisi positif yang dimiliki mahasiswa. Kesempatan seperti ini tentu tidak dimiliki mereka yang tidak sempat belajar di kampus.

Sebagai bagian dari elemen mahasiswa, PMII memandang sangat vital keberadaan kampus, tidak hanya semata-mata untuk tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai wahana untuk menempa dan mengembangkan bakat potensi yang dimiliki para anggotanya.

Materi 06:

SEJARAH BANGSA INDONESIA

A. Asal-Usul Nama dan Sebutan Indonesia

1. Asal Mula Nama Indonesia

Istilah untuk nama Indonesia terbentuk dari kata indo dan nesia. Istilah indo berasal dari kata *Indie*, sedangkan *nesia* berasal dari kata *nesos* yang berarti kepulauan. Jadi, kata Indonesia berarti Kepulauan Indie, yaitu deretan kepulauan yang berada di antara benua Asia dan Australia. Selanjutnya, siapakah tokoh-tokoh yang menemukan dan memperkenalkan nama tersebut kepada masyarakat dunia?

Istilah Indonesia ditemukan *oleh James Richardson Logan*, seorang ahli hukum kelahiran Skotlandia pada tahun 1847. Istilah Indonesia kemudian dipergunakan oleh Maxwell dalam bukunya yang berjudul "The Island of Indonesia" pada tahun 1862. Nama Indonesia makin terkenal berkat jasa Prof. Adolf Bastian yang menulis buku "Indonesien Oder die Inselndes Malaychen Archiples" pada tahun 1884.

Pada tahun 1859, *Multatuli* (E.F.E Douwess Dekker) memakai istilah Insulinde pada bukunya yang berjudul *"Max Havelar"*, yang tidak lain adalah istilah untuk Indonesia. Pada tahun 1913, muncul istilah Indonesische dari kalangan pelajar dan mahasiswa kita di Negri Belanda. Tanggal 28 Oktober 1928 nama Indonesia diikrarkan menjadi nama resmi bangsa yang mendiami wilayah kepulauan dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua). Sejak tanggal 17 Agustus 1945 nama Indonesia resmi menjadi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diahkannya UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara pada 18 Agustus

1945, maka segala sesuatu dalam perikehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai wawasannya diatur menurut dan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila beserta asas-asasnya.

2. Sebutan Indonesia

Pada abad ke-4 Masehi dalam kitab Ramayana, tanah air kita dengan Dvipanta atau Dwipantara yang berasal dari kata dvipa atau dwipa yang berarti pulau-pulau. Serta kata antara tang diartikan wilayah yang berada di antara. Jadi Dvipantara atau Dwipantara diartikan sebagai "kepulauan di antara muara Sungai Gangga dan Samudra Teduh (Samudra Pasifik)."

Menurut prasasti Gunung Wilis (1269 M), pada zaman Prabu Kertanegara dari kerajaan Singasari, ditemukan istilah Nusantara yang terbentuk dari kata nusa yang berarti pulau atau kepulauan dan antara. Nusantara berrati Keplauan di antara Pulau Nicobar dan Pulau Bismark yang menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Singasari di Jawa Timur.

Dalam buku Negarakertagama (1365 M) ditemukan istilah Nuswantara, yang dimaksudkan pula-pulau Majapahit yang berada diluar yang telah dikuasai dan bersahabat dengan Majapahit. Selanjutnya oleh Mahapatih Gajah Mada, gugusan kepulauan dinamakan Mandala Nuswantara.

Menurut Sejarah Melayu dikenal dengan istilah Nusa Tamara yang ternyata sebutan lain Nusantara.

Menurut tulisan Camunda (1332 M) ditemukan istilah Sadwipantar, Degantara, Dirgantara yang tidak lain adalah Nusantara.

John Crawfurd menamakan Nusantara dengan istilah Indian Archipelago yang diartikan gugusan kepulauan di sebelah timur Sungai Gangga, Selanjutnya istilah itu merupakan sebutan wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, atau disebut benua Kepulauan.

Menurut istilah Belanda, Indonesia disebut sebagai Indische Arcipel yang berarti Kepulauan India. Maka wilayah yang dijajah Belanda disebut dengan nama Netherlands Oost Indische Archipel.

Multatuli (E.F.E Douwess Dekker) dalam bukunya Max Havelar menyebut Indonesia dengan Insulinde yan terbentuk dari kata Inselnds dan Indie yang artinya pulaupulau Hindia

Menurut Peter W. Schmith, kepulauan Indonesia disebut Gugusan Kepulauan Austronesia, yaitu pulau-pulau di selatan yang membentang dari Madagaskas sampai Pulau Paskah.

Prof. Dr. ST. Munadjat Danusaputro, SH menyebut Indonesia sebagai Indrajaya karena posisi Indonesia di antara jalan silang transportasi dan komunikasi dunia. Indrajaya merupakan singkatan dari "Indonesia Raya di Antara Jalan Silang Dunia".

3. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia - Bangsa Indonesia adalah sekelompok masarakat indonesia yang bersatu atau dipersatukan karna adanya persamaan sejarah dan nasip di masa lampau, serta memiliki cita-cita maupun tujuan yang sama untuk kehidupan di masa yang akan datang.

Menurut Surjomiharjdjo (1989) perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di Negara-negara asia yang pernah mengalami prosess penjajahan, pada umumnya mencapai puncak pada pertengahan abad ke 20 yakin melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945-1955 negara-negara yang merdeka dalam periode tersebut selain Indonesia adalah srilangka dan libanon (22 november 1943), pilipina (4 juli 1946), yordania (22 Maret 1946), Pakistan dan India (15 agustus 1947), miyanmar atau burma (4 januari 1948), Vietnam(20 juli 1954) dan srilangka (4 febuari 1948).

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Faktor yang melatarbelakangi kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur adalah banyaknya perubahan di Eropa yang meliputi berbagai aspek kehidupan, di antaranya sebagai berikut :

1. Runtuhnya Kekaisaran Romawi

   Pada masa kejayaannya, kekuasaan kekaisaran Romawi meliputi hampir seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus. Namun, pemerintahan ini akhirnya runtuh pada tahun 476 M. Hubungan dagang yang terjalin antara Eropa dengan Asia pun mengalami kemunduran, bahkan berakibat kemerosotan di segala bidang kehidupan. Zaman kemunduran ini disebut zaman kegelapan (Dark Ages). Runtuhnya Romawi mengakibatkan tata kehidupan bangsa-bangsa Eropa yang semula berkiblat pada hukum Romawi menjadi kacau.

2. Perang Salib

Perang ini terjadi dengan melibatkan orang-orang Kristen Eropa yang berhadapan dengan orang Turki Seljuk dan orang-orang Arab. Disebut Perang Salib karena pasukan Kristen menggunakan tanda salib dalam pakaian mereka. Sementara bagi orang Islam, perang ini disebut dengan perang suci. Perang Salib berlangsung kurang lebih 200 tahun yang terbagi dalam tujuh periode.

Penyebab perang ini salah satunya memperebutkan kota suci Yerusalem. Pahlawan Islam yang terkenal dalam perang ini adalah Salahuddin Al Ayyubi yang berhasil merebut kembali Kota Yerusalem yang telah dikuasai kerajaan Kristen selama hampir 100 tahun. Salahuddin mengalahkan pasukan Salib dalam Perang Khitin. Selanjutnya Raja Inggris Richard The Lion Heart menghimpun kekuatan raja-raja Eropa untuk mengambil kembali Kota Yerusalem. Namun, mereka gagal dan pulang ke Eropa dengan membawa kekalahan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Salib adalah sebagai berikut:

a. Adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem.
b. Merebut Spanyol yang telah tujuh abad dikuasai oleh Dinasti Umayyah.
c. Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Aleksandria.

Dampak adanya Perang Salib adalah sebagai berikut.

a. Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung.
b. Bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan Iptek secara besar-besaran.
c. Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia Timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan.

3. Jatuhnya Konstantinopel ke Tangan Turki Utsmani

Pada awalnya bangsa-bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dari Asia, termasuk dari Indonesia melalui para pedagang muslim yang banyak berdagang di kawasan Laut Tengah. Akan tetapi, semua itu berubah pada tahun 1453 ketika Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi–Byzantium. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Muhammad II menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah secara langsung.

4. Penjelajahan Samudra

Faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah sebagai berikut.

a. Teori Heliosentris dari Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat mendorong kawan-kawan Copernicus ingin membuktikannya. Salah satunya ialah Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat, serta laut-laut di bumi saling berhubungan. Teori ini membantah Teori Geosentris dari Ptolomeus yang menyatakan bumi datar.
b. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia Timur (Cina) yang tertuang dalam buku yang ditulis oleh temannya, Rustichello, yang berjudul The Travels of Marco Polo (Perjalanan Marco Polo). Selama ratusan tahun, catatan perjalanan Marco Polo ini menjadi sumber informasi tentang Cina bagi bangsa Eropa.
c. Penemuan kompas, mesiu, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran.
d. Adanya ambisi untuk melaksanakan semboyan 3 G, yaitu gold (mencari emas atau kekayaan), glory (mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan), dan gospel (menunaikan tugas suci menyebarkan agama Nasrani).

Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Semangat para pelaut inilah yang selanjutnya mendorong penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa lain.

4. Masa Kolonial Bangsa Portugis

Sebelum negara ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejamnya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada 1509. dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque Portugis

dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate.

Sejatinya Bangsa Indonesia meluncurkan berbagai perlawanan kepada Portugis. Salah satu perlawan yang terkenal ialah perlawan Fatahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa (Jakarta). kala itu Fatahillah dapat menyapu bangsa Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Kemudian oleh Fatahillah nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta.

5. Masa Kolonial Bangsa Spanyol

Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung. Kalau Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol kemudian membangun benteng di Tidore. Pembangunan benteng ini semakin memperuncing persaingan persekutuan Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis.

Portugis dan Spanyol menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1534 keduanya menyepakati diadakanlah Perjanjian Saragosa. Isi perjanjian itu antara lain:

1. Maluku menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis
2. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina

Perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis juga memiliki ambisi untuk menanamkan kekuasaan di Maluku. Itulah sebabnya, rakyat dan raja Ternate kemudian menentang Portugis.

6. Masa Kolonial Belanda

Masuknya belanda ke indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis (Penjajahan Portugis Berakhir pada 1602). Cornelius de Houtman memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Banten karena ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. kemudian lantaran pasar di Banten mendapat saingan dari pedagang inggris dan tionghoa maka kantor VOC pindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya sampailah VOC di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya ialah Belanda mengakui mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono 1. Perjanjian Giyanti juga membagi kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. kemudian pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan setelah Perancis mengalahkan Belanda.

7. VOC

Penjajahan Belanda tidak berhenti Semenjak VOC dibubarkan. Belanda kemudian memilih Daendels sebagai gubernur jenderal hindia belanda. Saat masa Deandels, rakyat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun masa pemerintahan Daendels berlangsung singkat yang kemudian diganti Johannes van den Bosch. Johannes Van den Bosch menerapkan cultuur stelsel (sistem tanam paksa). Dalam sistem tanam paksa, tiap desa wajib

menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti tebu, kopi, nila dll. Hasil tanam paksa ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan.

8. Masa Kolonial Jepang

Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, kemudian Jepang menggantikan Penjajahan Belanda di Indonesia. kala itu melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada jepang. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 agustus 1945. Saat melakuakn penjajahan di NKRI Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibentuk Jepang antara lain ialah Putera, Heiho (pasukan Indonesia buatan Jepang), PETA (Pembela Tanah Air), Jawa Hokokai (pengganti Putera).Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda.

9. Pembentukan BPUPKI

1 Maret 1945 Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai atau BPUPKI (Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). kemudian pada 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa melantik anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In, di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Kemlu). saat itu Ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Icibangase (Jepang) serta Sekretaris R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI saat itu adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia.

10. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang dan untuk menindaklanjuti BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia dipimpin oleh Ir. Sukarno, dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. kemudian Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah karena kalah setelah bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki. Kala itu Kondisi di Indonesia tidak menentu namun membuka peluang baik karena Jepang menyatakan kalah perang namun Sekutu tidak ada. Inilah waktu yang tepat sebagai klimaks tonggak-tonggak perjuangan berabad-abad untuk memnjadi bangsa yang berdaulat. kemudian 3 hari setelah Jepang tak berdaya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia keseluruh dunia.

Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia merupakan jembatan emas, sehingga mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Surjumiharjo (1989), gerakan ini merupakan peristiwa yang serempak di berbagai belahan bumi, khususnya di Asia dan Afrika.

11. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Setelah Kemerdekaan

Konflik Indonesia atas Belanda

Atas nama bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu langkah maju sudah ada pada genggaman bangsa Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan tersebut. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia mendapat simpati dari bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tampak dari adanya pengakuan negara lain terhadap

Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah negara merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan pemilihan Presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.

Semula rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan Sekutu, karena mereka mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook ikut di dalamnya,sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. NICA adalah organisasi yang didirkanorang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australiasetelah Belanda menyerah pada Jepang. Organisasi ini semula didirikan dan berpusat di Australia.

Keadaan bertambah buruk karena NICA mempersenjatai kembali KNIL setelah dilepas Oleh Sekutu dari tawanan Jepang. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan diman-mana terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu. Tugas yang diemban oleh Sekutu yang dalam hal ini dilakukan oleh Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) ternyata memiliki agenda yang terselubung. Kedatangan pasukan Sekutu justru diboncengi oleh NICA yang tidak lain adalah orang-orang Belanda yang ketika Jepang dating melarikan diri ke Australia dan membentuk kekuatan di sana. Mereka memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Hindia Belanda. Dengan demikian sikap Indonesia yang semula menerima kedatangan Sekutu menjadi penuh kecurigaan dan kemudian berkembang menjadi permusuhan.

12. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Pertempuran Surabaya ialah peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Britania Raya dengan tentara Indonesia. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya. Pertempuran ini merupakan perang pertama

pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan salah satu pertempuran terberat dan terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia kepada kolonialisme.

Tentara India Britania menembaki penembak runduk Indonesia di balik tank Indonesia yang terguling dalam pertempuran di Surabaya, November 1945.

Pertempuran dasyat ini memakan waktu hampir satu bulan lamanya, sebelum seluruh kota jatuh di tangan pihak Inggris. Peristiwa berdarah ini benar benar membuat inggris merasa berperang dipasifik, medan perang Surabaya mendapat julukan “neraka” bagi mereka karena kerugian yg disebabkan tidaklah sedikit, sekitar 1600 orang prajurit pengalaman mereka tewas di surabaya serta puluhan alat perang rusak dan hancur diterjang badai semangat arek arek Surabaya.

Kejadian luar biasa heroik yg terjadi di kota Surabaya telah menggetarkan Bangsa Indonesia , semangat juang, pantang menyerah dan bertarung sampai titik darah penghabisan demi tegaknya kedaulatan dan kehormatan bangsa telah mereka tunjukan dengan penuh kegigihan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara yang membuat Inggris serasa terpanggang di neraka telah membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai Kota Pahlawan dan tanggal 10 nopember diperingati setiap tahunnya sebagai hari Pahlawan.

13. Pertempuran Ambarawa

Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah.

Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh mendaratnya pasukan Sekutu dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang.

Kedatangan pasukan Sekutu (Inggris) diikuti oleh pasukan NICA. Mereka mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di Magelang yang kemudian terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan Sekutu. Insiden berakhir setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethell datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan da1am 12 pasal. Naskah persetujuan itu berisi antara lain:

Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI (Allied Prisoners War And Interneers atau tawanan perang dan interniran sekutu). Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu.

14. Medan Area

Mr. Teuku M. Hassan yang telah diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya. Tugas pertama yang dilakukan Gubernur Sumatera ini adalah menegakkan kedaulatan dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh karena itu, mulai dilakukan pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti senjata dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di Medan mendarat pasukan Serikat yang diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia dan Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah tanggal 13 Oktober 1945 ketika lencana

merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan 96 korban luka-luka. Para korban ternyata sebagian orang-orang NICA. Bentrokan antar Serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan. Peristiwa kepahlawanan ini kemudian dikenal sebagai pertempuran “Medan Area”.

15. Bandung Lautan Api

Istilah Bandung Lautan Api menunjukkan terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat politik bumi hangus yang diterapkan TKR. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Maret 1946 setelah ada ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti di kota-kota lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang. Di pihak lain, tentara Serikat menghendaki agar persenjataan yang telah dikuasai rakyat Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya meninggalkan Bandung, tetapi terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api.

16. Tragedi Nasional (Masa Orde Lama)

Tragedi nasional adalah suatu rangkaian peristiwa yang menimpa bangsa Indonesia. Tragedi ini tentu membawa akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Peristiwa-demi peristiwa terjadi pada bangsa Indonesia sekaligus merupakan ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat mengganggu upaya menata kembali bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan.

17. Pemberontakan PKI Madiun 1948

Peristiwa Madiun tidak dapat dipisahkan dari pembentukn Fron Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR adalah kumpulan beberapa partai

seperti partai Sosialis, Pesindo, partaiBuruh, PKI dan Sobsi. Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir SyarifuddinPada tahun 1948 Muso kembali dari Rusia. Sekembalinya itu Musobergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaranyang diberikan pada para anggota PKI adalah mengadu domba kesatuan nasional denganmenyebarkan teror. . Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun tokoh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI.

Dengan terjadinya peristiwa Madiun tersebut, pemerintah dengan segera mengambil tindakan tegas. Pemberontakan Madiun itu dapat diatasi setelah pemerintah mengangkat Gubernur Militer Kolonel Subroto yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati dan Madiun. Walaupun dalam menghancurkan kekuatan PKI dalam peristiwa Madiun menelan banyak korban, namun tindakan itu demi mempertahankan Kemerdekaan yang kita miliki. Ketika Belanda melakukan agresi terhadap Republik Indonesia, PKI justru menikam dari belakang dengan melaukan pemberontakan yang sekaligus dapat merepotkan pemerintah Republik.

18. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)

Usai pendudukan oleh Kekaisaran Jepang pada 1945, para pemimpin khususnya yang berdomisili di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. namun Tidak semua suku dan wilayah di Indonesia langsung menerima dan bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kala itu banyak terjadi pemberontakan dan Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi muncul di Maluku Selatan dengan bantuan Belanda, pemberontakan tersebut biasa disebut Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan).

19. Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)

Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta.

20. Monumen Pancasila Sakti

Gerakan G 30 S PKI sendiri terjadi pada tanggal 30-September-1965 tepatnya saat malam hari. Insiden G 30 S PKI sendiri masih menjadi perdebatan kalangan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Akan tetapi kelompok reliji terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Sedangkan Menurut versi Orde Baru gerakan ini dilakukan oleh sekelompok pasukan yang diketahui sebagai pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden yang melakukan aksi pembunuhan dan penculikan kepada Enam (6) jenderal senior TNI AD (Angkatan Darat).

B. SEJARAH PROKLAMASI NEGARA INDONESIA

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasakisehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol no. 1.Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Keesokan harinya Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Para pemuda pejuang termasuk Chaerul saleh, Sukarni, Wikana, Shodanco Singgih dan pemuda lainnya membawa soekarno, beserta fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan hatta ke rengasdengklok yang kemudian dikenal dengan peristiwa rengasdengklok.

Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Dan Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu – buru memproklamasikan kemerdekaan.

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, Lalu bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi

Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi.

Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro dan Sayuti Melik. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Dan Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik milik Mayor Dr. Hermann Kandeler (dari kantor perwakilan AL Jerman). Dan pembacaan proklamasi dilakukan dikediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan oleh seorang prajurit PETA yaitu Latief Hendraningrat dibantu oleh Soehoed dan seorang pemudi membawa nampan berisi bendera Merah Putih . Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum TuguMonumenNasional.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional'

C. KRONOLOGI PERUMUSAN PANCASILA DASAR FILSAFAT NEGARA, PEMBUKAAN DAN PASAL-PASAL UUD 1945

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) beranggotakan sebanyak 63 orang, dengan ketua dr. Rajiman Wedyiningrat dan wakil ketua Icibangase dari Negara Jepang. Sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Anggota (BPUPKI) resmi diumukan pada tanggal 28 April 1945 dan upacaranya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri).

Masa Persidangan Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)Masa persidangan pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu dimulai pada tanggal 29 Meti 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam persidangan BPUPKI membahas tentang dasar-dasar Negara untuk

bisa bangsa Indonesia merdeka, bebagai pendapat telah dikemukakan. Berikut Pedapat yang di sampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI:

Mr.Mohammad YaminMenyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” yang berintikan sebagai berikut :

- Peri kebangsaan
- Peri kemanusiaan
- Peri ketuhanan
- Peri kerakyatan
- Kesejahteraan rakyat

Mr. SupomoMenyampaikan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945 tentang masalah-masalh yang berhubungan dengan dasar-dasar Negara Republik Indonesia merdeka, yang berdasarkan atas beberapa hal dan diberi nama Pancasila, dan kemudian pada tanggal 1 Juni diperingatilah sebagai hari lahirnya Istilah Pancasila, Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh Mr. Supomo :

- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir dan batin
- Musyawarah
- Keadilan sosial

Ir. SoekarnoPada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidato itu dikemukakan/diusulkan juga lima hal untuk menjadi dasar-dasar Negara Merdeka yang perumusan serta sistematikanya sebagai berikut :

- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- Mufakat atau Demokrasi
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhan yang berkebudayaan

Masa Persidangan kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)Setelah masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 berakhir, namun belum juga mendapatkan atau belum terbentuk juga rumusan dasar Negara Indonesia merdeka, maka BPUPKI akhirnya membentuk panitia untuk menampung aspirasi tentang pembentukan atau rumusan dasar Negara Indonesia merdeka yang beranggotakan 9 orang, diantaranya adalah Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Pada akhirnya panitia 9 itu berhasil merumuskan dasar Negara Indonesia merdeka pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Moh. Yamin.

Pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI melangsungkan persidangan yang kedua untuk membahas rancangan UUD dan dibentuklah panitia perancangan UUD yang pimpin oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia tersebut membentuk sebuah kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang dengan ketua Mr. SUpomo dengan 6 anggotanya yaitu : Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Setelah hasil didapat dan sudah disempurnakan oleh penghalus bahasa kemudian hasil perumusan UUD tersebut disampaikanlah atau dilaporkan oleh Ir.Soekarno di sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang

berisikan 3 hal pokok yaitu, pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15-16 Juli 1945 diadakan kembali sidang untuk menyusun undan-undang dasar yang berdasarkan hasil kerja panitia sembilan, kemudian pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkanlah hasil kerja penyusunan undang-undang dasar dan akhirnya laporan tersebut diterima sidang pleno BPUPKI.

Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik IndonesiaPada tanggal 07 Agustus 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan oleh Jepang, kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI. PPKI dibentuk dengan anggota sebanyak 21 orang yang diketuai atau dipimpin oleh Ir. Soekarno, namun pada tanggal 18 Agustus 1945 pimpinan atau ketua PPKI Ir. Soekarno menambahkan anggota untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI yaitu sebanyak 6 orang, sehingga total anggota dari panitia PPKI ini adalah 27 orang, yaitu diantaranya Ketua Ir. Soekarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.

Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara IndonesiaSidang pertama kali PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan pembahasan konstitusi Negara Indonesia yaitu, Presiden dan Wakil Presiden

Negara Indonesia beserta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu tugas Presiden Indonesia. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”… *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” pada kalimat ”*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”.Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Dan pada akhirnya para tokoh PPKI mendapatkan hasil dengan menghilangkan kalimat tersebut dengan untuk tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, begitulah semangat rasa nasionalisme dan jiwa besar yang ditunjukkan oleh para tokok PPKI.

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja dari BPUPKI dibahas kembali, Pada sidang pembahasan itu terdapat 2 usul perubahan yang diberikan oleh kelompok Muh. Hatta, 2 usul tersebut berisikan seperti dibawah ini :

1) Usul yang pertama, berkaitaan dengan sila perta yang semulanya berbunyi “”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2) Usul yang kedua, ab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Dan akhirnya 2 usulan yang disampaikan oleh Muh, Hatta diterima dan disahkan oleh PPKI sebagai UUD Negara Indonesia (UUD 1945) yang di umumkan dalam berita Republik Indonesia pada tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45-48.

Sistematika Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) itu terdiri atas 3 hal, yaitu :

1) Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

   Pancasila

   - Ketuhanan Yang Maha Esa.
   - Kemanusiaan yang adil dan beradab.
   - Persatuan Indonesia.
   - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
   - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
3) Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Rumusan Dasar Negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar, karena disamping mempunyai kedudukan Konstitusional juga disahkan oleh suatu Badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI) yang berarti disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Materi 07:

GENDER

(Pengertian, Ideologi, dan Gerakan)

A. Pengertian Seks, gender dan Kontruksi Sosial

"Gender is not something we are born with, and not something we have, but something we do (West and Zimmerman: 1987) – something we perform" (Butler: 1990).

Sejak sepuluh tahun terakhir kata 'gender' telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir di semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender itu? Berbicara mengenai konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata *sex* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperi rahim dan saluran untuk melahirkan, memiliki sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai payudara. Gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian Sedangkang gender adalah konstruksi sosial. Jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai "naskah" (*scripts* untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka

belajar memainkan peran feminin,maskulin, ataupun keduanya, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak dari bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Sehingga muncul seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini–mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya–secara bersama-sama memoles "peran gender" kita. Sifat-sifat biologis melahirkan perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan sesungguhnya terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikontruksi secara sosial atau kultural. Melalui proses panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah kembali, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

- "gender refers to the set of characteristics distinguishing between male and female, particularly in the cases of men and women. It differentiates between men and women of cultural origin, that is, it is a social construct , which is a matter of nurture, since cultures differ as well as the expectations and rules for male and female, which are grounded in the biological and anatomical distinction"

Kaum perempuan melakukan hal-hal dalam ranah domestik seperti mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. "*one is not born, but rather becomes a woman*" dalam pemikiran Simone De Beauvoir, seorang feminis eksistensialis abad ke-20 apa yang dinamakan sebagai perempuan adalah sebuah "menjadi", dikonstruksi secara sosial. "*Gender is not something we are born with, and not something we have, but something we do*" (West and Zimmerman: 1987) – "*something we perform*" (Butler: 1990). Hal demikian dibolak balikkan oleh budaya, ketika bayi perempuan dikonstruksi menjadi perempuan coba kita lihat di lingkungan sekitar bahwa ketika bayi perempuan lahir maka ia akan dibungkus pakaian berwarna merah muda dan diberi boneka hingga ia dewasa menjadi seorang insinyur dapat saja ditertawakan karena tidak sesuai dengan diri perempuannya padahal dapat saja ia menjadi insinyur bahkan dapat menjadi insinyur seperti laki-laki yang lain, pemikiran yang memandang ketidaknormalan hal tersebut sungguh tidak relevan bila dihubungkan dengan gender maka peran gender sangat penting ketika aktivis perempuan dengan lantang menyuarakan perlunya kesetaraan bagi perempuan. Perempuan dapat juga layak bergerak dalam bidang politik, hukum, budaya, dan sosial. Hal-hal yang selama ini berbau perempuan seperti mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat perempuan" padahal itulah yang dalam sejarah ini dikonstruksi secara sosial atas dominasi-dominasi kekuataan dan kekuasaan maskulin. Karena urusan mendidik anak anak, merawat kebersihan rumah tangga dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal. Bahkan dalam perkembangan zaman di Jerman terdapat *houseman* dimana seorang ayah berperan juga dalam merawat anak dan

rumah tangga untuk keseimbangan peran antara ayah dan ibu sehingga ibu tidak terus menerus bergulat dalam *domestic area*. Bahkan dalam sebuah kartu pos anti hak pilih “The Suffragette Madonna” tertulis “*Poor man, thinking that nurturing a child is a sign of weakness or inferiority*.”

Karena selama ini produk sejarah melahirkan bahwa yang kuat kemudian diagungkan, “*prehistoric times when physical force was very important, those who are strongest had all the right and power*” (Simone de Beauvoir, *The Second Sex*). Yang demikian adalah proses pembentukan citra baku yang dimulai sejak beratus abad yang lalu di saat peradaban manusia ditegakkan berdasarkan prinsip *the survival of the fittest*. Prinsip ini lebih banyak mempertimbangkan proses fisik sebagai pra-syarat penguasaan struktural sosial. Sebagai akbatnya, perempuan secara fisik tidak setegar laki-laki, menjadi termarginalisasi dari sektor “persaingan budaya”. Dalam proses sosialisasi di kemudian hari, hampir seluruh aspek kehidupan sosial lebih banyak merefleksikan “kelaki-lakian” (*masculine*) atau apa yang kemudian disebut dengan sistem “patriarki”.

Pembicaraan mengenai gender akhir-akhir ini semakin hangat dalam perbincangan mengenai kemajuan perkembangan kaum perempuan dengan kesetaraan dengan kaum pria. Dalam sejarah telah terjadi perlakuan yang tidak seimbang, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Perjalanan peradaban manusia banyak didominasi oleh kaum laki-laki dalam urusan bermasyarakat. Jadi sejak awal sebenarnya sudah terjadi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan pada wilayah marginal. Peran-peran yang dimainkan perempuan hanya berputar di ranah domestik, seperti dalam kosa kata Jawa “dapur, sumur, kasur”, sementara kaum laki-laki menguasai

peran-peran penting didalam masyarakat. Dari sanalah muncul yang disebut dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan dunia dan dapat ditemukan dari ranah, publik hingga privat, dari urusan domestik hingga persoalan reproduksi. Dalam organisasi publik dapat dikatakan perempuan berada pada posisi termarginalkan. Sistem budaya patriarkal yang menanamkan pemahaman bahwa wilayah publik (politik dan dunia kerja) sebagai wilayah laki-laki, biasa disebut sebagai faktor penyebab utama mengapa kiprah perempuan di ranah publik secara umum berada pada posisi subordinat laki-laki. Dalam pembahasan gender, gender dapat menentukan berbagai pengalaman hidup, menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan ketrampilan. Gender dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan bergerak. Gender akan menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara autonom. Gender bisa jadi merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam membentuk kita akan menjadi apa nantinya.

Ideologi Gender sebagai Basis Analisis Kritis Transformasi Sosial

Pokok bahasan dalam buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karya Mansour Fakih ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tentang analisis gender dan ketidakadilan, analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan, dan agenda mendesak gerakan feminisme, termasuk tantangan dan strateginya pada masa mendatang.

1. Analisis Gender dan Ketidakadilan

Analisis gender dan ketidakadilan dimulai dengan pembahasan tentang perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Untuk

Memahami konsep gender, kata *gender* harus dibedakan dengan kata *seks* (jenis kelamin). Jenis kelamin mengacu pada penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma. Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat pada manusia jenis laki-laki atau perempuan dan secara biologis tidak bisa dipertukarkan. Secara permanen, pembagian tersebut tidak bisa berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sementara itu, konsep *gender* mengacu pada sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun secara kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan; laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Berbeda dengan jenis kelamin, ciri dan sifat gender dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang lemah lembut, emosional, dan keibuan; ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri gender dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, atau dari suatu kelas ke kelas lain. Contohnya, di suku tertentu perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Selanjutnya, ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan (kodrat),

seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesungguhnya sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, bukan kodrat. Karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai "kodrat" perempuan. Padahal, hal tersebut sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kultural terhadap kaum perempuan. Kenyataannya, urusan tersebut bukan kodrat karena dapat dilakukan atau dipertukarkan dengan kaum laki-laki.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

- Marginalisasi (pemiskinan) perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Contoh marginalisasi yang bersumber dari kebijakan pemerintah adalah penggantian penanaman jenis padi batang pendek dengan padi batang panjang. Tanpa disadari, penanaman jenis padi batang panjang menyingkirkan perempuan sebagai pemanen padi yang menggunakan ani-ani. Kehilangan pekerjaan dalam bidang pertanian berarti memiskinkan perempuan. Marginalisasi perempuan yang bersumber dari tradisi terlihat dari adanya suku yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan atau adanya

agama/keyakinan yang memberikan perempuan setengah dari hak waris yang dapat diberikan kepada laki-laki. Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Bahwa perempuan irasional dan emosional menyebabkan perempuan tidak bisa tampil memimpin, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, termasuk perempuan bisa pindah dengan alasan ikut suami, tetapi tidak sebaliknya.

- Pelabelan negatif (stereotipe) terhadap perempuan menimbulkan asumsi bahwa perempuan bersolek untuk menarik lawan jenis sehingga pelecehan atau perkosaan terhadap kaum perempuan dianggap sebagai kesalahan perempuan. Contoh lain adalah stereotipe bahwa perempuan (istri) harus melayani laki-laki (suami).

- Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik dan integritas mental psikologis
seseorang. Kekerasan karena bias gender disebut *gender-related violence*. Contohnya, perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (pelayanan seksual tanpa kerelaan), kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi alat kelamin (sunat untuk perempuan), penciptaan ketergantungan, dan pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan melalui mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Pemerintah/negara sering menerapkan standar ganda terhadap PSK: menangkapi/melarang praktik prostitusi, tetapi di sisi lain menarik pajak dari bisnis ini. PSK dianggap pekerjaan kotor, tetapi ramai pengunjung. Perempuan sering dipaksa untuk melakukan sterilisasi dalam rangka mengontrol jumlah penduduk. Memegang atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan si pemilik tubuh termasuk kekerasan terselubung. Contoh pelecehan seksual lainnya

adalah lelucon jorok/vulgar, menyakiti seseorang dengan perkataan kotor, menginterogasi seseorang tentang kehidupan seksual atau kehidupan pribadinya, meminta imbalan seksual untuk promosi atau janji-janji lain, dan menyentuh atau menyenggol tubuh tanpa izin yang bersangkutan.

Beban kerja yang lebih banyak harus ditanggung perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Karena sosialisasi peran tersebut, perempuan merasa bersalah jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sebaliknya, laki-laki merasa itu bukan tanggung jawabnya, bahkan ada tradisi yang melarang laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumahtangga .Akibatnya, perempuan yang juga bekerja di luar rumah memikul beban kerja ganda. Selain itu, jenis pekerjaan domestik dianggap pekerjaan rendah dan tidak bernilai ekonomis. Pada keluarga-keluarga kaya, tanggung jawab pekerjaan domestik biasanya dipindahkan kepada pembantu rumah tangga. Pemindahan tanggungjawab tersebut berarti pemindahan marginalisasi, subordinasi, dan beban kerja dari istri kepada pembantu rumah tangga yang kebanyakan perempuan.

Jenis-jenis ketidakadilan gender tersebut telah terjadi di berbagai tingkatan: kebijakan, adat/kultur/agama, dan rumah tangga. Yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender telah mengakar ke dalam keyakinan dan menjadi ideologi perempuan ataupun laki-laki. Semua bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi secara mantap sehingga laki-laki dan perempuan akhirnya terbiasa dan akhirnya memercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah merupakan kodrat .Lambat laun terciptalah suatu struktur ketidakadilan gender yang diterima dan sudah tidak dapat lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah.

2. Analisis Gender dalam Gerakan Transformasi Perempuan

Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata sosial yang ada, misalnya, institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat. Karena kesalahpahaman itu, feminism tidak saja kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan tetapi juga secara umum ditolak oleh masyarakat.

Secara konseptual, feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas, dieksploitasi sehingga harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun ada beberapa aliran feminisme, pada hakikatnya mereka sepaham bahwa perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat, dan kebebasan untuk mengontro lraga dan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah. Secara sederhana, aliran feminisme dibagi menjadi dua aliran besar dalam ilmu sosial, yaitu aliran *status quo* atau fungsionalisme dan aliran konflik. Aliran fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme adalah mazhab arus utama (*mainstream*) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Aliran ini berkeyakinan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktu rpolitik sampai keluarga) dan tiap-tiap bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Bagi penganut teori ini,masyarakat berubah secara evolusioner. Konflik dalam suatu masyarakat merupakan akibat dari tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Oleh karena itu, harmoni dan integrasi dipandang fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik harus dihindarkan. Dengan demikian, *status quo* harus dipertahankan. Teori ini menolak setiap usaha yang mengguncang *status*

quo, termasuk yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Jika perubahan harus terjadi,yang diperlukan adalah reformasi yang terkontrol, yang tidak menganggu stabilitas sosial. Pengaruh fungsionalisme ditemukan dalam pemikiran *feminisme liberal*.Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu,tetap ipada saat yang sama mendiskriminasi kaum perempuan. Berbeda dengan feminisme radikal, feminisme liberal tidak mempertanyakan diskriminasi akibat ideologi patriarki dan juga tidak mempersoalkan analisis atas struktur kelas, politik, ekonomi, dan gender seperti yang dipermasalahkan oleh gerakan feminisme sosialis.

Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equity*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada kesempatan dan hak yang sama, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. Jika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, tetapi kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri. Dengan dasar itu, usulan feminis liberal adalah mengatasi masalah kaum perempuan dengan cara menyiapkan kaum perempuan agar bisa bersaing dalam dunia yang penuh dengan persaingan bebas. Keterbelakangan perempuan dilihat sebagai akibat dari sikap irasional yang bersumber pada nilai tradisional dan juga karena perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Salah satu pengaruh feminisme liberal terekspresi dalam teori modernisasi dan program global yang dikenal dengan nama *Woman in Development*.

Aliran konflik berpendapat bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang merupakan pusat dari setiap hubungan sosial, termasuk hubungan kaum laki-laki dan perempuan. Setiap gagasan dan nilai selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perubahanakan terjadi melalui konflik yang akhirnya akan mengubah posisidanhubungan. Perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan akan dilihat sebagai konflik antar dua kepentingan. Kelompok penganut aliran konflik, di antaranya, adalah feminisme radikal, feminism marxis, dan feminisme sosialis. ***Feminisme radikal*** menganggap bahwa penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki berakar pada ideologi patriarki. Patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual, laki-laki memiliki kekuasaan yang superior dan keistimewaan dari segi ekonomi. Feminisme radikal menganggap bahwa revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan dapat dilakukan dalam bentuk yang sangat personal. *Personal is political* memberi peluang politik bagi kaum perempuan. Selanjutnya, ***feminisme marxis*** berpandangan bahwa penindasan perempuan merupakan bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi (bagian dari kerangkan pikir kapitalisme). Kaum perempuan dianggap bermanfaat bagi sistem kapitalisme karena upah buruh perempuan lebih murah dibandingkan dengan buruh laki-laki. Menurut marxis klasik, perubahan status perempuan dapat dilakukan melalui revolusi sosialis dan dengan menghapus pekerjaan rumah tangga (domestik). Dari perspektif ini, diyakini bahwa emansipasi perempuan terjadi jika perempuan berhenti mengurus rumah tangga. Feminisme sosialis dianggap lebih memiliki harapan di masa depan karena secara umum analisis yang ditawarkan lebih dapat diterapkan oleh gerakan perempuan. ***Feminisme sosialis*** menganggap bahwa penindasan perempuan bisa

melahirkan kesadaran revolusi, tetapi bukan revolusi model perempuan sebagai jenis kelamin (*woman as sex*) seperti yang diperjuangkan oleh feminis radikal. Bagi feminis sosialis, ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis atau perbedaan kegiatan produksi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih karena konstruksi sosial terhadap perbedaan itu. Dengan dasar itu, feminis sosialis memerangi konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender.

3. Agenda Mendesak

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karena melibatkan manusia secara emosional, keyakinan, bahkan sampai pada urusan negara. Solusi tentang masalah gender dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis ketidakadilan gender; usaha jangka panjang untuk menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan. Upaya jangka pendek dapat dilakukan melalui program-program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya, dalam mengatasi marginalisasi perempuan, perempuan harus dilibatkan dalam program pengembangan masyarakat. Untuk mengatasi masalah subordinasi, perempuan harus aktif mengikuti setiap jenjang pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan, dan berbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, perempuan sendiri harus mulai memberikan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan-tindakan tersebut terhenti. Membiarkan tindakan tersebut akan mendorong pelaku untuk melanggengkannya. Pelaku kekerasan seksual harus dilaporkan dan dihukum. Kampanye antikekerasan dan

anti pelecehan terhadap perempuan perlu di masyarakatkan secara luas. Upaya jangka panjang dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Upaya pendukungnya adalah melalui studi tentang berbagai ketidakadilan gender dan manifestasinya, baik di masyarakat, negara, maupun di dalam rumah tangga.

Hasil kajian tersebut dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum, dan aturan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap kaum perempuan.

4. Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang

Secara sederhana, gerakan feminisme di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga dasawarsa. Dasawarsa pertama (tahun 1970-an) merupakan tahapan "pelecehan". Selama tahun 1975—1985 hampir semua aktivis LSM menganggap masalah gender bukan masalah penting, bahkan banyak yang melakukan pelecehan. Periode dasawarsa kedua (1985—1995) merupakan dasawarsa pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan analisis gender dan mengapa isu gender menjadi masalah pembangunan. Berbagai tantangan muncul dalam dasawarsa kedua, misalnya, tantangan dari pemikiran dan tafsiran keagamaan yang patriarki. Sehubungan dengan pemikiran dan tafsiran keagamaan tersebut diperlukan berbagai kajian terhadap ajaran-ajaran agama yang bias gender. Tantangan pada tahap dasawarsa ketiga adalah tantangan gerakan kilas balik dari aktivis, baik laki-laki maupun kaum perempuan. Artinya, masalah ketidakadilan gender telah mencapai puncak dinamikanya dan selanjutnya mulai dirasakan adanya persoalan yang ditimbulkan dan harus dihadapi. Salah satu reaksinya adalah masalah gender dianggap bukan masalah lagi sehingga nasibnya akan sama dengan analisis kelas, diabaikan dan dianggap tidak relevan.

Untuk menghindari perkembangan seperti itu, ada dua strategi yang diusulkan, yaitu; (1) mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan dan (2) strategi advokasi. Strategi pertama memerlukan suatu tindakan yang mengarah pada terciptanya kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender atau *gender policy*. Strategi advokasi memerlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Perjuangannya melalui perubahan substansi hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam tafsiran agama dalam bentuk fikih ataupunhukum yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi perempuan, yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antarsesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik, dan lebih adil. Gerakan transformasi gender lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem yang tidak adil. Transformasi gender adalah upaya liberasi dari segala bentuk penindasan, baik secara struktural, personal, kelas, warna kulit, maupun ekonomi internasional. Gerakan feminis bukanlah gerakan yang semata-mata menyerang laki-laki, melainkan merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, serta citra patriakal bahwa perempuan itu pasif, bergantung (tidak mandiri), dan inferior. Tujuannya tidak sekadar memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator norma laki-laki, tetapi untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan perubahan peran gender, baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki.

C. “PERAN WANITA DALAM RANAH PUBLIK”

MUQODDIMAH

Isu gender bagi sebagian orang memang terdengar klasik dan agak membosankan. Akan tetapi isu ini tetap penting mengingat Islam sering di tuding sebagai agama yang mendiskriminasi wanita. Pendapat orang-orang yang menuding Islam sebagai agama yang hanya memihak para pria umumnya di dasari pada wajah Islam secara dzahir tanpa memahami esensi dari syariat Islam itu sendiri. Misalnya mengapa wanita diwajibkan menutupkan kain sampai ke dada (Q.S 24:31) atau ke seluruh tubuhnya (Q.S 33:59) sedangkan pria tidak dikenakan kewajiban itu, wanita shalat di shaf belakang dan dibatasi tabir untuk memisahkan dari jama’ah laki-laki yang berada di shaf depan, dan masih banyak contoh lainnya.

Permasalahan yang lain adalah ketika kita mengamati lingkungan disekitar kita, kita akan menyadari bahwa banyak wanita yang tidak mendapatkan hak-nya atau memang sengaja tidak mau menggunakan hak dan potensi yang ia miliki untuk berbuat sesuatu bagi umat ini dengan alasan “saya adalah seorang wanita”. Sebagai contoh saya masih sering mendengar wanita berkata “Buat apa melanjutkan ke perguruan tinggi, toh saya hanyalah seorang wanita”.

Wanita yang secara sadar tidak mau menggunakan hak dan potensinya, perlu mendapatkan pencerahan dan pemahaman tentang arti pentingnya menggunakan hak dan potensi yang mereka miliki, tentu saja untuk berjuang di jalan-NYA. Seperti nasihat dari Mbak Asma Nadia yang pernah beliau sampaikan dalam sebuah seminar di Kota Malang “Ambillah satu beban dari umat ini, taruhlah dipundakmu, jadilah muslimah yang berdaya”. Sedangkan wanita yang memang

dikondisikan pada suatu keadaan dimana dia tidak dapat menggunakan haknya juga harus dibantu sehingga ia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.

Dilain pihak ada segolongan wanita yang menuntut dan menggunakan hak nya secara berlebihan sehingga melakukan eksploitasi dan mendzalimi diri sendiri. Seperti kasus-kasus yang menimpa para artis Indonesia dan dunia saat ini. Mereka adalah para pemuja kebebasan tanpa batas.

Karena itu Islam sebagai satu-satunya agama yang di ridhoi Allah harus dijadikan sebagai perspektif dalam memahami dan menjadi jalan tengah bagi penyelesaian diskursus gender yang ekstrim ini.

A. PENGERTIAN DALAM PERSPEKTIF

1.GENDER DAN KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN FEMINIS

Menurut Lips 1 Gender adalah cultural expectations for women and men atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pengertian lain dari gender tertuang dalam kepmendagri 2 No.132 disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Mufidah3 mengartikan Gender sebagai peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan oleh konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan pengertian kesetaraan gender (gender equlity) menurut Mufidah4 adalah posisi

sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, control, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan Negara.

Pada awal abad ke 18 masyarakat barat masih menganggap bahwa wanita hanyalah warga kelas dua (patriarkhi). Hal ini terbukti dari posisi perempuan yang tertinggal karena kebanyakan perempuan buta huruf, miskin, dan tidak punya keahlian. Satu abad kemudian wanita mulai melibatkan diri dalam aktivitas sosial sehingga muncullah berbagai tokoh dengan pemikirannya di bidang feminisme (gerakan perempuan) dan lahirlah teori-teori feminisme sehingga memperkuat gerakan keperempuan dan perempuan mulai memiliki akses untuk berperan di ranah publik.

Derasnya arus globalisasi budaya mengakibatkan feminisme menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri feminisme menjadi bahan diskusi favorit di berbagai instansi pendidikan tinggi. Beragam seminar dan diskusi mengenai kesetaraan gender pun di selenggarakan. Bahkan masalah feminisme secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, di jadikan objek laporan akhir, tesis dan disertasi untuk mendukung paham ini. Bagaimanapun juga, sebuah paham pasti mempengaruhi cara berfikir dan gaya hidup penganutnya. Begitu juga dengan feminisme, paham ini mulai mempengaruhi tatanan dan perilaku sosial, keagamaan hingga sektor industri. Atau secara singkat feminisme sangat berpengaruh terhadap perubahan pola pikir dan peran wanita, Fenomena Inul Daratista dan para pengikutnya juga tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu dampak dari feminisme. Selain itu di lingkungan kerja, terutama dalam industri manufaktur kita akan menjumpai bahwa mayoritas pegawainya adalah wanita. Sebagian besar perusahaan memilih wanita dengan

alasan wanita lebih telaten, tekun di dalam bekerja dan cenderung mudah diatur. Bahkan para wanita ini bekerja dengan sistem shift. Permasalahannya akan muncul ketika para pekerja wanita sudah menikah dan memiliki anak, hal ini tentu saja menimbulkan beban ganda bagi mereka.

Fenomena lain yang terjadi di masyarakat kita adalah adanya wanita (istri) bekerja sedangkan suami menganggur di rumah, sehingga suami istri saling bertukar peran. Fenomena ini menurut Ibu Dr. Trisakti Handayani, MSi, pemateri dalam diskusi yang kami selenggarakan yang hasilnya sekarang sedang anda baca ini, merupakan dampak dari teori-teori feminisme yang tidak terpikir oleh para pencetus teori dan sudah menjadi kewajiban kita untuk meluruskannya.

2. GENDER DAN KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN ISLAM

Kesetaraan gender dalam agama Islam telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan telah disyiarkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 14 abad yang silam. Banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti dalam Al Qur'an surah Ali Imran (3): 195, Al Nisa' (4) : 124, Al Nahl (16):97, Gafir (40):40 dan masih banyak ayat-ayat lain yang bisa dijadikan rujukan.

Islam merupakan rahmat bagi semesta alam, oleh karena itulah salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita serta mengubah budaya patriarkhi (cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan).

Nabi Muhammad mengubah wacana dunia arab tentang wanita dan melakukan perombakan tatanan kehidupan sosial sehingga wanita dilibatkan dalam hampir semua lini kehidupan. Sebagai contoh Nabi Muhammad sering menggendong putri beliau (Fatimah Azzahra) secara demonstratif di depan umum. Suatu hal yang dianggap tabu oleh masyarakat Arab pada saat itu. Perlu kita ingat bahwa masyarakat Arab pada masa awal kenabian Nabi Muhammad adalah masyarakat jahiliyah yang memarjinalkan dan menindas kaum wanita. Setiap bayi wanita yang lahir sudah dipastikan terancam nyawanya. Kondisi masyarakat jahiliyah saat itu dikabarkan kepada kita melalui Al Qur'an surah al Nahl 58-59.

"Ketika diberitahukan kepada seseorang diantara mereka perihal kelahiran anak perempuan, wajahnya cemberut menahan sedih. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang diterimanya, boleh jadi ia akan

memeliharanya dengan penuh hina atau menguburnya (hidup-hidup) ke dalam tanah". Setelah Rasulullah melakukan perombakan tatanan sosial, wanita diposisikan sebagai makluk mulia bahkan disebutkan sebanyak tiga kali sebagai orang yang harus dihormati sebelum menghormati seorang ayah. Dalam ranah publik, Peran wanita pada masa Rasulullah terlihat dalam kondisi peperangan, 'Aisyah, Ummu Sulaim, Fatimah Azzahra ikut bekerja keras membagikan makanan, minuman dan obat-obatan di tengah hujan panah, tikaman tombak dan sabetan pedang, selain itu para wanita juga aktif menuntut ilmu serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial.

3. DISKURSUS PERAN WANITA DALAM RANAH PUBLIK

Diskursus mengenai peran wanita dalam ranah publik menurut perspektif Islam menjadi perdebatan yang krusial antara pihak yang menentang dan pihak yang menyetujui. Permasalahannya adalah perbedaan tafsir terhadap dua dalil, yang pertama adalah hadis lan yufliha qaum waalau amarahum imra'ah (Tidak akan jaya suatu kaum/bangsa yang menyerahkan urusannya kepada wanita) dan yang kedua adalah Q.S An Nisa:34.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Bisakah ayat ini (Q.S An Nisa:34) dijadikan pedoman untuk membatasi ruang gerak wanita dalam ranah publik? Pada umumnya ayat ini dijadikan sebagai penghalang bagi wanita untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat. Padahal kata An Nisa dalam ayat ini berarti wanita yang sudah dikenal (istri) karena

menggunakan Alif Lam. Sehingga sebenarnya ayat ini berbicara masalah rumah tangga, bahwasanya seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi wanita yang sudah dikenalnya (istri). Sedangkan pihak yang menggunakan dalil lan yufliha qaum waalau amarahum imra'ah juga harus mempertimbangkan sabda Rasulullan SAW berikut ini.

"Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Ditanya kepada Beliau, "Bagaimana hal itu dapat sia-sia?" Dijelaskan oleh Rasulullah, "Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya".

Hadits tesebut secara tersurat menyatakan bahwa penyerahan tugas atau tanggung jawab kepada seseorang bukan dilandasi oleh faktor gender, tetapi yang paling utama adalah faktor kompetensi.

Materi 08:

(Pengantar Logika dan Filsafat)

A. LOGIKA

Muqaddimah

Sebuah gagasan (ide) awal tentang logika banyakmendapatkan pertentangan bahkan perdebatan bagi sebagianorang yang panatik terhadap salah satu Tokoh Filsafat. Namun perdebatan itu, tidaklah bermakna, karena hanyaakan menghilangkan esensi logika yang sebenarnya,siapapun pencetus utama logika tidaklah perlu diperdebatankan, sebab sebelum Aristoteles melahirkan istilah logika, Thales, Anaximanders, hingga Heraliklitus,telah lama mempergunkan cara-cara berpikir yang mengikuti hukum pikir sebagaimana dikenal setelah Rene Descrates mengenalkan logika Deduksinya.Persoalan utama dalam ruang ini, bukanlah kapanlogika itu terlahir, tetapi mengapa logika pertama kali yanglahir (logika deduktif) ia mengasingkan manusia, iamengecelkan martabat manusia di mata Alam semesta, dansekaligus di mata Tuhan sang pencipta manusia. Ada sebuah nalar keterasingan, ya...itulah logika deduksi yang saya maksudkan, logika terlahir dari hasil kerja pikiran manusia, tapi mengapa manusianya sendiri yang tidak memanusiakan manusia. sekali lagi, inilah sebuah nalar keterasingan. Asing dari nurani, asing dari jiwa dan asing dari realitas.

B. Dasar Dasar Logika

Logika berasal dari kata Yunani kuno λόγος (*logos*) yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat.

Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme (Latin: *logica scientia*) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur.Ilmudisini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan.

Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu pikiran merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut haruslah diperhatikan kebenaran bentuk dapat berpikir logis. Kebenaran ini hanya menyatakan serta mengandaikan adanya jalan, cara, teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Semua hal ini diselidiki serta dirumuskan dalam logika. Secara singkat logika dapat dikataka sebagai ilmu pengetahuan dan kemampuian untuk berpikir lurus. Ilmu pengetahuan sendiri adalah kumpulan pengetahuan tentang pokok tertentu. Kumpulan ini merupakan suatu kesatuan yang sistematis serta memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan ini terjadi dengan menunjukkan sebab musababnya.

Logika juga termasuk dalam ilmu pengetahuan yang dijelaskan diatas. Kajian ilmu logika adalah azas-azas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Agar dapat berpikir seperti itu, logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati. Hal ini menunjukkan bahwa logika bukanlah sebatas teori, tapi juga merupakan suatu keterampilan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktek. Ini sebabnya logika disebut filsafat yang praktis. Objek material logika adalah berfikir. Yang dimaksud berfikir disini adalah kegiatan pikiran, akal budi manusia.

Dengan berfkir, manusia mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakannya ia dapat memperoleh kebenaran. Pengolahan dan pegearjaan ini terjadi dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, serta menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya. Tetapi bukan sembarangan berfikir yang diselidiki dalam logika. Dalam logika berfikir dipandang dari sudut kelurusan dan ketepatannya. Karena berfikir lurus dan tepat merupakan objek formal logika. Suatu pemikiran disebut lurus dan tepat, apabila pemikirn itu sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam logika. Dengan demikian kebenaran juga dapat diperoleh dengan lebih mudah dan aman. Semua ini menunjukkan bahwa logika merupakan suatu pegangan atau pedoman untuk pemikiran.

1. Logika sebagai ilmu pengetahuan

Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan dimana obyek materialnya adalah berpikir (khususnya penalaran/proses penalaran) dan obyek formal logika adalah berpikir/penalaran yang ditinjau dari segi ketepatann

2. Logika sebagai cabang filsafat

Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis disini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Logika lahir bersama-sama dengan lahirnyafilsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi

juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran

3. Dasar-dasar Logika

Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan(validitas) sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan (premis). Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal.

Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Penalaran deduktif—kadang disebut logika deduktif—adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya.

Contoh argumen deduktif:

1. Setiap mamalia punya sebuah jantung
2. Semua kuda adalah mamalia
3. ∴ Setiap kuda punya sebuah jantung

Penalaran induktif—kadang disebut logika induktif—adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum.

Contoh argumen induktif:

1. Kuda Sumba punya sebuah jantung
2. Kuda Australia punya sebuah jantung
3. Kuda Amerika punya sebuah jantung
4. Kuda Inggris punya sebuah jantung
5. …
6. ∴ Setiap kuda punya sebuah jantung

Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa ciri utama yang membedakan penalaran induktif dan deduktif.

Deduktif	**Induktif**
Jika semua premis benar maka kesimpulan pasti benar	Jika premis benar, kesimpulan mungkin benar, tapi tak pasti benar.
Semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurangnya secara implisit, dalam premis.	Kesimpulan memuat informasi yang tak ada, bahkan secara implisit, dalam premis.

C. **Sejarah Logika**

- **Masa Yunani Kuno**

Logika dimulai sejak Thales (624 SM – 548 SM),filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, takhayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta.

Thales mengatakan bahwa air adalah arkhe (Yunani) yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkanlogika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut *logica scientica*. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah *arkhe* alam semesta dengan alasan bahwa air adalah *jiwa*segala sesuatu.

Dalam logika Thales, air adalah arkhe alam semesta, yang menurut Aristoteles disimpulkan dari:

- Air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan (karena tanpa air tumbuhan mati)
- Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia
- Air jugalah uap
- Air jugalah es

Jadi, air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti, air adalah *arkhe* alam semesta.

Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum Sofis beserta Plato (427 SM-347 SM) juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini.

Pada masa Aristoteles logika masih disebut dengan ***analitica*** , yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dariproposisi yang benar, dan ***dialektika*** yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme.

Buku Aristoteles *to Oraganon* (alat) berjumlah enam, yaitu:

1. *Categoriae* menguraikan pengertian-pengertian
2. *De interpretatione* tentang keputusan-keputusan

3. *Analytica Posteriora* tentang pembuktian.

4. *Analytica Priora tentang Silogisme.*

5. *Topica* tentang argumentasi dan metode berdebat.

6. *De sohisticis elenchis* tentang kesesatan dan kekeliruan berpikir.

Pada 370 SM – 288 SM Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangn logika.

Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 SM – 226 SM peloporKaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenus (130 M – 201 M) dan Sextus Empiricus 200 M, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Porohyus (232 – 305) membuat suatu pengantar (*eisagoge*) pada *Categoriae*, salah satu buku Aristoteles. Boethius (480-524) menerjemahkan *Eisagoge*Porphyrius ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar- komentarnya. Johanes Damascenus (674 – 749) menerbitkan*Fons Scienteae*. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti *De Interpretatione*, *Eisagoge*oleh Porphyus dan karya Boethius masih digunakan. Thomas Aquinas 1224-1274 dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika.

Lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti:

- Petrus Hispanus (1210 – 1278)
- Roger Bacon (1214-1292)
- Raymundus Lullus (1232 -1315) yang menemukan metode logika baru yang dinamakan **Ars Magna**, yang merupakan semacam aljabar pengertian.
- William Ocham (1295 – 1349)

Pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes (1588 – 1679) dengan karyanya **Leviatan**dan John Locke (1632-1704) dalam *An Essay Concerning Human Understanding*

Francis Bacon (1561 – 1626) mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya*Novum Organum Scientiarum*. J.S. Mills (1806 – 1873) melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya *System of Logic* Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti:

- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) menyusun logika aljabar berdasarkan Ars Magna dari Raymundus Lullus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian.
- George Boole (1815-1864)
- John Venn (1834-1923)
- Gottlob Frege (1848 – 1925)

Lalu Chares Sanders Peirce (1839-1914), seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar diJohn Hopkins University,melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil Peirce (*Peirce's Law*) yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda (*general theory of signs)* Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910-1913 dengan terbitnya *Principia Mathematica* tiga jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead (1861 – 1914) dan Bertrand Arthur William Russel (1872 – 1970).

Logika simbolik lalu diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein (1889-1951), Rudolf Carnap (1891-1970), Kurt Godel (1906-1978), dan lain-lain.

- **Logika sebagai matematika murni**

Logika masuk kedalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik (logika simbolik). Logika tersistematisasi dikenalkan oleh dua orang dokter medis,

Galenus (130-201 M) dan Sextus Empiricus (sekitar 200 M) yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri.

Puncak logika simbolik terjadi pada tahun 1910-1913 dengan terbitnya *Principia Mathematica* tiga jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead (1861 – 1914) dan Bertrand Arthur William Russel (1872 – 1970).

- **Kegunaan logika**

1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis dan koheren.
2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif.
3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri.
4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis
5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpkir, kekeliruan serta kesesatan.
6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian.
7. Terhindar dari klenik , gugon-tuhon (bahasa Jawa)
8. Apabila sudah mampu berpikir rasional,kritis ,lurus,metodis dan analitis sebagaimana tersebut pada butir pertama maka akan meningkatkan citra diri seseorang.

D. Macam-macam logika

- **Logika alamiah**

Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan

kecenderungan-kecenderungan yang subyektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir.

- **Logika ilmiah**

Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau, paling tidak, dikurangi.

- **lmu Logika**

Ilmu Logika merupakan suatu istilah yang terdiri atas dua kata: *ilmu* dan *logika*. Secara harfiah, *ilmu* bermakna ‘*pengetahuan* atau kepandaian, baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam dsb.’ (Pusat Bahasa, 2006).

Pengetahuan dapat dibedakan atas dua macam:*pengetahuan biasa* dan *ilmu*. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, tidak mengetahui sebabnya demikian dan apa sebabnya harus demikian. Sebaliknya,*ilmu* adalah pengetahuan yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebenaran: ingin tahu yang mendalam, tahu benar apa sebabnya demikian, dan mengapa harus demikian.

Manusia dalam memahami alam sekitar terjadi proses yang bertingkat: dari *pengetahuan*(sebagai hasil tahu manusia) dan *ilmu*. Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil *tahu*manusia yang sekadar menjawab pertanyaan “apa”. Misalnya, apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya. Ilmu (*science*) bukan sekadar menjawab “apa”, melainkan akan menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Misalnya, mengapa air mendidih bila dipanaskan, mengapa bumi

berputar, mengapa manusia bernapas, dan seterusnya. Pengetahuan hanya dapat menjawab pertanyaan *apa* sesuatu itu, tetapi ilmu dapat menjawab *mengapa* dan *bagaimana* sesuatu itu terjadi. Jika pengetahuan itu mempunyai sasaran tertentu, mempunyai metode atau pendekatan untuk mengkaji objek tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, terbentuklah disiplin ilmu. Poedjawijatna (2004) mengatakan suatu pengetahuan bisa disebut ilmu jika memenuhi persyaratan berikut: berobjektivitas, bermetodos, universal, dan bersistem.

Apakah yang dimaksud dengan logika? Logika berasal dari kata *logos* (dalam bahasa Latin) yang berarti 'perkataan' atau 'sabda'. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *mantiq* yang artinya 'berucap' atau 'berkata'. Menurut Suriasumantri (1985), logika adalah pengkajian untuk berpikir secara sahih. Mundiri (2000) membatasi logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah (diambil dari definisi Irving M. Copi).

Mundiri (2000) mengemukakan bahwa yang pertama kali menggunakan kata *logika* adalah*Zeno* dari Citium. Kaum Sofis, Socrates, dan Plato tercatat sebagai tokoh-tokoh yang ikut merintis lahirnya logika. Logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theoprostus, dan Kaum Stoa. Logika dikembangkan secara progresif oleh bangsa Arab dan kaum muslimin pada Abad II Hijriyah. Logika menjadi bagian yang menarik perhatian dalam perkembangan kebudayaan Islam. Namun, juga mendapat reaksi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Ibnu Salah dan Imam Nawawi mengatakan haram mempelajari logika, Al-Ghazali menganjurkan dan menganggap baik, sedangkan Jumhur Ulama membolehkan bagi orang-orang yang cukup akalnya dan kokoh imannya.

Selanjutnya, *logika* mengalami masa dekadensi (kemunduran/kemerosotan) yang panjang. Logika menjadi sangat dangkal dan sederhana. Pada masa itu digunakan buku-buku logika seperti*Isagoge* dari Porphirius, *Fonts Scientie* dari John Damascenus, buku-buku komentar logika dari Bothius, dan sistematika logika dari Thomas Aquinas. Semua berangkat dan mengembangkan logika Aristoteles.

Pada abad XIII sampai dengan abad XV muncul Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raymundus Lullus, dan Wilhelm Ocham menyusun logika yang sangat berbeda dengan logika Aristoteles yang kemudian dikenal sebagai *logika modern*. Raymundus Lullus mengembangkan *metode Ars Magna*, semacam aljabar dengan maksud membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Francis Bacon mengembangkan *metode induktif*dalam bukunya *Novum Organum Scientiarum*. W. Leibniz menyusun *logika aljabar* untuk menyederhanakan pekerjaan akal serta memberi kepastian. Emanuel Kant me-nemukan *Logika Transendental* yaitu logika yang menyelediki bentuk-bentuk pemi-kiran yang mengatasi batas pengalaman.

Dari paparan di atas dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut.

- *Ilmu* adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang suatu objek tertentu. Suatu pengetahuan bisa disebut ilmu jika memiliki objek, memiliki metode, memiliki sistem, dan universal.
- *Logika* merupakan patokan, hukum, atau rumus berpikir yang bertujuan menilai dan menyaring pemikiran dengan cara serius dan akademis untuk mendapatkan kebenaran.

- *Ilmu Logika* adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk berpikir secara sahih: membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah.

FILSAFAT

(Filsafat: Pengertian, Ciri, Contoh & Fungsi Menurut Para Ahli)

Muqaddimah

Filsafat adalah istilah populer yang sering disalahartikan menjadi hal rumit yang sulit untuk dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seorang filsuf juga sering dianggap terlalu sibuk memikirkan persoalan mengawang-awang yang sulit dicerna dan tidak berguna.

Padahal, permasalahan pokok filsafat adalah persoalan yang pernah dipikirkan semua orang. Kita pasti pernah mempertanyakan, memikirkan dan merenungkan kenapa ini harus begini, dan tidak boleh begitu. Sedangkan itu harus begitu, tidak seharusnya begini.

Untuk apa saya kuliah? Mau jadi apa nanti? Kenapa ada orang yang sampai hati berbuat seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya sudah menjadi objek pemikiran filosofis. Jadi, secara umum, kita semua secara tidak langsung sudah berfilsafat, yaitu mengajukan pertanyaan filosofis, terlibat dalam perbincangan filosofis, dan memegang salah satu sudut pandang filosofis.

Bedanya, seorang filsuf melakukan semua itu dengan cara yang sistematis. Sehingga menghasilkan kadar keilmuan yang lebih tinggi dan terarah. Runutan paling awal dari sistem itu adalah hakikat dan pengertiannya sendiri.

1. Pengertian Filsafat

Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan

analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti: prinsip, keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik.

Seorang ahli filsafat, Karl Popper pernah berkata bahwa: Kita semua mempunyai filosofi yang masih menjadi misteri dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filosofi itu secara kritis.

Pernyataan Popper membawa pada opsi lain dari pengertian filsafat, yaitu pengertiannya sebagai objek, bukan kata kerja. Secara informal filsafat dapat berarti sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima begitu saja tanpa pertanyaan lagi; dogmatik.

Misalnya ketika seorang public figure berkata: “Filosofi saya dalam berkarya adalah … (*isi dengan berbagai alasan baik yang sudah umum disini*)” atau sesederhana dan sedingin: “Saya memukul anak saya dengan niatan baik untuk mendidik”. Seorang filosof akan mempertanyakan kembali pemikiran spontan tersebut dengan metode yang sistematis, terarah dan mendalam.

Pengertian secara Etimologi

Kata Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *philein* /*philos* yang berarti “cinta” dan *sophia* yang berarti “kebijaksanaan”. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan (*love of wisdom*). Sehingga seorang filosof adalah pencinta, pendamba atau pencari kebijaksanaan.

Pengertian berdasarkan Makna Kata

Di dalam KBBI, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemology (cabang-cabang ilmu ini).

Dalam *Webster's Dictionary,* Filosofi adalah semua pembelajaran eksklusif mengenai pedoman teknis; disiplin yang terdiri dari logika inti, estetika, etika, metafisik dan epistemology, yaitu pencarian mengenai pengertian umum tentang nilai dan realitas yang lebih spekulatif daripada observasi; analisis konsep dasar mengenai teori bidang kegiatan pemikiran; keyakinan, konsep, dan sikap paling umum dari individu atau kelompok; ketenangan emosi dan penilaian.

Secara makna kata, tampaknya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari pengertian filsafat dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Namun apakah pengertian tersebut sesuai dengan para ahli filosofi yang telah menggeluti bidang ini dengan seksama?

2. Pengertian Filsafat menurut Para Ahli

Filsafat adalah ilmu yang sudah cukup berumur, kita dapat merujuk pada ahlinya dari tahun 384-322 sebelum masehi. Setiap ahli dari masa ke masa menghasilkan persepsi berbeda namun dalam medan makna yang menjurus ke arah yang sama pencariannya. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli akan disampaikan pada penjabaran berikut ini.

Aristoteles (384-322 SM)

Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika dan pengetahuan praktis.

Plato (427-347 SM)

Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakekat.

Bertrand Russel (1967)

Filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, secara kritis dalam artian: setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu hingga kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan tersebut….(problemen der Philosophic, 1967: 7).

Beerling (1968)

Filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio, mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. (Er zijn eigenlijksheidvragen dalam Filosofic als sciencefiction, 1968: 44).

Karl Popper (1971)

Kita semua mempunyai filsafat yang masih menjadi misteri dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis,

dimana filsafat yang telah dianut sebelumnya itu tidak diselidiki secara kritis. (dikutip dari perdebatan televisi, 14 Nopember 1971).

Immanuel Kant (1724-1804)

Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat persoalan yaitu:

1. Metafisika, yaitu pertanyaan: Apa yang dapat kita ketahui?
2. Etika, Apa yang seharusnya dilakukan?
3. Agama, Sampai dimanakah harapan kita? hakikat manusia?
4. Anthropologi, Apa hakikat manusia?

Poedjawijatna

Poedjawijatna berpendapat bahwa filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.

Notonagoro

Notonagoro berpendapat bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah; yang disebut hakikat.

Driyarkara

Filsafat adalah refleksi yang mendalam tentang penyebab ‘di sana dan melakukan’, refleksi dari realitas (reality) jauh ke dalam ‘mengapa’ penghabisan itu.

Untuk memahami filsafat dengan lebih mudah kita dapat mencarinya melalui ciri-ciri umum yang terdapat dalam filsafat.

3. Ciri-Ciri Filsafat

Menurut Nur A. Fadhil Lubis, filsafat memiliki tiga ciri utama, yakni:

1. Universal (menyeluruh), yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja.
2. Radikal (mendasar), yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan essensial.
3. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif.

Beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri lain, yaitu:

1. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu.
2. Kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu (termasuk hasil filsafat), dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat.

3. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia.
4. Evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguhsungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan dan kebaikan.
5. Spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah.

4. Contoh Pertanyaan Filsafat

Memahami melalui contoh pertanyaannya juga akan mempermudah pemahaman kita pada apa yang dimaksud dengan bidang ini. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan filosofis.

1. Apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan proses fotosintesis?
2. Apakah kebudayaan selalu memberikan dampak positif?
3. Apakah tanggungjawab moral sejalan dengan determinisme yang diperpegangi sebagian besar penelitian ilmu alam?
4. Apakah wanita cantik itu harus selalu berkulit putih?
5. Apakah seni harus selalu indah?

Lalu bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Tentunya dengan metode filsafat yang sistematis dan tepat.

5. Metode Filsafat

Seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah, metode dan obyek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan obyek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri, sesuai dengan obyek formal itu dan uraian teorinya. Intinya ada banyak metode yang dapat digunakan untuk berfilsafat berdasarkan pegangan teorinya masing-masing.

Misalnya berfilsafat dapat dilakukan dengan cara dialektis, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas. Kemudian membuat bantahan dari pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diambil simpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadi hakikat yang lebih baik dari sebelumnya.

Beberapa metode filsafat antara lain:

1. Metode kritis
2. Metode Intuitif
3. Metode Skolastik
4. Metode Matematis
5. Metode Empiris-Eksperimental
6. Metode Transendental
7. Metode Dialektis
8. Metode Fenomenologis
9. Eksistensialisme
10. Analitika Bahasa

Penjelasan lengkap mengenai berbagai metode tersebut dapat dilihat pada artikel dibawah ini:

6. Kegunaan & Manfaat

Filsafat adalah akar dari semua ilmu. Pernyataan itu akan memberikan banyak jawaban dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis, tidak akan ada persoalan baru yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia.

Masalah adalah salah satu pemicu terbesar dari perubahan. Tanpa masalah, suatu kelompok tidak akan mampu berkembang. Jika manusia terus mengangkat paham kolonialisme, maka perang tidak akan pernah berhenti di muka bumi.

Ya, pada masanya *kolonialisme* adalah paham yang dianggap tepat guna, sehingga semua peradaban terbesar di dunia berlomba-lomba untuk mengkolonialisasi setiap ujung dunia yang belum terjamah oleh peradaban canggih.

Selain itu, mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan, akan membuat kita lebih arif dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan memahami alam dunia. Filosof memang tidak memberikan peranan slangsung dalam menyelesaikan hal sehari-hari yang harus diperbaiki dan dikembangkan saat itu juga. Itu adalah tugas dari para teknokrat.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

SPECTRUM MATERI DASAR

Secara garis besar, ada kategori-kategori disiplin ilmu yang bakal saya susun, koreksi kritik, dan materi tambahan. Berangkat pada materi *1.) ke-PMII-an, 2.) ASWAJA, 3.) NDP, 4.) ke-KOPRI-an, 5.) Mahasiswa,tanggungjawab dan Antropologi Kampus, 6.) Sejarah Bangsa Indonesia, 7.) GENDER, serta 8.) Pengantar Logika dan Filsafat.* Namun, dari delapan poin diatas ada dua haluan besar yang saya bedakan dikarenakan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), *bab VI pasal 18.* PMII telah merumuskan kategori wajib materi dalam hal ini terdapat pada nomor 1-6, selebihnya, nomor 7 dan 8 ialah tambahan sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya dengar berdasar sesuai keadaan dan kebutuhan wawasan Kader-kader khususnya PMII Komisariat IAIN Bone.

Penyusun berharap dengan hadirnya buku Spectrum Materi Dasar PMII ini menjadikannya pegangan wajib bagi setiap Kader PMII IAIN Bone. Perihal ini menjadi bahan kontemplasi yang jauh kepengurusan sebelumnya, Kalau boleh Penyusun katakan berapriori bahkan dengan renstranya yang terlalu melambung tinggi derngan dalih membentuk Jiwa Kader yang berintegritas dan mandiri tentunya pada proses pengembangan kualitas mutu Personalnya. Maka, dengan pembukuan Spectrum materi ini menjadi gagasan banding yang factual dan arah obyektivitas keilmuan Kader yang jelas.

Presented By :

Supported By :